

# **KEBIJAKAN PENDIDIKAN : KUMPULAN PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN**

## **Kontributor**

Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

## **Reviewer :**

Meirinawati    Fitrotun Niswah  
Tjitjik Rahaju    Eva Hany Fanisa  
Indah Prabawati    M. Farid Ma'ruf

## **Editor:**

Badrudin Kurniawan  
Galih Wahyu Pradana

## **Penyunting:**

Suci Megawati  
Trenda Aktiva Oktariyanda  
Deby Febriyan Eprilianto



**Penerbit**  
**Unesa University Press**

# Kebijakan Pendidikan : Kumpulan Penelitian Bidang Pendidikan

Diterbitkan Oleh

**UNESA UNIVERSITY PRESS**

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 –8288598

Email : unipress@unesa.ac.id

vi, 169 hal., Illus, 15,5 x 23

**ISBN :**

copyright © 2020 Unesa University Press

*All right reserved*

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit*

## KATA PENGANTAR

Buku yang berjudul Praktik dan Lesson Learned Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19 ini, merupakan kumpulan hasil karya mahasiswa dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Beberapa sumber dari buku ini berasal dari artikel terpilih dari hasil kontekstualisasi mahasiswa atas teori dan konsep kebijakan pendidikan yang dipelajari dengan fenomena dan *case study* yang ditemukan dalam praktik kehidupan sosial sehari-harinya. Sebagian besar tulisan dan artikel diangkat dari berbagai persoalan publik khususnya terkait kebijakan pendidikan yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah, terutama akhir-akhir ini dimana seluruh dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang mengharuskan sektor pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada tanpa mengurangi esensi dan tujuan dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Beberapa artikel dalam buku ini secara spesifik membahas tentang praktik implementasi kebijakan bidang pendidikan khususnya di Provinsi Jawa Timur, sebagai wujud analisis terhadap kebijakan pendidikan yang sifatnya multidimensional dengan harapan dapat menjadi suatu kajian dan masukan bagi pemerintah maupun sebagai bahan bacaan yang memperkaya khazanah keilmuan bagi masyarakat luas.

Selain itu, buku ini sekaligus juga merupakan bentuk apresiasi Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara terhadap karya akademis mahasiswa yang telah dikerjakan secara maksimal melalui proses bimbingan pada saat perkuliahan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca yang secara khusus memiliki minat studi tentang kebijakan pendidikan dan menjadi batu loncatan bagi semua penulisnya untuk tidak berhenti berkarya di manapun dan dalam bidang apapun.

November, 2020

Editor



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
Implementasi Kebijakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid 19 Pada Satuan Pendidikan.....	1
Implementasi Kuliah Daring Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya .....	15
Implementasi Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Terkait Covid-19 Tingkat SD Di Surabaya.....	29
Implementasi Program Kegiatan Belajar Di Rumah Selama Pandemi Corona Di Sekolah Dasar Kabupaten Sidoarjo .....	38
Implementasi Kebijakan Belajar Dirumah Tingkat Sma Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kota Kediri .....	49
Implementasi Program Kegiatan Belajar Di Rumah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Sman 1 Trenggalek.....	58
Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Dalam Situasi Covid-19 Di Sdn 1 Karang Agung Kabupaten Tuban.....	67
Implementasi Model Pembelajaran Siswa Dalam Menghadapi Situasi Pandemi Virus Covid-19 Di Sman 1 Prambon.....	81
Implementasi Kebijakan Belajar Di Rumah Selama Masa Pandemi Covid 19 Bagi Siswa Tingkat Sd Di Kabupaten Mojokerto .....	90
Implementasi Kebijakan Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Pada Tingkat SD Di Kabupaten Gresik ( Studi Kaus Di SD Negeri 1 Wringianom).....	102

Implementasi Kebijakan Penetapan Status Klb Non-Alam Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus SDN Grebegan Bojonegoro).....	118
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN MODA DARING DALAM SITUASI COVID – 19 (Studi Pada SMP Negeri 03 Lumajang) .....	128
Analisis Kebijakan Pembelajaran Daring Dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 Pada Tingkat Sma Di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Di Sman 1 Lamongan).....	144
Implementasi Kebijakan Belajar Di Rumah Pemkab Pasuruan Se- Tingkat Sekolah Dasar .....	159

**Implementasi kebijakan surat edaran dinas pendidikan provinsi jawa timur nomor 420/2011/101.1/2020 perihal perpanjangan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat covid 19 pada satuan pendidikan**

**(Studi pada Sekolah Menengah Atas atau Sederajat di Surabaya)**

**Laraswati Fitri, Parapat Jhon, Trisnawati Pramita**

**Abstrak**

Penyakit Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terinfeksi COVID-19. Setelah adanya penetapan tersebut, setiap negara yang terpapar Covid-19 wajib menjalankan protokol kesehatan. Presiden Indonesia sendiri juga telah menghimbau untuk bekerja dan belajar dari rumah. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan terkait pemebelajaran mandiri di rumah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur perihal pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat covid-19, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 tentang perpanjangan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19 pada satuan pendidikan. Dalam surat edaran tersebut terdapat empat hal penting yang perlu dipatuhi oleh guru SMA dan Siswa SMA, yaitu yang pertama tentang pelaksanaan tugas kedinasan lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, yang kedua perpanjangan masa bekerja dari rumah dan belajar dari rumah secara online, lalu yang ketiga pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik, dan yang keempat dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk

membayai hal-hal yang telah di syatkan. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Implementasi, pendidikan, online

### **Abstract**

Corona Virus Disease (Covid-19) is an infectious disease caused by the recently discovered corona virus. The World Health Organization or WHO has declared this disease a pandemic because all citizens of the world have the potential to be infected with COVID-19. After this determination, every country that is exposed to Covid-19 is required to carry out the legality protocol. The President of Indonesia himself has also appealed to work and learn from home. Related to that, the East Java Provincial Government issued a policy related to independent home learning at high school education units with predetermined conditions. Guided by the Circular of the Governor of East Java Province regarding the implementation of education policies during the Covid-19 emergency, the East Java Provincial Education Office issued a Circular of the East Java Provincial Education Office Number 420/2011 / 101.1 / 2020 concerning the extension of the implementation of education policies in the emergency period of the spread of covid -19 in educational units. In the circular, there are four important things that high school teachers and high school students need to obey, namely the first regarding the implementation of official duties at the Regional Education Office Branch, the second extending the period of working from home and learning from home online, then



the third is the implementation of activities learning from home for students, and the fourth is school operational assistance (BOS) or education operational assistance that can be used to pay for things that have been required. The focus in this study is the implementation model according to George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions.

**Keywords:** Implementation, education, online

## **PENDAHULUAN**

Virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Data hingga Sabtu, 28 Maret 2020 jumlah warga yang dinyatakan positif terkena virus corona mencapai 1.155 dan 102 di antaranya meninggal dunia. Seiring dengan meluasnya

penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia, Presiden Joko Widodo, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, di Istana Bogor, Jawa Barat, mengimbau, seluruh wargat tidak panik dan tetap produktif. Sehingga, penyebaran virus bisa dihambat dan dihentikan. Menurut Jokowi, dengan kondisi yang seperti ini, sudah saatnya kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Dengan adanya himbauan tersebut, Kemendikbud yang kemudian ditindaklanjuti Gubernur, Walikota, Bupati, dan Dinas Pendidikan, juga telah memberikan edaran lebih rinci, terkait solusi pencegahan Covid-

19 dengan melakukan belajar mandiri dari rumah selama dua pekan, pada satuan pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan terkait pemebelajaran mandiri di rumah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur perihal pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat covid-19, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 tentang perpanjangan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19 pada satuan pendidikan. Dalam surat edaran tersebut terdapat empat hal penting yang perlu dipatuhi oleh guru SMA dan Siswa SMA, yaitu yang pertama tentang pelaksanaan tugas kedinasan lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, yang kedua perpanjangan masa bekerja dari rumah dan belajar dari rumah,

lalu yang ketiga pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik, dan yang keempat dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang telah di syartkan. Dalam pembelajaran mandiri di rumah melalui sistem daring, tentunya merupakan hal yang baru dan perlu adaptasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, terdapat hambatan yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif dan efisien, seperti halnya dibutuhkan kuota internet yang lebih, pemahaman siswa terkait pembelajaran online dll. berdasarkan hal itu, maka penelitian ini tim penulis mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan, Studi pada Sekolah Menengah Atas di Surabaya.”**

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Kebijakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan, Studi pada Sekolah Menengah Atas di Surabaya.. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono

(2016), yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Wawancara dengan Narasumber**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa siswi Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Surabaya yang dilakukan secara online atau melalui whats app. Mereka cenderung sedikit kesulitan dan kurang nyaman dengan adanya kegiatan belajar mengajar secara daring, karena mereka dituntut untuk selalu memiliki kuota untuk mengakses pelajaran secara daring melalui web atau sejenisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bety yang merupakan siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Surabaya, berikut ini

“Iya mbak, tidak enak KBM dengan online, karena tugas yang diberikan lebih banyak, terkadang malah hari sabtu atau minggu masih diberikan tugas, terus ya harus nyiapin kuota banyak buat akses

google classroom sama ngirim tugasnya melalui email. Karena setelah diberi tugas itu, harus langsung dikerjakan terus difoto dikirim ke google classroom mbak. Terus juga gurunya hanya menjelaskan lewat chat mbak dan lebih lanjut disuruh mempelajari sendiri, nanti kalau ada pertanyaan baru disuruh bertanya melalui whats app atau mengirim email ke gurunya”.

(wawancara melalui chat whats app pada tanggal 4 April 2020).

Selain itu, siswa siswi juga cenderung kurang memahami materi yang disampaikan, karena terkadang ada guru yang hanya memberikan tugas secara langsung dan siswa dituntut untuk belajar sendiri materi yang sudah ditentukan. Lalu menurut siswa lain yaitu Anton, yang merupakan siswa Sekolah Menengah Kejuruan 2 Surabaya, mengungkapkan sebagai berikut

“Kalau disekolahku, tugasnya di lampirkan di web semua mbak, jadi gurunya memberikan link untuk masuk

ke web itu dan memberi tugasnya dikirimkan lewat web. Setelah itu tugasnya dikerjakan dalam bentuk word dan dikirimkan ke email kelas. Terus gurunya ngasih tugasnya ya sesuai jam pelajaran yang dijadwal biasanya mbak. Dan kadang ya mbak gurunya tidak memberi materi tapi tiba-tiba memberikan tugas. Terus kesulitannya ya terlalu banyak tugas yang diberikan mbak, sama juga butuh kuota banyak buat ngaksesnya mbak”.

(wawancara melalui chat whats app pada tanggal 4 April 2020).

Dari hasil wawancara dari salah satu siswa siswi SMK tadi, mereka cenderung merasakan hal yang sama, kesulitan yang dialami mereka juga terkait dengan kurang pahamnya mereka terhadap materi yang diberikan, dan dibutuhkan kuota yang memadai untuk mengakses kelas online dan materi serta tugas yang diberikan melalui web atau sejenisnya.

## **Analisis dengan Teori**

Dalam implementasi kebijakan, tentunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, kami memilih teori dari George C. Edward. Menurut George C. Edward III faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi yaitu:

### **1. Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Konsistensi dan keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan. Kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam

Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan, pemberitahuan surat edaran sudah dikomunikasikan dengan cukup baik, dibuktikan dengan persebaran surat edaran yang dilakukan secara online dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan mengirimkan ke email masing-masing sekolah, lalu surat edaran juga dipublikasikan secara online melalui akun sosial media Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, harapannya agar tidak hanya pihak sekolah yang mengetahui informasi tersebut melainkan juga masyarakat. Lalu dikarenakan pandemi hingga saat ini masih belum menurun jumlahnya, dan adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik maka Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 420/2438/101.1/2020 perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Timur, yang mana dalam surat

tersebut dibuat pada tanggal 16 April 2020 yang salah satu isinya menjelaskan tentang masa belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK di Jawa Timur yang semula dilaksanakan sampai dengan hari Selasa tanggal 21 April 2020, diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2020 dan kembali belajar di sekolah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020. Surat Edaran tersebut telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui akun resmi sosial media Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga telah dikirimkan melalui email kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selain itu tentunya juga terdapat kendala dalam implementasinya, yang mana kendala tersebut terjadi seperti kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan para murid dalam menjalankan kebijakan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dimana kurangnya koordinasi itu terkait sistem pembelajaran yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh para murid, seperti sistem pembelajaran online yang cenderung kedua belah pihak

yaitu pihak sekolah dan pihak murid yang belum siap dalam memanfaatkan teknologi dan menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring, diperlukan adaptasi yang cukup lama dalam penggunaannya dalam situasi pandemi ini.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Komponen sumber daya ini meliputi sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup berkualitas. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Dalam implementasi kebijakan ini sumber daya manusia yang dimaksud yaitu para pembuat kebijakan yaitu Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang mana dalam pelaksanaannya mereka telah membuat kebijakan dengan cukup baik, dengan kebijakan yang dibuat maka termasuk dalam strategi yang diambil untuk sistem pendidikan di tingkat SMA atau sederajat ditengah pandemi ini. Lalu sumber daya manusia yang kedua yaitu kelompok sasaran atau penerima kebijakan, yang mana kelompok sasarannya disini yaitu sekolah-sekolah menengah atas atau sederajat yang ada di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya manajemen sekolah sudah cukup baik dalam menjalankan

kebijakan yang telah ditetapkan, hanya saja terjadi beberapa kendala di setiap sekolah mengenai para guru dan murid yang perlu adaptasi dulu untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar secara online.

b. Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Anggaran mengenai kebijakan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan, telah dijelaskan dalam surat edaran yang mana dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk membiayai

penyediaan alat kebersihan, hand sanitaizer, desinfektan, dan masker bagi warga sekolah, masker diberikan kepada para guru atau karyawan yang bertugas piket di sekolah atau menjalankan tugas yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Lalu untuk pengadaan kebutuhan penambahan bandwidth internet di sekolah, dan juga pemberian kebutuhan pulsa data (kuota internet) bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan bekerja dari rumah dengan memperhatikan batas kewajaran, ketersediaan dana, dan skala prioritas penggunaan anggaran sekolah serta dilengkapi dokumentasi dan laporan penggunaan. Dalam implementasinya seringkali ada pengaduan dari wali murid, karena yang diberikan kuota internet hanya guru dan tenaga kependidikan, sedangkan para murid tidak diberikan, padahal dalam melaksanakan kebijakan kelompok sasaran harus menerima anggaran secara merata.

c. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Dalam implementasi kebijakan ini fasilitas yang diberikan yaitu berupa bandwidth internet di sekolah, lalu fasilitas lain yaitu mengenai sistem kerja staff aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PTT-PK pada cabang Dinas Pendidikan Wilayah diberlakukan sistem shift satu hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja di rumah yang pembagiannya dilakukan oleh Kepala Cabang dinas Pendidikan. Selain itu setiap pegawai yang sedang bekerja di kantor akan diberikan fasilitas masker dan dilakukannya *physical distancing* antar pegawai.



d. Informasi dan Kewenangan  
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam kebijakan ini informasi yang telah diberikan dan dipublikasikan sudah cukup baik, hanya saja mungkin ada beberapa kendala seperti adanya peserta didik atau murid yang tidak memiliki gadget sehingga agak sulit mengakses informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah. Lalu untuk wewenang ini berkaitan dengan kewenangan sekolah memberikan materi atau akses belajar mengajar secara online yang di setiap sekolah berbeda-beda, sebagaimana dalam surat edaran tersebut telah dijelaskan aktivitas dan tugas kegiatan belajar dari rumah dapat bervariasi antar peserta

didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing dengan mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.

### 3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sikap ini juga dapat diartikan sebagai karakteristik dari pelaksana kebijakan yang bereperan penting untuk mewujudkan keberhasilan sebuah kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Dalam kebijakan ini sikap yang ditunjukkan dari implementor cukup positif, dimana terbukti dengan para ASN ataupun PNS yang dalam melaksanakan kebijakan tersebut mematuhi

segala prosedur yang ada. mereka cenderung mendukung kebijakan tersebut, karena mereka sadar pentingnya kebijakan tersebut dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Pada aspek mekanisme, implementasi dari kebijakan ini sudah cukup terlaksana dengan baik, ditujukan pada SOP yang telah dibuat terkait sistem jam kerja dan mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan. Lalu aspek kedua yaitu struktur birokrasi, yaitu yang berkaitan dengan pola hubungan yang terjadi dan struktur organisasi yang tidak terlalu ruwet. Dalam kebijakan ini penyelenggaraan sistem birokasinya sudah cukup baik, sehingga mudah dilakukan pengawasan, ditambah dengan sistem yang serba online maka

lebih fleksibel dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Wabah virus Corona (Covid-19) yang terjadi pada saat ini sangat berdampak terhadap beberapa sektor yang ada seperti sektor ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan sektor lain nya. Salah satu yang terkena dampak adalah sektor Pendidikan, yang dimana proses Pendidikan yang seharusnya dilakukan dengan cara bertemu langsung (tatap muka) dihentikan untuk sementara dengan tujuan agar meminimalisir proses penyebaran dari Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada proses Pendidikan SMA di Kota Surabaya ditengah wabah Virus Corona (Covid-19). Proses Pendidikan di Kota Surabaya ditengah wabah virus Corona ini dilakukan dengan cara meniadakan proses pembelajaran di sekolah dan melakukan proses pembelajaran pada rumah masing-masing peserta didik maupun tenaga didik. Proses Pendidikan berlangsung dengan

memanfaatkan teknologi (daring). Melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan dikatakan bahwa proses pembelajaran tidak dilakukan pada sekolah melainkan dirumahkan dan diperpanjang sampai dengan 1 Juni 2020. Dalam surat edaran tersebut terdapat empat hal penting yang perlu dipatuhi oleh guru SMA dan Siswa SMA, yaitu yang pertama tentang pelaksanaan tugas kedinasan lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, yang kedua perpanjangan masa bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, lalu yang ketiga pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah bagi peserta didik, dan yang keempat dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional pendidikan dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang telah di syaratkan. Tetapi dengan diberlakukannya proses pembelajaran online salah satunya pada tingkat SMA,

banyak siswa yang merasa tidak puas dengan pembelajaran online yang dilakukan. Menurut para siswa tersebut, metode pembelajaran dengan sistem online dirasa tidak cukup efektif. Para siswa merasa terbebani dengan tugas yang semakin banyak dan berat, proses pengajaran yang dilakukan guru hanya melalui chat atau voice note, dan siswa lebih sulit dalam memahami pembelajaran yang diberikan. Pada intinya, para siswa merasa terbebani dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Dan untuk mensukseskan kebijakan ini, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pihak sasaran dan implementor agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/2011/101.1/2020 Perihal Perpanjangan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid 19 pada Satuan Pendidikan.

Tim Penulis. 2020. *Infomasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*.

Online(<https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>).

Melani, Agustina. 2020. *Pemprov Jatim Perpanjang Kegiatan Belajar di Rumah Bagi Siswa SMU/SMK hingga 1 Juni 2020*.

Online

(<https://m.liputan6.com/surabaya/read/4231577/pemprov-jatim-perpanjang-kegiatan-belajar-di-rumah-bagi-siswa-smusmk-hingga-1-juni-2020>).

Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

# IMPLEMENTASI KULIAH DARING DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Anggi Navyantito, Aimi Lisia , Lisa Rara

## Abstrak

Pandemi virus Covid-19 menyebar ke seluruh dunia. Virus covid-19 ini merupakan virus baru yang masih belum ditemukan obat dan vaksinnnya. Masyarakat tidak bisa beraktivitas bebas seperti hari-hari biasanya dikarenakan penyebaran virus covid-19 yang terus merajalela , masyarakat harus memakai masker jika ingin melaksanakan kegiatan dan menjaga jarak dengan masyarakat yang lain (social distancing) untuk menghindari penyebaran secara langsung. Virus ini menyebabkan masyarakat mengalami berbagai macam kerugian dalam beberapa aspek. Baik itu finansial maupun non finansial. Salah satu aspek yang mengalami kerugian yaitu aspek dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sempat terhenti beberapa saat dikarenakan adanya virus covid-19. Untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar yang tertunda maka pemerintah mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring di rumah. Pelaksanaan pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp,google classroom atau zoom. Salah satu kota yang terkena dampak dari virus covid-19 dan harus melaksanakan pembelajaran daring dirumah adalah kota Surabaya. Semua jenjang pendidikan yang ada di kota Surabaya harus mengganti pola belajar yang semula tatap muka menjadi pembelajaran daring dirumah. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut dianggap dapat memudahkan proses belajar mengajar. Tetapi ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan pembelajaran daring. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kuliah Daring

### **Abstract**

The Covid-19 virus pandemic is spreading around the world. The covid-19 virus is a new virus for which a cure and vaccine has not been found. People cannot do their activities freely as usual on a daily basis due to the spread of the covid-19 virus which continues to spread, people must wear masks if they want to carry out activities and keep their distance from people who are other (social distancing) to avoid direct spread. This virus causes people to experience various kinds of losses in several aspects. Be it financial or non-financial. One aspect that has suffered a loss is aspects of the world of education. Teaching and learning activities were interrupted for a while due to the covid-19 virus. To anticipate delayed teaching and learning activities, the government has replaced face-to-face learning with online learning at home. The implementation of online learning at home uses watshapp media, google classroom or zoom. One of the cities affected by the covid-19 virus and having to carry out online learning at home is the city of Surabaya. All levels of education in the city of Surabaya must change the learning pattern from face-to-face to online learning at home. Using some of these methods is considered to facilitate the teaching and learning process. However, there are some obstacles that are experienced when implementing online learning. The focus in this study is the implementation model according to George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureucratic Structure. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions.

**Keywords :** Implementation , online lecture

## PENDAHULUAN

Pada 11 Maret 2020 lalu, World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang juga disebut corona virus disease 2019 (COVID-19). Pandemi berarti wabah penyakit yang menyerang banyak korban dan terjadi serempak di berbagai negara. Sementara itu badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terinfeksi COVID-19. Penyakit ini menjadi penyakit yang mematikan karena merupakan virus baru yang belum ditemukan vaksin dan obatnya. Karena belum ditemukannya vaksin dan obat untuk COVID -19 menyebabkan terjadinya pertarungan sengit antara manusia dengan COVID-19, dimana ia yang memiliki antibodi kuat akan menang dan bisa sembuh atau bahkan tidak terinfeksi dan begitupun sebaliknya, yang memiliki antibodi lemah maka ia akan kalah. Berbagai elemen masyarakat, lembaga swadaya,

pemerintah hingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahu-membahu memberikan informasi akurat mengenai Corona COVID-10 beserta penyebaran dan cara pencegahannya.

Menurut data yang di kumpulkan oleh Worldometers (worldmeters.info, 2020) menunjukkan hingga 7 April 2020 pukul 18.00 WIB, total angka kasus positif COVID-19 di dunia telah mencapai lebih dari 1,3 juta pasien. Lebih dari 75 ribu nyawa melayang akibat infeksi virus ini. Meski begitu terdapat sekitar 293 ribu pasien berhasil sembuh dan memulai lagi kehidupan normal seperti sedia kala. Indonesia sempat mencapai tingkat kematian tertinggi yaitu sekitar 9,11 persen pada Sabtu, 4 April 2020. Saat ini, berdasar data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Selasa, 7 April 2020), angka tersebut turun menjadi 8 persen. Tapi tetap masih lebih tinggi dibanding angka kematian global sebesar 5,7 persen. (tirto.id, 2020).

Pada 26 April 2020, tercatat 8.882 kasus terkonfirmasi di Indonesia dengan 743 kasus kematian dan 1107 kasus sembuh. Indonesia sudah bersanding dengan tiga negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi dunia. Sebagai informasi, tingkat kematian diperoleh dengan menghitung jumlah pasien meninggal dibagi dengan kasus positif, lalu dikali 100 persen. (tirto.id, 2020). Untuk mencegah penyebaran virus yang semakin meluas, pemerintah menetapkan pemberlakuan *social distancing* bagi masyarakat. Social distancing merupakan upaya mengurangi kontak fisik dan menjaga jarak dengan orang lain. Social distancing atau yang kini juga disebut *physical distancing*, dilakukan dengan tidak pergi ke tempat-tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, pasar, konser, bioskop, kantor, atau sekolah dan menghindari pertemuan besar.

Pemberlakuan *Social Distancing* ini menjadi polemik bagi masyarakat, karena menyebabkan kerugian finansial maupun non finansial. Selain itu

karena dengan adanya sosial distancing ini maka beberapa kegiatan menjadi terhambat, dibatalkan dan harus dilakukan secara jarak jauh. Beberapa bidang kegiatan tersebut antara lain perekonomian, industry, kesehatan, pendidikan dan transportasi.

Salah satu kota terdampak covid-19 yang menerapkan sosial distancing adalah kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki pasien positif Covid-19 terbanyak. Menurut data dari CNN Indonesia, pada tanggal 17 April orang yang sudah dinyatakan positif Covid-19 di Surabaya yaitu berjumlah 250 orang. Dengan adanya jumlah korban covid-19 yang terus bertambah maka beberapa bidang kegiatan yang biasanya dilaksanakan diluar rumah menjadi di dalam rumah atau *work from home* (WFH).. Salah satu bidang tersebut yaitu bidang Pendidikan. Didalam bidang pendidikan pemerintah mengambil kebijakan terkait pembelajaran daring bagi semua tingkat pendidikan baik itu TK,



SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kebijakan ini dipilih untuk meminimalisir korban covid-19 agar tidak berjatuh lebih banyak lagi.

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerapkan perkuliahan daring untuk mendukung pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah virus semakin meluas. Sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 Tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) Di Universitas Negeri Surabaya, UNESA memberlakukan proses pembelajaran daring dan meminimalisir kegiatan yang menyebabkan kontak fisik.

Namun dalam pelaksanaan kuliah daring di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA masih terdapat hambatan yang menyebabkan proses perkuliahan tidak berjalan secara maksimal, seperti akses internet yang kurang memadai, metode pembelajaran yang belum kondusif, pemberian

materi yang diganti dengan pemberian tugas, terdapat dosen yang menolak melakukan bimbingan skripsi online, dll.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Teori Implementasi Edward III ini dinilai relevan karena variabel dalam teori tersebut dapat mencakup seluruh data yang dibutuhkan oleh penulis terkait pelaksanaan kuliah daring di FISH UNESA. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian **“IMPLEMENTASI KULIAH DARING DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA”**.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk

mendeskripsikan implementasi kuliah daring di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2016), yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Virus ini adalah virus yang mematikan karena belum ditemukan vaksin dan obatnya sampai detik ini. Banyak orang yang harus kehilangan

nyawa akibat tertular virus covid-19. Virus ini menyebabkan kerugian dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sempat terhenti sementara karena dilakukannya *sosial distancing* yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terhenti. Untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar yang terhenti maka pemerintah memutuskan kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara tatap muka diganti menjadi pembelajaran dirumah secara daring yaitu menggunakan media whatsapp, google classroom maupun zoom. Pembelajaran secara daring ini berlaku ke semua jenjang pendidikan sampai waktu yang belum ditentukan.

Salah satu kota yang melakukan pembelajaran daring adalah kota Surabaya dikarenakan kota Surabaya mengalami kenaikan jumlah kasus covid-19 yang melonjak sangat tajam. Universitas Negeri Surabaya merupakan salah satu universitas yang ada di kota Surabaya yang sedang

menjalankan kuliah daring untuk meminimalisir penularan virus covid-19. Namun pada saat pelaksanaan kuliah daring, pelaksanaannya belum berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala didalamnya.

Untuk mengetahui pelaksanaan kuliah daring yang dilakukan di Universitas Negeri Surabaya maka penulis melakukan wawancara kepada 4 narasumber yaitu mahasiswa yang sedang berkuliah di UNESA (Universitas Negeri Surabaya) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di berbagai jurusan yang ada. Mereka memberikan tanggapan yang berbeda-beda terkait penerapan kuliah Daring disaat wabah covid-19 sedang berlangsung. Kuliah daring ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak lagi.

Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi

(*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

1. Komunikasi (*Communication*)  
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Pada komunikasi terdapat beberapa variabel. Variabel pertama adalah variabel transmisi yaitu penyampaian informasi satu pihak ke pihak lain, komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Sejauh ini penyampaian informasi terkait materi dari dosen ke mahasiswa berjalan dengan lancar meskipun ada beberapa gangguan seperti sinyal dan paketan data yang digunakan, karena tidak semua mahasiswa mempunyai paketan data serta ada beberapa mahasiswa yang tempat tinggalnya tidak terdapat sinyal yang memadai guna menunjang pelaksanaan kuliah yang diselenggarakan secara daring ini. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan

oleh Meyga selaku Jurusan Hukum Angkatan 2017

“Menurutku, materi yang diberikan dosen selama kuliah daring itu tergantung melalui media apa dosen memberikan materi tersebut. Jika dosen memberi materi melalui power point yang dikirim lewat WhatsApp, itu menurutku kurang jelas kalau tanpa diberi penjelasan berupa video. Karena power point sebagai pedoman mahasiswa yang diberikan oleh dosen. Tetapi jika dosen memberikan materi melalui *g-meet* atau *zoom*, menurutku itu cukup jelas. Meski terkadang saat kuliah daring melalui *g-meet* atau *zoom* terhambat oleh sinyal, tetapi menurut saya cukup jelas. Karena kuliah daring melalui *g-meet* itu sama seperti kuliah di dalam kelas (*face to face*)”. (Wawancara 28 April 2020).

Variabel kedua adalah variabel kejelasan, kejelasan materi yang disampaikan oleh dosen ada materi yang mudah dipahami dan ada materi yang

tidak bisa dipahami oleh mahasiswa dikarenakan hanya melalui pemebelajaran daring, karena ada beberapa materi yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui pembelajaran daring saja. Selain itu juga terdapat kejelasan dari waktu pelaksanaan kuliah, waktu pelaksanaan pelaksanaan kuliah ini ada yang sesuai dengan jadwal kuliah asli dan ada juga yang tidak sesuai dengan jadwal kuliah asli dikarenakan ada beberapa jadwal kuliah yang berbenturan satu sama lain. . Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Devi selaku mahasiswa Jurusan PKN angkatan 2017

“Ada beberapa yang sesuai jadwal mii, tapi akeh sing ngga sesuai jadwal. Dosen mood ya ada kalo ga mood ya ga ada, tambah ono sing gaada matkul blas” (Wawancara 27 April 2020)

Variabel ketiga adalah variabel konsistensi yaitu komunikasi harus konsisten sehingga tidak membingungkan. Tetapi pada saat

wawancara terdapat beberapa dosen yang dimana informasinya membingungkan perihal jadwal kuliah yang terkadang maju dan mundur serta ada beberapa tugas yang mengalami mis komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Selain itu ada juga dosen yang tidak bisa dihubungi, dosen tersebut tidak membalas pesan dari mahasiswa sampai sehari-hari.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2013:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan dan aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan atau aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber

daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia yaitu dosen. Kemampuan dosen disini dirasa sudah cukup kompetitif yang dimana menjelaskan materi melalui beberapa portal online yang bisa diakses oleh mahasiswa. Tetapi ada dosen yang usianya sudah lanjut kurang mampu menguasai beberapa portal online tersebut yang menjadikan pembelajaran daring kurang efektif. . Seperti yang disampaikan oleh Fitri selaku mahasiswa jurusan Sosiologi angkatan 2017

“penjelasannya sih kurang jelas, biasanya sih ya, dosen yang udah sepuh terus gak ngerti gimana cara pakek aplikasi gitu, kalo dosen yang muda aman-aman saja. Soalnya kalo yang sepuh itu kayak Cuma ngasih tugas aja bikin resum lewat PJ. Terus kalo pas baca buku itu pasti ada aja yang gak ngertikan, lah kalo tatap

muka biasa bisa aja itu ditanyan terus dijelasin sama dosen,kalo kayak gini kondisinya susah sih” (Wawancara 27 April 2020)

Selain itu sumber daya ini juga berupa sumber daya peralatan yaitu media atau aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan yaitu WA Group, zoom/meet, google classroom, V-learning. Dengan adanya beberapa portal online ini maka memudahkan dosen untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Materi yang diberikan kepada mahasiswa biasanya dalam bentuk power point ataupun video berjalan dan voice note, serta memberikan tugas-tugas yang digunakan untuk menunjang nilai mahasiswa. Dan pada saat pelaksanaan ujian tengah semester juga dilaksanakan melalui berbagai macam portal online tersebut sehingga memudahkan satu sama lain dan tidak harus melaksanakan ujian tengah semester dengan tatap muka untuk meminimalisir terjadinya penularan virus covid-19.

### 3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Kemampuan dosen disini sudah dirasa cukup baik dalam memberikan materi kepada mahasiswa, yang dimana dosen tidak hanya memberikan materi terus menerus tapi juga ditambahi dengan lelucon sehingga pada saat melaksanakan kuliah tidak terlalu tegang dan santai. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Firda selaku mahasiswa jurusan Administrasi Negara angkatan 2017

“Cukup baik,ada beberapa dosen yang bersedia menjelaskan secara rinci mengenai materinya tapi ada beberapa juga yang hanya menjelaskan secara

singkat. Ada dosen juga yang pas memberi materi ditambahi guyonan jadi kelas lebih hidup gitu jadi gak tegang-tegang banget” (Wawancara 28 April 2020)

Tetapi ada juga dosen yang sikapnya kurang menyenangkan yaitu yang dimana memperlakukan se-enaknya. Seperti dosen meminta mahasiswa untuk presentasi tetapi dosen tersebut tidak muncul pada presentasi dimulai dan sesi tanya jawab bahkan sampai jam kuliah berakhir, dosen tersebut tidak muncul dan tidak memberikan pendapat dari jalannya presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dengan tidak adanya kemunculan dosen tersebut maka membuat mahasiswa menjadi bingung apabila ada pertanyaan atau materi yang belum terselesaikan dan belum dipahami oleh mahasiswa.

#### 4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebi-

jakan. Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme dalam pembelajaran daring ini tidak ada aturan tertulis yang jelas, yang dimana mekanisme pembelajaran merupakan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa baik itu jam perkuliahan maupun menggunakan portal online apa yang digunakan dalam media pembelajaran. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Meyga selaku mahasiswa jurusan hukum angkatan 2017

“Mekanismenya dosen saat kuliah daring itu berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba minta presentasi sekarang meskipun itu bukan jadwal mata kuliahnya. Ada yang lebih memakhumi dengan kondisi yang sekarang. Ada menyapa mahasiswa terlebih dulu baru menjelaskan secara detail bagaimana tugas tersebut dijelaskan” (Wawancara 28 April 2020).

Dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart

Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. SOP pada saat pelaksanaan perkuliahan daring di Unesa adalah dengan melihat Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: B/15254/UN38/TU.00.02/2020 Tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Universitas Negeri Surabaya. Didalam surat edaran tersebut berisikan perkuliahan daring yang akan dilaksanakan melalui beberapa portal online dan semua kegiatan bertatap muka dilaksanakan dalam bentuk online seperti uts, uas dan bimbingan skripsi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang berjudul Implementasi Kuliah Daring Di Fakultas Ilmu

Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyelenggaraan kuliah daring ditengah wabah covid-19 yang belum selesai ini sangat membantu mahasiswa dalam perkuliahan sehingga tidak menyebabkan mahasiswa untuk datang secara langsung ke kampus untuk mendapatkan materi. Perkuliahan secara daring ini bisa diakses melalui beberapa portal online seperti WA, Google Classroom, Zoom dll. Tetapi dengan adanya kuliah daring ini juga bisa memberatkan mahasiswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ada beberapa aspek yang harus



dibenahi untuk menunjang pelaksanaan kuliah daring yang lebih efisien dan efektif.

### **Saran**

Pelaksanaan kuliah daring di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sudah berjalan baik, tetapi alangkah lebih baik lagi apabila kendala-kendala yang dialami oleh mahasiswa maupun dosen tersebut dapat diatasi. Berdasarkan pemaparan peneliti mengenai hasil dari penelitian yang berjudul Implementasi Kuliah Daring Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, maka sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki program kuliah daring, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kemampuan dosen dalam memberikan materi harus jelas seperti jika memakai power point maka harus ada video dari dosen tersebut untuk menjelaskan setiap bagian yang ada di powerpoint untuk memudahkan mahasiswa dalam menerima materi yang diberikan.
2. Memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada dosen yang

sudah berumur atau sudah lanjut usia dalam menggunakan berbagai macam media online guna menunjang pembelajaran daring agar berjalan secara efektif dan efisien.

3. Selain itu beberapa dosen harus bersikap professional yaitu tidak meninggalkan mahasiswa yang sedang melaksanakan presentasi dan tetap memantau jalannya presentasi serta memberikan penjelasan materi terkait presentasi yang sedang dilaksanakan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Ihwanah, M. P. I. (2016). IMPLEMENTASI E-LEARNING DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN PGMI IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI. *Cakrawala*, XI(1), 76–91.
- Anggara,Sahya.2014.KebijakanPublik.Bandung:CV Pustaka Setia
- Arwildayanto.2018.Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis,Eksploratif dan

- Aplikatif. Bandung: Cendekia Press
- CNN Indonesia. 2020. Update Kasus Corona Jatim: 522 Kasus, Surabaya Terbesar. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200418110935-20-494784/update-kasus-corona-jatim-522-kasus-surabaya-terbesar>
- Padangsidimpuan, I. (2017). BELAJAR DAN PEMBELAJARAN. *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 03(2), 333–352.
- Subarsono, A.G. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Tirto.id. 2020. Mengapa Persentase Kematian Akibat COVID-19 di Indonesia Tinggi?. <https://tirto.id/mengapa-persentase-kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-tinggi-eLRR>. Diakses pada 9 April 2020, pk. 19.40 WIB.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru). Yogyakarta: MedPres <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200418110935-20-494784/update-kasus-corona-jatim-522-kasus-surabaya-terbesar>

## IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DI RUMAH TERKAIT COVID-19 TINGKAT SD DI SURABAYA

Pratiwi Rima, Mega Via, Putri Aulia, Saputra Andre

### Abstrak

Kasus covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 terus berlanjut hingga bulan April 2020 dan telah menyebar diberbagai penjuru Negara. Covid-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. penyebaran Covid-19 ini sangat cepat sehingga memaksa pemerintah di berbagai negara untuk mengambil tindakan seperti *Lockdown* termasuk Indonesia. Virus ini menyebabkan masyarakat mengalami berbagai macam kerugian di berbagai aspek. Salah satu aspek yang mengalami kerugian yaitu aspek dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar sempat terhenti beberapa saat dikarenakan adanya virus covid-19. Untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar yang tertunda maka pemerintah membuat kebijakan yaitu mengganti pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring di rumah. Pelaksanaan pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp,google classroom atau zoom. Dengan menggunakan beberapa metode tersebut dianggap dapat memudahkan proses belajar mengajar. Surabaya menjadi salah satu kota yang juga menerapkan kebijakan tersebut mengingat kasus positif Covid-19 Di Surabaya terus meningkat. Tetapi pada pelaksanaan kebijakan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh siswa sehingga kebijakan tersebut perlu untuk di evaluasi. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dala penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** implementasi, pembelajaran daring

## **Abstract**

The Covid-19 case that occurred at the end of 2019 continued until April 2020 and has spread throughout the country. Covid-19 is a collection of viruses that can infect the respiratory system. The spread of Covid-19 was so fast that it forced governments in various countries to take actions such as lockdown, including Indonesia. This virus causes people to experience various kinds of losses in various aspects. One aspect that has suffered a loss is the aspect of education. Teaching and learning activities were interrupted for a while due to the covid-19 virus. To anticipate delayed teaching and learning activities, the government made a policy that is to replace face-to-face learning with online learning at home. The implementation of online learning at home uses whatsapp media, google classroom or zoom. Using some of these methods is considered to facilitate the teaching and learning process. Surabaya is one of the cities that has also implemented this policy considering the positive cases of Covid-19 in Surabaya continue to increase. But in the implementation of the policy there are still some obstacles faced by students so that the policy needs to be evaluated. The focus in this research is the implementation model according to George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions.

**Key Word:** implementation, online learning

## **PENDAHULUAN**

Pada beberapa bulan yang lalu penyakit dari Kota Wuhan China yang disebut dengan istilah

Covid-19 telah masuk ke Indonesia dengan begitu cepatnya. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan.

Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Dalam penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan menyebabkan pemerintah untuk menegambil tindakan seperti *Lockdown* di Indonesia.

Salah satu cara penyebaran virus ini adalah diterbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut mengatur salah satu nya yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja. Maka dengan cepat pula beberapa kota di Indonesia terutama Surabaya menerapkan peraturan tersebut dengan memberlakukan belajar di rumah salah satunya tingkat Sekolah Dasar. Dengan diberlakukan himbauan untuk belajar dirumah maka dengan otonomi sekolah wajib untuk menggelar proses

belajar dan mengajar dengan melalui berbagai perangkat online yang sudah ditentukan setiap sekolah masing-masing. Pada SDN Ploso I Surabaya telah menerapkan peraturan tersebut sejak 16 Maret 2020.

Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan Sekolah Dasar adalah upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangsa terhadap bangsa dan Negara, trampil , kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan disekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas dasar antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia yang tertuang pada UUD 1945. Dalam menjalankan proses belajar mengajar dalam pandemi saat ini khususnya di SDN Ploso 1 Surabaya berinteraksi melalui Grup Whatsapp yang di pandu oleh setiap guru dalam jenjang kelas masing-masing. Dapat kita ketahui Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah, dalam jenjang pendidikan ini memiliki 6 tingkat dari mulai kelas satu hingga kelas enam yang memiliki pelajaran yang berbeda-beda di setiap tingkatannya. Siswa dalam tingkat yang paling akhir yaitu pada kelas enam dibentuk agar materi yang dipelajari dapat mengantarkannya kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Siswa pada kelas enam ini akan dibekali beberapa materi dari kelas empat hingga kelas enam untuk bisa melalui ujian yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kemendikbud yaitu Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. Pada ujian ini akan menjadi faktor seleksi bagi Sekolah Menengah Pertama.

Dalam canggihnya teknologi pada era saat ini, telah digunakan untuk melanjutkan proses belajar mengajar dalam kebijakan belajar dari rumah pada saat ini terkait himbuan dari pemerintah. Pada tingkat Sekolah Dasar, tingkatan yang paling krusial dalam pemberian materi terdapat pada kelas 6 yang pada

kenyataannya harus lebih intensif dalam pemberian materi ataupun latihan dalam menyiapkan diri untuk tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu Sekolah Menengah Pertama. Tetapi pada realitanya, dalam pengimplementasian belajar dirumah belum lah efektif karena kurangnya materi yang disampaikan oleh guru karena keterbatasan jarak, tugas yang diberikan oleh guru belum relevan dengan materi materi yang seharusnya diberikan untuk menunjang ketingkatan yang lebih tinggi, dan pada awalnya dalam pengimple-mentasian ini banyak tugas yang diberikan kepada siswa sehingga siswa hanya melihat alat elektronik saja dan membuat mata siswa menjadi lelah.

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan, yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Teori Implementasi Edward III ini dinilai relevan karena variabel dalam teori tersebut dapat mencakup seluruh data yang

dibutuhkan oleh penulis terkait pelaksanaan pembelajaran di rumah tingkat SD di Kota Surabaya. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian **“IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN DI RUMAH TERKAIT COVID-19 TINGKAT SD DI SURABAYA”**.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi sekolah daring SDN Ploso 1 Surabaya. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2016), yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 terus berlanjut hingga bulan April 2020 dan telah menyebar diberbagai penjuru Negara. Kasus positif covid-19 di berbagai cukup besar dan kasus meninggal dunia karena virus ini pun juga cukup besar. Berdasarkan data Worldometers, sampai pukul 18.00 WIB, 14 April 2020, jumlah kasus positif covid-19 di dunia ini telah mencapai 1.936.700 orang. Dan Negara yang menjadi salah satu positif covid-19 ini adalah Indonesia. Indonesia sendiri tercatat jumlah kasus mencapai 4.839. Virus ini telah menyebabkan kerugian di berbagai macam aspek. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Dari laman Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani

urusan covid-19 di <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/>, jumlah kasus positif di Surabaya telah menyentuh angka 228 kasus. Maka dengan banyaknya kasus tersebut Pemerintahan Kota Surabaya melakukan penindakan dan upaya dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Pemerintahan Surabaya pun juga telah menerapkan peraturan pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 bahwa salah satu poin yang dijelaskan adalah masyarakat dihimbau untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, telah menghimbau warganya untuk tetap dirumah saja dan meliburkan kegiatan sekolah tingkat TK sampai SMA dan menggantinya dalam pembelajaran berbasis online yaitu menggunakan media whatsapp, google classroom maupun zoom.

Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi

(*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pada kebijakan yang telah diterapkan pemerintahan Surabaya ini sudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut seperti kepala sekolah dan para guru tetapi pada kenyataannya belum ada pemahaman yang jelas terhadap orang tua dan murid sehingga kurang dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik. Seperti tetap membiarkan anak-anaknya bermain diluar yang seharusnya tetap dirumah saja, dan kurang terdapat



pengawasan terhadap orang tua.

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Pada kasus ini, sumber daya yang telah dilakukan tidak memiliki kekurangan apapun, karena jelas dengan guru, siswa dan orangtua pembelajaran tetap berjalan meskipun hanya dirumah.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap

atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dalam melaksanakan pembelajaran pada saat keadaan yang seperti sekarang ini, perlu adanya komitmen dan sikap kemauan dari setiap individu atau pelaksanaan kebijakan, karena mau tidak mau jika dalam kondisi seperti ini pendidikan tidak berjalan maka tujuan yang sudah disusun atau ditetapkan berdasarkan Undang-undang akan terhalang. Dengan adanya kepedulian antar sesama pembuatan kebijakan dan pelaksana maka kebijakan tersebut akan menjadi mudah dijalani dan akan menemukan letak keberhasilannya

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan

fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Dalam pelaksanaan pembelajaran di rumah SDN Ploso I memiliki struktur yang jelas dengan dimana guru tetap ada di batasan kelas yang akan mereka ajar dan juga aktivitas organisasi berjalan seperti biasa meskipun hanya bekerja dari rumah dan belajar dari rumah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyelenggaraan sekolah daring di SDN Ploso 1 ditengah wabah covid-19 yang belum selesai ini sangat membantu siswa SDN Ploso 1 untuk mengakses dan mendapatkan materi dari gurunya melalui beberapa portal online

seperti WA, Google Classroom, Zoom dll. Namun dalam pelaksanaan sekolah daring ini masih banyak ditemukan kekurangan yaitu materi yang seharusnya disampaikan pada pertemuan tersebut tidak diberikan, tetapi guru hanya memberikan tugas dan hanya tugas. Materi yang sebelumnya juga tidak ada pembahasan lebih lanjut oleh guru kepada siswa nya terutama kelas enam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan menurut George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari semua aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik. Tetapi ada beberapa aspek yang harus dibenahi untuk menunjang pelaksanaan kuliah daring yang lebih efisien dan efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Tirto.id. 14 April, 2020. Diakses  
pada 16 April 2020

[https://lawancovid-  
19.surabaya.go.id/](https://lawancovid-19.surabaya.go.id/). Diakses  
pada 16 April 2020

UNESA. 2000. *Pedoman  
Penulisan Artikel Jurnal*,  
Surabaya: Lembaga Penelitian  
Universitas Negeri Surabaya

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN BELAJAR DI RUMAH SELAMA  
PANDEMI CORONA DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN SIDOARJO**  
**Linda Wahyuni, Syarifah Nikmah, Fahmi Bima Nugraha, Kholilah  
D. Kharima**

**Abstrak**

World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus Corona atau Covid-19 sebagai pandemi karena virus Covid-19 ini telah menyebar hampir seluruh negara di dunia. Kegiatan belajar mengajar selama pandemi dilakukan secara online melalui tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bersentuhan atau bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, media teknologi dan media sosial yang tersedia saat ini. Tentu model pembelajaran jarak jauh ini tidak mungkin tak menimbulkan dampak dan masalah baru di dunia pendidikan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan belajar di rumah selama pandemi virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo pada tingkat sekolah dasar. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Kegiatan Belajar di Rumah Selama Pandemi Corona di Sekolah Dasar Kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci :** implmentasi, model pembelajaran, proses belajar mengajar.

**Abstract**

The World Health Organization (WHO) has designated the Corona or Covid-19 virus as a pandemic because the Covid-19 virus has spread to almost all countries in the world. Teaching and learning activities during the pandemic are carried out online through not being able to meet in person, not being able to touch or meet face to face. Interaction can be through print media, technology media and social media available today. Of course this distance learning model may not cause new impacts and problems in the world of education. Therefore, researchers are interested in examining how the implementation of the home study policy during the Covid-19 virus pandemic in Sidoarjo

Regency at the elementary school level. So the purpose of this study is to find out how to implement the home learning activity program during the corona pandemic at the Sidoarjo regency elementary school.

**Keywords:** implementation, learning model, teaching and learning process.

## PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang berjuang sekuat tenaga untuk melawan Covid-19 dengan berbagai strategi dan kebijakan termasuk menetapkan masa darurat hingga 90 hari, hingga setelah lebaran tiba nanti. Pemerintah Indonesia juga memberikan arahan dan sosialisasi terkait aktifitas yang harus dilakukan oleh masyarakat seperti pembatasan sosial (*social distancing*) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembatasan sosial (*social distancing*) ini memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi instansi pemerintah maupun instansi swasta dan kegiatan belajar mengajar dari rumah bagi sekolah dan perguruan tinggi serta berujung pada sektor lainnya seperti ekonomi dan keamanan.

Dengan adanya pembatasan sosial (*social distancing*) ini maka mau tidak mau berpengaruh dan berdampak pada aktifitas masyarakat begitupun juga berdampak di sektor pendidikan di Indonesia. Diakui oleh *United Nations of Educational* (UNESCO) bahwa wabah Virus Corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan, hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya diseluruh dunia dan mengancam hak-hak pendidikan siswa.

Sejak Presiden Jokowi memberlakukan pembatasan sosial (*social distancing*), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk meliburkan sekolah karena penyebaran virus corona yang semakin meluas dan mengkhawatirkan. Mendikbud juga mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan di semua

lini pemerintahan daerah serta mitra di kalangan swasta dalam menerapkan metode belajar online atau dalam jaringan (daring).

Kemendikbud juga telah mengembangkan aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis portal dan android bernama Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar dapat diakses di [belajar.kemdikbud.go.id](http://belajar.kemdikbud.go.id) yang di dalamnya terdapat beberapa fitur unggulan yang dapat diakses oleh peserta didik maupun guru yang diantaranya adalah sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal.

Kebijakan Pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meliburkan kegiatan belajar di sekolah ini tanpa terkecuali di kota besar mapupun di daerah terpencil. Begitupun juga di Kabupaten Sidoarjo menerapkan kebijakan libur sekolah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah zona merah, peringkat kedua terbanyak di Jawa Timur setelah Surabaya. Update per 10 April 2020, Kabupaten Sidoarjo terdapat

kasus 21 orang (sembuh 3 orang, meninggal 4 orang).

Kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini dilakukan secara online melalui tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bersentuhan atau bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, media teknologi dan media sosial yang tersedia saat ini. Tentu model pembelajaran jarak jauh ini tidak mungkin tak menimbulkan dampak dan masalah baru di dunia pendidikan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan belajar di rumah selama pandemi virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo pada tingkat sekola dasar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena peneliti bertempat tinggal di Sidoarjo dan selama penelitian ini berlangsung dilakukan ditengah pandemi Covid-19. Peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul "Implementasi Program Kegiatan Belajar di Rumah Selama Pandemi Corona di Sekolah Dasar Kabupaten Sidoarjo" yang akan dikupas dibawah ini.

## **METODE**

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan belajar di rumah selama pandemi virus Covid-19 di Kabupaten Sidoarjopada tingkat sekola dasar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena peneliti bertempat tinggal di Sidoarjo dan selama penelitian ini berlangsung dilakukan ditengah pandemi Covid-19. Peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif , yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semenjak corona virus disase (COVID-19) merabah keseluruh dunia, dan ditetapkan

oleh WHO sebagai wabah pandemik. Pada awal maret 2020 presiden indonesia telah mengumumkan bahwa di indonesia terdapat satu kasus COVID-19 dimana satu orang telah ditetapkan positif corona. setalah itu banyak kasus-kasus muncul yang ada di indonesia. Karena wabah ini tidak dapat dianggap remeh, karena penyebaran dan penularan sangat cepat sehingga pemerintah juga melakukan tindakan cepat untuk mengurangi penyebaran dan penularan yang lebih banyak.

Baik pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah semua membuat dan melakukan kebijakan salah satunya ada di pendidikan, kebijakan pendidikan yang dibuat banyak yang mengubah model pembelajaran yang semula dilakukan tatap muka dikelas seperti biasanya, namun sekarang lebih ke pembelajran secara online, daring, ataupun pembelajaran jarak jauh. Yang mana dapat dilakukan dirumah saja, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam bidang pendidikan yang mana untuk

meminimisir penularan virus sebagaimana dilakukan dengan *physical distancing* (jaga jarak fisik).

### **1. Gambaran Data Yang Didapat**

Berikut adalah hasil dari wawancara kami secara online; “Putri Nabila, Balongdowo, Mi Muh 2 Kd Banteng. Proses pelaksanaan pembelajaran dirumah dilakukan secara online, guru memberikan tugas dan hafalan. Pembelajaran awal mulanya dilakukan secara rutin dan sesuai dengan jadwal, namun akhir-akhir ini tidak sesuai jadwal bahkan hanya satu pelajaran saja satu hari. Sedangkan guru hanya selalu memberikan tugas dan hafalan namun tidak pernah memberikan penjelasan yang lebih intens. Sedangkan kadang orang tua juga tidak mengerti cara mengerjakannya. Sehingga tidak dapat mengerjakan beberapa tugasnya karena ketidakpahaman, di sisi lain guru juga tidak memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Selama pembelajaran tidak menyenangkan.

Saran sebaiknya diberikan penjelasan agar siswa-siswi dapat

lebih memahami materi tidak hanya sekedar diberikan tugas dan hafalan saja. Cantika D Falencia, Perum. Tanggulangin Asri, Sdn Kludan. Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sangat membosankan karena tidak ada komunikasi secara langsung, proses pembelajaran tidak dilakukan secara rutin hanya kadang-kadang saja guru memberikan tugas kepada kami. Dan tugas tidak terlalu banyak karena memang tidak rutin dalam pelaksanaan. Ketika pembelajaran melalui *whatapp* pun sangat membosankan tidak ada kata menyenangkan bagi kami.

Saran dari saya sebaiknya guru memberikan penjelasan materi terlebih dahulu melalui video yang dikirim sehingga kami dapat lebih jelas dan paham tentang pembelajaran dan materi tersebut.

Alaik Farhan Abadan, Sugihwaras, MI Darrusallam Proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara *online* dengan menggunakan media aplikasi *Whatsapp*, proses pembelajaran dilakukan secara rutin, dan guru



selalu memberikan tugas, namun guru tidak memberikan penjelasan sama sekali sehingga kami tidak memahami, namun pembelajaran menyenangkan karena banyak respon. Saran tidak ada.

Dari data yang kami dapatkan, terlihat jelas bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kabupaten sidoarjo khususnya ditingkat SD yang menjawab pertanyaan kami secara online masih adanya perbedaan sistem pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Sehingga perlu adanya pelaksanaan atau acuan dan landasan dalam pelaksanaan program kebijakan khususnya kebijakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah atau jarak jauh.

## **2. Analisis Dengan Teori**

Dalam penulisan kali ini kami menuliskan salah satu daerah yang mana telah membuat kebijakan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online, daring, ataupun pembelajaran jarak jauh yang masyarakat menyebutnya berbeda-beda.

Akan tetapi tetap satu makna yakni pelaksanaan pembelajaran dilakukan tidak tatap muka. Daerah yang kami bahas kali ini adalah Kabupaten Sidoarjo yang mana sejak pertengahan maret telah melaksanakan pembelajaran dirumah. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait pembelajaran selama pandemi corona ini ada di Indonesia. Dalam penulisan kali ini kami memilih tingkat SD dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Yang mana nantinya akan dapat disimpulkan apakah pelaksanaannya berhasil atau malah membuat masalah baru.

Dalam pelaksanaannya sebagaimana Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2011:99), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan  
Dalam pelaksanaannya standar kebijakan yang dimuat masih kurang, sehingga pelaksanaan pembelajaran pada setiap

daerah atau wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih kurang satu suara atau sewarna, banyak perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya. Tiap sekolah memiliki standar dan pelaksanaan yang berbeda. Ini membuat penentuan pelaksanaan dan kualitas pembelajaran ditentukan oleh pelaksana pihak sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara online dengan siswa-siswi.

b. Sumber daya

Dalam hasil wawancara kami terkait pelaksanaannya pembelajaran yang ada di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat mampu jika dilihat dari dari tenaga pendidik, walaupun tidak seratur persen tenaga pendidik yang dapat melakukan kegiatan pembelajaran online, karena beberapa faktor salah satunya adalah faktor usia, namun dalam skala besar sangat mampu jika dilihat dari sumber daya pendidik. Jika dilihat dari sumber daya masyarakat baik para orang tua siswa-siswa SD sudah mampu, karena banyak anak-

anak SD sekarang lebih melek teknologi, walaupun ada beberapa yang masih belum menjangkau karena faktor usia juga, banyak orang tua siswa-siswi yang tidak memahami teknologi apalagi menggunakan media *online*. Sehingga disini dalam pelaksanaannya rata-rata menggunakan WA.

Sedangkan jika dilihat dari sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup, karena dalam pembelajaran tingkat SD yang ada tidak perlu menggunakan laptop sebagai media utama dalam proses pembelajaran, namun dapat menggunakan handphone saja sudah cukup, dan di zaman dan era modern ini masyarakat sudah menjangkau alat komunikasi khususnya *handphone*. Sehingga jika dilihat dari ketersediaan sumber daya non manusia sudah cukup dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode ini.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan perlu

dilakukan komunikasi antar penguatan aktivitas, hal ini diperlukan agar komunikasi dalam suatu organisasi terjalin dengan kuat sehingga untuk menjalankan suatu program tidak ada terjadi kesalahpahaman antar individu dalam pelaksana program kebijakan. Dalam pelaksanaan program pendidikan saat ini khususnya di Kabupaten sidoarjo diperlukan penguatan komunikasi yang lebih mendalam karena kurang adanya koordinasi dalam pelaksanaan pembelajaran, ada yang benar-benar dalam pelaksanaannya sangat baik dan patut dicontoh, namun ada juga yang hanya memberikan tugas yang sangat banyak. Sehingga setiap sekolah memiliki sistem dan model yang ber-beda beda. Menurut kelompok kami perlu adanya penguatan komunikasi yang lebih mendalam agar aktivitas dan pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik dan menyenangkan tentunya, tidak membuat siswa-siswi semakin stress akan tugas-tugas yang diberikan.

- d. Karakteristik agen pelaksana Implementasi kebijakan dapat mencapai keberhasilan apabila dalam pelaksanaannya diidentifikasi dan mencari tau tentang karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang sudah telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya penelitian kami terkait pelaksanaan pembelajaran di rumah atau jarak jauh yang dilakukan melalui media informasi dan telekomunikasi atau secara online di kabupaten sidoarjo, mencakup struktur birokrasi, norma–norma dan pola hubungan yang terjadi didalam birokrasi tidak terlalu mempengaruhi dengan kebijakan yang saat ini kelompok kami angkat.

Karena dalam penulisan kali ini kebijakan yang dibuat memuat kebijakan pusat yang diturunkan ke seluruh daerah di indonesia dalam upaya pencegahan dan mengurangi

penularan virus corona disase yang saat ini telah mewabah di indonesia. Hanya saja didalam pola hubungan yang ada perlu dikaji dan diperbaiki lebih dalam agar tidak terjadi perbedaan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan pada setiap sekolah yang ada di kabupaten sidoarjo.

e. Kondisi sosial, ekonomi, politik

Di dalam kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada mencakup sumberdaya yang mampu mendukung suatu keberhasilan dalam implementasi suatu program kebijakan. Karakteristik beberapa aktor dalam pelaksanaan kebijakan juga mempengaruhi berjalannya program kebijakan. Dalam kepenulisan kelompok kami kali ini kondisi sosial yang tidak memungkinkan dalam pelaksanaan pembelajaran, ekonomi yang semakin menurun, dan kondisi politik tidak adanya pengaruh politik dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. Kerena dalam kondisi genting

perumusan kebijakan dan pelaksanaannyaapun dilakukan secara teruru-buru. Dilakukan dengan tidak mementingkan kepentingan diluar kepentingan yang sangat darurat kali ini. Dalam karakteristik elit dan publik dalam pelaksanaannya sangat mendukung dengan program kebijakan yang saat ini sedang dilakukan.

f. Disposisi implementor

Sikap atau disposisi diperlukan dalam pelaksanaan program kebijakan, dalam hal ini bidagi yakni:

1) Respons implementor terhadap kebijakan

Respon implementor dalam hal ini adalah setiap sekolah yang langsung mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi melalui media telekomunikasi. Dalam respon yang dilakukan pada setiap sekolah sangat tanggap. Mereka langsung memberikan arahan kepada siswa-siswi dan wali murid untuk pengubahan proses pembelajaran dalam upaya

pengurangan dan pencegahan virus corona disase.

- 2) Kondisi, didalam kondisi diperlukan suatu pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Mamahami kondisi negara atau bahkan seuruh dunia terkait virus yang mewabah kali ini, pemahaman kebijakan terkait apa yang harus dilakukan sudah dilakukan dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat bahwa memang benar mau tidak mau harus melakukan sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kesimpulan dari kepenu-lisan kelompok kami kali ini adalah dengan implementasi program belajar dirumah selama pandemi corona di kabupaten sidoarjo, perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terkait proses pembelajaran. Diperlukan kesera-sian antar pelaksana sekolahan yang ada di daerah masing-masing dikabupaten sidoarjo. Sebagaimana selain itu juga

diperlukan metode yang sesuai atau standar dalam pelaksanaan pembelajaran, agar dalam proses pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih efektif seperti biasanya. Tidak hanya sekedar memberikan tugas tanpa menjelaskan yang mana nantinya juga berdampak pada kondisi psikis siswa-siswi yang makin memburuk dan tidak ada peningkatan kompetensi pada mereka jika dilakuan seperti itu terus-menerus.

## **SARAN**

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Wijayanto, 2020. *Kegiatan Belajar di Jawa Timur Dimulai 2 Juni tapi Tetap di Rumah*.  
<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/06/02/196945/kegiatan-belajar-di-jatim-dimulai-2-juni-tapi->

tetap-di-rumah diakses 02  
Juni 2020, 12: 03: 45 WIB

Harto, Ambrosius, 2020. *Jawa Timur Perpanjang Masa Belajar di Rumah*.  
<https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/03/jawa-timur-perpanjang-masa-belajar-di-rumah/>

Sidoarjo News, 2020. *Tahun Ajaran Baru Dimulai 13 Juli, Metode Pembelajaran di Sidoarjo Dilakukan Secara Online*.  
<https://sidoarjonews.id/tahun-ajaran-baru-dimulai-13-juli-metode-pembelajaran-di-sidoarjo-dilakukan-secara-online/>

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR DIRUMAH TINGKAT SMA  
DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI KOTA KEDIRI  
(Studi Kasus di SMAN 1 KEDIRI)**

**Rizla Saradia A., Meyga Hidayah, Defi Intan Sari**

**Abstrak**

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat dari hari kehari dan tersebar diberbagai daerah salah satunya Kota Kediri. Dengan keadaan tersebut pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19 dengan cepat. Dampaknya terjadi pada seluruh sektor salah satunya dunia pendidikan. SMA Negeri 1 Kediri melaksanakan kegiatan belajar dirumah mulai dari bulan maret hingga juni dengan menggunakan beberapa platform serta aplikasi pendidikan salah satunya seperti Google Classroom, Quipper, Edmodo,dsb. Kendala yang terjadi pada awal penerapan belajar dirumah yaitu masih kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar dikarenakan KBM yang tidak tepat waktu serta beberapa siswa yang terkendala sinyal serta kuota internet. Jadi, implementasi kebijakan belajar dirumah yang diterapkan di SMAN 1 Kediri masih perlu banyak perbaikan dari segi SDM serta sumber daya lain yang mendukung jalannya kegiatan belajar mengajar.

**Kata Kunci:** Covid-19, kebijakan belajar dirumah, belajar mengajar.

**Abstract**

The development of the Covid-19 case in Indonesia is increasing from day to day and is spread in various areas, one of which is Kediri. Under these circumstances, the government imposed a lockdown policy to break the chain of rapid spread of Covid-19. The impact occurs in all sectors, one of which is education. SMA Negeri 1 Kediri carries out learning activities at home from March to June using several

educational platforms and applications, one of which is Google Classroom, Quipper, Edmodo, etc. Constraints that occur at the beginning of the application of learning at home are the ineffective teaching and learning activities due to inappropriate teaching and learning activities and some students who are constrained by signals and internet quotas. So, the implementation of the home study policy implemented at SMAN 1 Kediri still needs a lot of improvement in terms of human resources and other resources that support teaching and learning activities.

**Keywords:** Covid-19, home study policy, teaching and learning.

## PENDAHULUAN

Perkembangan kasus Covid-19 (*Corona Virus Disease – 19*) di Indonesia semakin meningkat setiap harinya terhitung hingga 24 April 2020 jumlah keseluruhan kasus positif terpapar covid-19 menurut data dari laman resmi Covid-19 Indonesia ([covid19.go.id](https://covid19.go.id)) yaitu sebanyak 8.211 kasus, sementara yang sembuh 1.002 orang dan 689 meninggal dunia. Penyebaran kasus virus covid-19 di Indonesia semakin cepat ke berbagai daerah salah satunya di Kota Kediri , pada tanggal 28 Maret 2020 walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengumumkan kasus pertama covid-19 di Kota Kediri yang secara otomatis membuat Kota Kediri menjadi salah satu

zona merah. Pasien pertama tersebut salah satu warga Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dilihat dari riwayat perjalanannya pasien tersebut pulang dari Kota Surabaya setelah mengikuti Pelatihan Petugas Haji (PPH) di asrama haji Sukolilo. Perkembangan kasus positif covid-19 di Kota Kediri terhitung hingga 24 April 2020 sebanyak 7 kasus positif, 4 sembuh dan 3 orang sedang dalam perawatan.

Dengan seiring waktu semakin terus bertambahnya kasus positif Covid-19 walikota Kediri memberlakukan *social distancing* pada warganya. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan *lockdown* untuk membatasi mobilitas masyarakat



untuk keluar masuk wilayah tertentu demi mencegah penyebaran virus corona. Dengan pemberlakuan kebijakan *lock-down* di Indonesia pastilah berdampak pada beberapa sektor yang mulanya pada perekonomian negara yang pasti sangat tertekan dan lesu, tetapi semakin lama dampaknya juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran khusus tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di tengah wabah penyebaran virus corona (Covid-19) yaitu SE No.14 tahun 2020 yang salah satunya berisi mengenai proses belajar dirumah ditujukan pada siswa mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, (2) Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup

antara lain mengenai pandemi Covid-19, (3) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dirumah, (4) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif. Penerapan kebijakan belajar dirumah dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah sebagai upaya pencegahan meluasnya Covid-19 pada peserta didik serta para tenaga pendidik.

SMA Negeri 1 Kota Kediri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 423.5/219/419.20.01/2020 mengenai Antisipasi Penyebaran Covid-19 yang berisi beberapa hal, salah satunya yaitu “Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kediri dilakukan dirumah peserta didik masing-masing dengan metode jaringan (*online*) maupun melalui penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan serta melakukan

evaluasi hasil setelah peserta didik kembali ke sekolah yang terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020 mohon Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk memantau pembelajaran mandiri putra/putri di rumah.” Pembelajaran yang telah dilaksanakan hingga sekarang yaitu dengan pemberian tugas secara berkala pada peserta didik melalui aplikasi Quipper, Google Classroom, Edmodo, Webek serta Whatsapp Group tetapi sebagian besar guru hanya memberikan tugas tetapi tidak dibarengi dengan pemberian serta penjelasan materi kepada peserta didik. Hal tersebut menyebabkan pembelajaran yang dilaksanakan kuranglah efektif dikarenakan tidak adanya timbal balik antara guru dengan murid serta murid akan sulit memahami materi jika melakukan pembelajaran secara mandiri tanpa pengarahan dari guru. Kondisi ini perlu dikaji ulang dalam penerapan kebijakan itu sendiri, kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berlandaskan strategi yang tepat, yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah tanpa

menghilangkan struktur kekuasaan dan instrumen-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik. Mengingat implementasi merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, untuk itulah perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Belajar Dirumah Tingkat SMA dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kota Kediri (Studi kasus di SMAN 1 Kediri).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dikarenakan peneliti tertarik untuk meneliti implementasi kebijakan belajar dirumah tingkat SMA dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Kediri (Studi kasus di SMAN 1 Kediri). Penelitian dilakukan pada siswa SMAN 1 Kediri yang diambil masing-masing 2 perwakilan dari kelas 10-12 serta 2 orang tenaga pendidik SMAN 1 Kediri. Dalam penelitian ini memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penjelasan yang tertulis

yang diperoleh dengan metode wawancara dengan narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan belajar dirumah selama masa pandemi Covid-19 bagi siswa SMAN 1 Kediri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 3 narasumber yaitu 2 siswa yang sedang bersekolah di SMAN 1 Kediri dan seorang guru yang mengajar di SMAN 1 Kediri. Kebijakan belajar dirumah ini diterapkan guna untuk menekan angka penyebaran dari covid-19. Pada saat wawancara pedoman yang digunakan oleh peneliti adalah teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 5 hal yaitu standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar Tujuan dan Sasaran Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn. Kejelasan tujuan dan isi kebijakan merupakan aspek terpenting dalam implementasi suatu kebijakan. Para agen pelaksana harus mengerti apa tujuan dilaksanakannya suatu kebijakan dengan jelas dan apa saja isi dari kebijakan tersebut sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, bahwa SMAN 1 Kediri memiliki tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas akan tetapi kebijakan belajar dirumah ini menimbulkan penurunan minat belajar siswa SMAN 1 Kediri karena faktor dari internal siswa itu sendiri dan dinilai sistem belajar dirumah ini kurang efektif karena ketidakjelasan waktu proses belajar mengajar dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki yang dapat mendukung keberhasilan dari proses implementasi kebijakan sehingga keberadaannya memiliki nilai yang sangat penting. Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan belajar di rumah yang diterapkan oleh SMAN 1 Kediri meliputi sumber daya manusia yaitu guru. Dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh guru SMAN 1 Kediri telah memenuhi standar yang ada dimana dapat menjelaskan materi kepada para siswa SMAN 1 Kediri dan menguasai media-media digital sebagai sarana pembelajaran. Selain sumber daya manusia dalam proses implementasi kebijakan belajar di rumah ini juga memiliki sumber daya peralatan yang digunakan sebagai media pembelajaran digital seperti Zoom, Edmodo, Skype, WA, dll. Dengan media tersebut diharapkan guru dapat dengan mudah memberikan materi

dan tugas kepada para siswanya.

## 3. Karakteristik organisasi pelaksana.

Menurut Van Horn dan Van Meter karakteristik organisasi pelaksana memiliki aspek penting yang memiliki pusat perhatian organisasi formal dan informal yang terlibat dalam proses implementasi ini. Karakter dan ciri-ciri inilah yang dapat mempengaruhi kinerja dari agen tersebut. Dalam hal ini SMAN 1 Kediri telah memiliki kesesuaian karakter agen pelaksana dengan SOP yang telah dikeluarkan bersamaan dengan surat edaran.

## 4. Komunikasi antara organisasi terkait dan pelaksana

Komitmen dari SMAN 1 Kediri dalam mengimplementasikan kebijakan belajar di rumah cukup tinggi. Setelah dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/1781/101.1/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Corona

Virus Disease (Covid 19) di Satuan Pendidikan, SMAN 1 Kediri secara konsisten melakukan proses belajar mengajar di rumah masing-masing dengan menggunakan media online.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) sikap penolakan maupun penerimaan dari agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi dari kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan yang telah dikeluarkan bukanlah hasil dari lingkungan sekitar melainkan bersifat top down yang memiliki kemungkinan pengambil keputusan tidak mengetahui keadaan lingkungan sekitar. Dalam implementasi kebijakan dirumah ini para agen pelaksana setuju dan sangatlah perlu untuk melakukan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan merupakan salah satu upaya untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19 ini

sehingga dapat meminimalisir jumlah korban yang terinfeksi. Meskipun secara sifat kebijakan ini bersifat top down akan tetapi kebijakan tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar.

6. Faktor lingkungan, ekonomi, dan politik

Lingkungan, ekonomi dan politik merupakan faktor internal yang digunakan untuk menilai apakah dapat mendorong pengaruh untuk pengimplementasian kebijakan ataukah menjadi penghambat bagi hal tersebut. Dalam hal ini dari hasil penelitian yang didapat adalah SMAN 1 Kediri mengalami hambatan untuk menerapkan daring dikarenakan salah satunya yaitu masalah kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing siswa berbeda, sehingga memiliki gangguan dengan tidak adanya kuota dsb yang membuat proses daring terlaksana. Selain itu karena keterbatasan jarak antara guru dengan siswa tidak bisa sepenuhnya untuk

langsung mengontrol kegiatan para siswanya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dalam kondisi yang dirasa cukup sulit untuk diramalkan ini dengan semakin meningkatnya penyebaran Virus Corona Disease 19 (Covid-19) di seluruh penjuru dunia bahkan Indonesia mengharuskan adanya penyesuaian kebijakan di berbagai sektor karena dengan pemberlakuan kebijakan lockdown serta social distancing. Salah satu sektor yang terdampak yaitu pendidikan yang dengan segera diberlakukan kebijakan belajar dirumah dengan pemantauan langsung dari orangtua. Implementasi kebijakan belajar dirumah dilaksanakan di SMAN 1 Kediri salah satu sekolah yang dengan tanggap menyikapi adanya kebijakan tersebut dengan mengeluarkan surat edaran antisipasi penyebaran covid-19.

Pengimplementasian yang dilaksanakan di SMAN 1 Kediri terdapat kendala salah satunya sumber daya dari masing-masing siswa yang memang tidak

semuanya berkecukupan sehingga ada yang mengalami kekurangan kuota pada saat proses pembelajaran maupun susah sinyal yg rumahnya berada di daerah pinggiran. Proses kebijakan belajar dirumah dengan berbasis daring memang dirasa solusi yang cukup efektif dalam keadaan seperti sekarang tetapi tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang maksimalnya proses implementasi.

### **Saran**

Dilihat dari adanya beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan belajar dirumah maka dapat dilakukan tindakan seperti memberikan bantuan kuota kepada peserta didik, membuat jadwal KBM secara efektif dan efisien, membuat inovasi proses pembelajaran agar siswa tidak jenuh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Surat Edaran Gubernur Nomor:  
420/2010/101.1/2020

Surat Edaran Kepala Sekolah  
SMAN 1 Kediri

<https://smastkediri.sch.id/read/29/edaran-antisipasi-penyebaran-covid-19>

Covid19.go.id Kedirikota.go.id

Polreskedirikota.com.*Keluarkan 11 Kebijakan Pemkot Kediri Bentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19*. Diakses pada 22 Maret 2020 dari <https://polreskedirikota.com/keluarkan-11-kebijakan-pemkot-kediri-bentuk-gugus-tugas-percepatan-penanganan-covid-19/>

Detik.com. *Apa yang Dimaksud Virus Corona Ini Asal Mula Hingga Gejala Covid-19*. Diakses pada 22 Maret 2020 dari <https://wolipop.detik.com/health-and-diet/d-4946027/apa-yang-dimaksud-virus-corona-ini-asal-mula-hingga-gejala-covid-19>

Santoso, Bambang dkk. 2012. *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press

Candra G.S (25 Maret 2020).*Para Siswa, Simak Surat Terbaru Mendikbud*

*Nadiem Untuk Kalian*. Diakses pada 29 Maret 2020 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200325124101-37-147405/para-siswa-simak-surat-terbaru-mendikbud-nadiem-untuk-kalian>

# IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN BELAJAR DI RUMAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI SMAN 1 TRENGGALEK

Mellia Seyselis

## Abstrak

Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah telah dilaksanakan oleh sekitar 28,6 juta siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA/SMK di berbagai provinsi. Per 18 Maret 2020, sebanyak 276 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia telah menerapkan kuliah daring (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020). Kebijakan pendidikan ini tak luput diterapkan oleh SMAN 1 Trenggalek, dimana sejak 16 Maret 2020 lalu pihak sekolah resmi mengeluarkan surat edaran sekolah yang berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, Nomor : 420/1780/101.1/2020, dengan pokok surat tentang peningkatan kewaspadaan terhadap corona virus disease (Covid-19) maka pihak SMAN 1 Trenggalek resmi menerapkan program kegiatan belajar di rumah terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020. Tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk memutus rantai persebaran Covid-19 yang mana dari hari ke hari terus menerus bertambah jumlahnya

**Kata Kunci:** Pandemi, Covid-19.

## Absrtact

As the spread of Coronavirus Disease (Covid-19) is increasing, the physical and mental health of students, teachers, school principals and all school members is a major consideration in implementing education policy. In Indonesia, the learning from home policy has been implemented by around 28.6 million students from SD to SMA / SMK in various provinces. As of March 18, 2020, 276 public and private universities in Indonesia have implemented *online courses*



(gratis.kompas.id, March 31, 2020). This education policy has not escaped being implemented by SMAN 1 Trenggalek, where since March 16 2020 the school officially issued a school circular based on a circular from the Governor of East Java, Number: 420/1780 / 101.1 / 2020, with the main letter of increasing awareness of corona virus disease (Covid-19), the SMAN 1 Trenggalek officially implemented a home learning activity program starting March 16, 2020. The purpose of this policy is to break the chain of Covid-19 distribution, which from day to day continues to increase in number

**Keywords: Pandemic, Covid-19.**

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam tumbuh kembang suatu negara. Dalam menghadapi berbagai macam situasi yang terus berubah-ubah sepanjang waktu, kebijakan terus menyesuaikan keadaan yang sedang berlangsung. Kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008, h.60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Implementasi Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan yang mana telah diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrut-men tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan. Menurut Teori Merilee S. Grindle

(Dalam Harbani Paslong 2009:645) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Saat ini dunia tengah digemparkan oleh covid-19 yang merupakan virus dengan penularan dan penyebaran yang begitu cepat. Antisipasi dari pemerintah dimana langsung menerapkan himbauan *social distancing* hingga *physical distancing* kemudian berlanjut dengan kegiatan belajar dirumah di berbagai macam tingkat atau jenjang pendidikan diharapkan mampu menekan angka pertambahan masyarakat yang terdampak covid-19.

Di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah telah dilaksanakan oleh sekitar 28,6 juta siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA/SMK di berbagai provinsi. Per 18 Maret 2020, sebanyak 276 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia telah menerapkan kuliah daring (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020)

Kebijakan pendidikan ini tak luput diterapkan oleh SMAN 1 Trenggalek, dimana sejak 16 Maret 2020 lalu pihak sekolah resmi mengeluarkan surat edaran sekolah yang berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, Nomor: 420/1780/101.1/2020, dengan pokok surat tentang peningkatan kewaspadaan terhadap corona virus disease (Covid-19) maka pihak SMAN 1 Trenggalek resmi menerapkan program kegiatan belajar di rumah terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020. Tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk memutus rantai persebaran Covid-19 yang mana dari hari ke hari terus menerus bertambah jumlahnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Nana Syaodih (2012:93) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena atau kondisi objek dimana peneliti adalah instrumen yang mengkaji

naturalistik (keadaan nyata), mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, analisis data bersifat induktif dan hasil menekankan pemaknaan parti-sipan dan mengembangkan teori.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Nana Syaodih (2012:72) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau mengam-barkan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.

Berdasarkan pernyataan menurut Nana Syaodih, maka penelitian di bidang pelayanan perpajakan dalah dengan melakukan pengamatan kemudian wawancara dengan siswa SMAN 1 Trenggalek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berkeanaan dengan penyebaran Corona virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi per-timbangan

utama dalam pelak-sanaan kebijakan pendidikan.

Secara global, berdasarkan data UNESCO tanggal 19 Maret 2020, 112 negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah, antara lain Malaysia, Thailand, Jerman, Austria, Meksiko, Afrika Selatan, Yaman, dan Zambia. Dari 112 negara tersebut, 101 negara menerapkan kebijakan belajar dari rumah secara nasional. Sementara 11 negara lainnya, termasuk Indonesia, menerapkan belajar di rumah di wilayah-wilayah tertentu (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020).

Di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah telah dilaksanakan oleh sekitar 28,6 juta siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA/SMK di berbagai provinsi. Per 18 Maret 2020, sebanyak 276 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia telah menerapkan kuliah daring (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020).

Di beberapa daerah proses pembelajaran dari rumah telah berlangsung sejak 16 Maret 2020 dan diperpanjang dengan

mempertimbangkan situasi di masing-masing daerah. Dari sisi sumber daya manusia, pendidik maupun peserta didik ada yang memang sudah siap. Tetapi banyak pula yang terpaksa harus siap menghadapi pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka berubah menjadi sistem belajar jarak jauh secara daring.

Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

Pelaksanaan *home learning* atau belajar di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tingkatan risiko penyebaran Covid-19 di daerahnya. Sebagai contoh di SMAN 1 Trenggalek, telah dilaksanakan *home learning* atau belajar di rumah mulai tanggal 16 Maret 2020.

Secara lebih jelas aturan mengenai proses belajar dari

rumah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (Covid-2019). Poin 2 surat edaran tersebut menjelaskan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19.
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah.
4. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan

memberi skor/nilai kuantitatif. Sebuah artikel.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Dalam penelitian ini maka sasaran utama adanya implementasi kebijakan belajar di rumah SMAN 1 Trenggalek adalah siswa SMAN 1 Trenggalek. Implementor kebijakan yang berperan penting dalam proses kegiatan belajar di rumah tidak lain adalah guru SMAN 1 Trenggalek. Dimana diharapkan dalam proses

implementasi kebijakan guru mampu mengajar secara daring dengan metode tertentu supaya siswa tetap mampu memahami konteks pelajaran dengan baik. Tentunya ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi implementor kebijakan, dimana sebelum adanya pandemi covid-19 tidak pernah diadakan kelas secara daring.

Banyak kendala yang muncul dalam proses implementasi kebijakan ini, seperti kurangnya fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar secara daring. Kurangnya persiapan baik dari guru maupun siswa sehingga seringkali kegiatan belajar mengajar ini justru malah kelas daring digunakan sebagai ajang serah terima tugas sekolah saja tanpa adanya kegiatan mengajar yang dapat dipahami oleh siswa.

Sesuai teori Merilee S. Grindle (Dalam Harbani Paslong 2009:645) Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dimana isi kebijakan darurat yang disahkan

dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas, yang dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Dengan kebijakan tersebut maka lingkungan imlementasi juga harus mendukung adanya kebijakan. Dalam hal ini keadaan lingkungan belum terlalu memadai untuk mendukung adanya kebijakan. Seperti dalam wawancara bersama salah satu siswa SMAN

1 Trenggalek, Yoga mengatakan bahwa tidak banyak siswa yang siap dengan adanya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring baik dari segi fasilitas belajar hingga kesiapan siswa dalam memahami materi melalui alat elektronik. Yoga dan teman-temannya banyak mengalami stres karena kegiatan belajar mengajar yang justru menjadi ajang pemberian tugas-tugas yang bahkan materinya saja belum dipahami betul oleh siswa. Selain itu kendala seperti susah signal yang dialami olehnya juga seringkali terjadi, hal ini berdampak dengan kerapnya ia tertinggal dalam mengirim tugas atau mendapat info seputar mata pelajaran atau tugas yang akan datang. Tentu selain mendapat serangan tugas yang cukup memberatkan siswa kendala tersebut jelas memperburuk keadaan. Adanya pandemi yang mengharuskan tetap dirumah dan bisa berkumpul dengan keluarga agar semakin dekat pun menjadi tidak insentif dikarenakan siswa harus terus menerus mengerjakan tugas yang begitu banyak diberikan setiap harinya, alih-alih semakin dekat dengan keluarga

siswa justru semakin dekat dengan ponsel dan laptopnya.

Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber-daya yang tersedia. Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2003:170-174), syarat-syarat untuk melakukan implementasi kebijakan agar efektif antara lain:

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Ketersediaan sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu untuk melaksanakannya.
3. Keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan.
4. Keandalan hubungan kausal yang mendasari kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Intensitas dan frekuensi hubungan kausalitas yang terjadi.
6. Hubungan saling ketergantungan (interdependensi) kebijakan.
7. Permohonan yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pelaksanaan home learning atau belajar di rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tingka-tan risiko penyebaran Covid-19 di daerahnya. SMAN 1 Trenggalek, telah dilaksanakan home learning atau belajar di rumah mulai tanggal 16 Maret 2020. Dalam implementasinya kebijakan ini mengalami banyak kendala yang harus dihadapi oleh implementor

kebijakan maupun sasaran kebijakan.

Kurangnya fasilitas yang memadai dan minimnya dukungan lingkungan implementasi membuat kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Untuk itu kebijakan harus memenuhi syarat implementasi supaya kebijakan dapat berjalan dengan baik. Seperti jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, ketersediaan sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu untuk melaksanakannya. Keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan. Kehandalan hubungan kausal yang mendasari kebijakan yang akan diimplementasikan. Intensitas dan frekuensi hubungan kausalitas yang terjadi. Hubungan saling ketergantungan (interdependensi) kebijakan. Permohonan yang mendalam dalam kesepakatan terhadap tujuan. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat

menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<http://https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7863dc6ebc2/ihome-learning-i-dan-pembatalan-un-tahun-2020-akibat-covid-19/>  
(diakses Minggu, 26 April 2020)

Arifa, Nurul Fieka.  
"TANTANGAN  
PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN BELAJAR  
DARI RUMAH DALAM  
MASA DARURAT  
COVID-19" Vol.XII,  
No.7/I/Puslit/April/2020.

Moerdiyanto. "TEKNIK  
MONITORING DAN  
EVALUASI (MONEV)  
DALAM RANGKA  
MEMPEROLEH  
INFORMASI UNTUK  
PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN  
MANAJEMEN". Artikel.

Peraturan Pemerintah Nomor 39  
Tahun 2006



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING DALAM SITUASI COVID-19 DI SDN 1 KARANG AGUNG KABUPATEN TUBAN**

**Nadya Rindayu F.F., Bintari Laras A, Feby Meilina Sucahyo**

### **Abstrak**

Di tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami kesulitan akibat wabah Covid-19 yang menyebar hingga menjadi penyakit Pandemi. Puluhan ribu orang dari berbagai Negara meninggal akibat wabah Covid-19. Indonesia merasakan dampak wabah Covid-19 yang sangat cepat penyebarannya dan melumpuhkan segala aktivitas masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Semua instansi pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi terpaksa harus diliburkan untuk mengurangi tersebarnya wabah Covid-19. Namun, hal ini tidak semata-mata berarti peserta didik dan atau mahasiswa libur dan tidak melakukan pembelajaran. Pemerintah dalam menangani hal ini mengambil langkah untuk membuat kebijakan bahwa peserta didik dan atau mahasiswa melakukan belajar di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dengan sistem *online*. Maka untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Dalam Situasi Covid-19 di SDN 1 Karang-Agung.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembelajaran Daring, Covid-19

### **Abstrak**

In 2020, the whole world is experiencing difficulties due to the Covid-19 outbreak which has spread to become a pandemic. Tens of thousands of people from various countries have died from the Covid-19 outbreak. Indonesia felt the impact of the Covid-19 outbreak, which spread very quickly and paralyzed all community activities. Education is one of the areas affected by the Covid-19 outbreak. All educational institutions at the primary, secondary and tertiary levels have to be

closed to reduce the spread of the Covid-19 outbreak. However, this does not merely mean students and / or students are off and do not study. The government in dealing with this matter took steps to make a policy that students and / or students learn at home through online learning or distance learning with an online system. Therefore, researchers are interested in examining how the Implementation of Online Learning Policies in the Covid-19 Situation at SDN 1 Karang-Agung.

**Key Word:** Implementation, Online Learning, Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat dan juga Negara. Hal ini menjadi cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk me-majukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar-kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...”

Jelas bahwa pendidikan merupakan cita-cita bangsa Indonesia dengan tujuan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pendidikan menjadi jendela bagi siapapun untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sains, matematika, agama, dan lain-lain. Apabila hal tersebut mampu diterapkan secara maksimal akan dapat menjadikan rakyat Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

Di tahun 2020 ini seluruh dunia mengalami kesulitan akibat wabah Covid-19 yang menyebar hingga menjadi penyakit Pandemi. Puluhan ribu orang dari berbagai Negara meninggal akibat wabah Covid-19. Negara melakukan karantina hingga

*lockdown* baik di wilayah, daerah, atau Negara. Yang artinya *lockdown* adalah membatasi aktivitas untuk keluar dan masuk di suatu wilayah, sehingga menyebabkan penurunan aktivitas diberbagai bidang seperti yang sangat terlihat adalah ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Indonesia juga mengalami serangan wabah Covid-19.

Indonesia merasakan dampak wabah Covid-19 yang sangat cepat penyebarannya dan melumpuhkan segala aktivitas masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Semua instansi pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi terpaksa harus diliburkan untuk mengurangi tersebarnya wabah Covid-19. Namun, hal ini tidak semata-mata berarti peserta didik dan atau mahasiswa libur dan tidak melakukan pembelajaran. Pemerintah dalam menangani hal ini mengambil langkah untuk membuat kebijakan bahwa peserta didik dan atau mahasiswa melakukan belajar di rumah

melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dengan sistem *online*. Hal ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah, dan Rektor masing-masing Universitas, serta Surat Edaran Mendikbud SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur kebijakan dari Surat Edaran Menteri Pendidikan juga diterapkan di seluruh tingkatan pendidikan. Menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online bagi peserta didik di bangku SMP dan SMA atau bangku perkuliahan merupakan hal yang bisa dilakukan. Namun, bagaimana dengan peserta didik yang masih duduk di bangku

Sekolah Dasar (SD), seperti pada SDN 1 Karang Agung Tuban yang juga melakukan pembelajaran daring dengan sistem *online* dan peserta didik masih sangat dini dalam hal pemanfaatan teknologi. Selain itu, tidak semua orang tua peserta didik memiliki *smartphone* yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran daring. Hal ini bisa menjadi permasalahan baru yang harus ditangani oleh pemerintah.

Penulis menganalisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan enam variable yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dari kebijakan belajar di rumah secara *online* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan mengetahui kendala apa saja yang terjadi selama kebijakan diimplementasikan.

## **METODE**

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Dalam Situasi Covid-19 di SDN

1 Karang-Agung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban tepatnya di desa karang agung kecamatan palang kabupaten tuban dan selama penelitian berlangsung dilakukan ditengah adanya pandemi Covid-19. Peneliti memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif atau penjelasan yang berupa kata-kata tertulis atau lisa dari narasumber serta gambaran yang ada dilapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 khususnya Pemerintah Kabupaten Tuban adalah dengan mengeluarkan kebijakan belajar dirumah secara online (belajar daring). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19 di SDN 1 Karang Agung Tuban yang dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam

variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah sebagai berikut.

### **Gambaran yang data yang didapat**

Berikut adalah hasil dari wawancara kami secara online. Salah satu lembaga pendidikan yang melaksanakan kebijakan pembelajaran daring di Kabupaten Tuban adalah SDN 1 Karang Agung. Setelah adanya intruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Surat Edaran, SDN 1 Karang Agung segera melaksanakan intruksi tersebut dengan memberikan himbauan kepada seluruh peserta didik, guru, dan tenaga pendidik lainnya untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas pembelajaran maupun yang lainnya secara online di rumah saja. Salah satu siswa bernama Siska Widianti siswa kelas 3 dari SDN 1 Karang Agung yang

merupakan sepupu dari salah satu penulis telah memberikan keterangan terkait pembelajaran daring atau online selama masa darurat Covid 19 ini. Berdasarkan hasil wawancara singkat, Siska menjelaskan mekanisme pembelajaran daring yang telah dilakukan di sekolahnya.

“Di sekolahku kalau mau pelajaran pakai grup WA di absen siapa saja yang hadir, terus setelah itu bu guru memberi materi dan memberi tugas, tugasnya ini nanti di foto sama trus dikirim ke WA, ”  
(Wawancara : Siska pada 20 April 2020 )

Melalui aplikasi WhatsApp pembelajaran di SDN 1 Karang Agung tetap berjalan sebagaimana mestinya, setiap pagi peserta didik dianjurkan online untuk mengisi absen kehadiran. Setelah itu guru memberikan materi melalui pesan di group WhatsApp, ataupun berupa file PowerPoint dan Word. Mekanisme pengumpulan tugasnya bisa dikirim langsung melalui WhatsApp. Meskipun dalam kondisi yang demikian

antusias peserta didik SDN 1 Karang Agung dapat dikatakan sangat tinggi, mereka berupaya sebaik mungkin agar dapat mengikuti pembelajaran secara online meskipun banyak kendala. Seperti yang dikatakan oleh Siska:

“Teman-temanku banyak yang gak punya HP, jadi yang gak punya HP ya sebisa mungkin buat ada, ada yang pake HP kakaknya, orangtuanya, kalau yang keluarganya gak mampu ya titip absen ke temannya. Sama tugasnya juga nanti minta info ke teman”  
(Wawancara : Siska pada 20 April 2020 )

Dengan kondisi yang demikian tentunya tidak mudah bagi siswa yang kurang mampu untuk mengikuti pembelajaran daring tersebut. Keterbatasan sarana prasarana media elektronik menjadi salah satu kendala yang dirasakan para siswa di SDN 1 Karang Agung tersebut. Selain keterbatasan sarana prasarana yang digunakan dalam proses belajar, mereka juga sangat bergantung pada kondisi jaringan

internet di daerahnya mengingat daerah Karang Agung Tuban merupakan daerah pesisir yang terkadang sulit untuk mendapatkan sinyal jaringan internet yang bagus.

Pembelajaran online di SDN 1 Karang Agung walaupun banyak kendala namun tetap masih berjalan meskipun belum sepenuhnya maksimal. Karena memang proses penyelenggaraan pendidikan tidak boleh berhenti walaupun berada di tengah-tengah pandemi virus Covid 19 ini. Dalam keterbatasan dan kondisi yang demikian, namun tidak menutup kemungkinan untuk siswa SDN 1 Karang Agung menunjukkan bakat dan kreatifitasnya. Melalui tugas-tugas yang diberikan guru para siswa tetap bisa menunjukkan kreatifitas masing-masing, selain itu juga untuk memanfaatkan waktu luang selama dalam masa lockdown dengan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap berada di rumah saja.

Selain tugas prakarya seperti yang tertera pada gambar

diatas, siswa juga dibekali dengan materi-materi kognitif lainnya untuk menunjang pembelajaran agar dapat secara efektif meningkatkan pengetahuan siswa. Pada awal-awal pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring ini, di SDN 1 Karang Agung Agungmasih belum sepenuhnya optimal, Sekolah dalam menyikapi adanya covid-19 awalnya hanya memberi tugas melalui WhatsApp Group untuk mempelajari dan mengerjakan buku tema, tanpa melakukan setor ke guru. Dalam hal ini siswa belajar sendiri dan akibatnya hal ini menjadikan beberapa siswa menjadi malas untuk belajar dan beranggapan bahwa mereka sedang liburuan. Kemudian setelah adanya kebijakan perpanjangan belajar di rumah atau sekolah dari rumah, pemerintah mengadakan program belajar di TVRI yang menyajikan materi dan ada penugasan juga untuk semua jenjang pendidikan sekolah serta sudah ada jadwal masing - masing kelas setiap harinya.

Guru melalui WhatsApp Group menugaskan siswa untuk

menonton TVRI sesuai jadwal yang telah diberikan dan guru menginstruksikan untuk siswa melalui orangtuanya mengirim hasil belajar berupa pengerjaan soal yang ada di materi TVRI, hasil tugas tersebut kemudian difoto dan dikirimkan melalui personal chat pada gurunya. Dari adanya pembelajaran yang demikian maka siswa tidak akan merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran online, sehingga mereka akan tetap semangat belajar meskipun berda di tengah - tengah pandemi ini. Untuk mensukseskan pembelajaran daring tersebut juga perlu adanya pendampingan dan pengawasan dari orang tua yang sangat dibutuhkan saat siswa melaksanakan pembelajaran dari TV atau dari siaran ulang di Youtube untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

## **Analisis Dengan Teori**

### **1. Standar dan tujuan kebijakan**

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur

yang berada di level pelaksana kebijakan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran teretntu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Apabila standar,tujuan dan sasaran kebijakan tidak tercapai maka akan menjadi boomerang dan konflik diantara para agen implementor, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran daring melalui surat edaran Menteri Pendidikan.Seluruh tingkatan pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan sistem online bagi peserta didik seperti pada SDN 1 Karang Agung yang juga melakukan pembelajaran daring. Tujuan pembelajaran daring untuk peserta didik pada tingkatan sekolah dasar ini pun tak juga untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan tidak banyak sekolah yang harus terpaksa

diliburkan untuk mengurangi tersebarnya wabah COVID-19

## **2. Sumber Daya**

Didalam implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia,sumber daya finacial dan sumber daya waktu tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor sumber daya manusia yang paling penting didalam implementasi kebijakan pembelajaran online (daring) Dibutuhkan sumber daya yang kompeten di dalam pelaksanaan program agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai sesuai tujuan. tentunya keberhasilan pembelajaran moda daring ini juga tidak terlepas dari aktor tenaga pendidik seperti Kepala Sekolah, guru dan juga Dinas



Pendidikan Kabupaten Tuban. Para aktor pelaksana tersebut sangatlah penting karena adanya kerja sama dari aktor pelaksana tersebut sangat penting agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Kebijakan yang luncurkan oleh Menteri Pendidikan ini juga menentukan sukses tidaknya adalah Pemerintah Kabupaten Tuban karena kebijakan ini diterapkan sesuai dengan wilayah serta kondisi geografis masing-masing daerah. Maka untuk itu peran Pemerintah Kabupaten tuban serta Dinas Pendidikan sangatlah penting dalam proses berjalannya kebijakan pembelajaran moda daring.

Sumber daya finansial atau dana pada kebijakan ini dikarenakan dampak akibat virus COVID-19 maka masing-masing peserta didik pun harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi pembelajaran mode daring ini, karena belum adanya bantuan dari pihak Pemerintah setempat atau dari pihak sekolahan terkait dana untuk

membeli kuota internet, maka tak banyak wali murid mengeluhkan karena kuota yang dibeli cepat habis dan juga adanya pandemi ini banyak orang tua murid tidak menerima pendapatan karena harus dirumah.

Sumber daya waktu untuk pelaksanaan kebijakan pembelajaran moda daring ini kurang efektif karena terkadang terhalangnya sinyal serta pembelajaran dalam moda daring pun terlalu monoton, jadi banyak peserta didik yang malas. Guru memberikan tugas ke peserta didik setelah itu, dikumpulkan melalui whatsapp masing-masing, tetapi kekurangannya ialah tidak ada bahan pembahasan untuk soal-soal yang sudah dikerjakan oleh peserta didik, alhasil pembelajaran moda daring ini kurang efektif. Serta terkadang waktunya pun tidak sesuai dengan jadwal yang tertera, terkadang mundur ataupun maju sesuai dengan instruksi guru pengampu mata pelajaran masing-masing

Sumber daya fasilitas yang dimiliki setiap orang berbeda-beda serta keterjangkauan kepemilikan hp canggih pun di Desa Karang Agung belum sepenuhnya memiliki karena keterbatasan ekonomi, maka tak heran bagi wali murid yang belum mempunyai hp android terkadang harus bertanya terlebih dahulu kepada wali murid yang lain, dan pengumpulan tugasnya pun disetor melalui pengumpulan di ruang guru.

### **3. Karakteristik Organisasi pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melakukan observasi lapangan untuk mengetahui bagaimana karakteristik yang ada pada aktor pelaksana Kepala Sekolah SDN 1 Karang Agung adalah aktor pelaksana yang tegas, disiplin serta ramah kepada wali murid serta selalu memberikan saran yang terbaik untuk wali murid yang keterbatasan ekonomi karena tidak punya hp android. Untuk karakteristik yang ideal dalam Kebijakan Pembelajaran Online (daring) Hasilnya adalah para aktor pelaksana mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Kepala Sekolah SDN 1 Karang Agung serta guru sebagai pendamping peserta didik

### **4. Sikap (*Disposition*) para pelaksana**

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan

bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Untuk itu, sikap mereka ini dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Pelaksana yang terlibat dalam program ini khususnya Kepala Sekolah SDN 1 Karang Agung sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Dari Dinas Pendidikan serta peran guru dalam mendampingi peserta didik pun sangat baik serta selalu responsif terkait pemberitahuan mata pelajaran di setiap jam-jam mata pelajaran serta selalu *fast respon* apabila ada pertanyaan terkait soal-soal yang telah diberikan tersebut.

Para pelaksana dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu pembelajaran moda daring yang dilaksanakan di

SDN 1 Karang Agung berjalan dengan baik tanpa meskipun terdapat kendala karena ada beberapa wali murid yang tidak mempunyai hp android karena keterbatasan ekonomi akhirnya harus mencari pengumuman atau apapun terkait pelajaran lewat kerabat atau teman sekelasnya.

##### **5. Komunikasi antar organisasi pelaksana**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter dalam Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran moda daring sejak awal

implementasi tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat sekolah maupun pusat. Karena sebelumnya pelaksanaan kebijakan pembelajaran moda daring yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ini memberikan dampak negatif ataupun positif di masyarakat. Karena adanya kebijakan ini keluaran pun belum ada himbauan serta sosialisasi, meskipun begitu kebijakan pembelajaran moda daring pun berjalan dengan baik dan efektif. Komunikasi yang dilakukan hanya lewat secara online melalui surat edaran ini disampaikan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), Surat Edaran dan petunjuk dari Kepala Daerah, dan Rektor masing-masing Universitas, serta Surat

Edaran Mendikbud SE Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Surat edaran tersebut pun dijelaskan secara rinci tentang standar, tujuan dan sasaran serta bagaimana aplikasi dalam menjalankan pembelajaran secara online agar peserta didik pun dalam melaksanakan kegiatan belajar tidak terjadi miss komunikasi dan nantinya tujuan yang diinginkan terkait kebijakan ini pun peserta didik tetap semangat dalam mengejar pendidikan meskipun pembelajaran dilakukan dalam moda daring.

## **6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi

sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya implementasi kebijakan menyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Jika dilihat dari segi sosial peserta didik sangat merespon serta tak heran banyak juga yang tidak pro atas kebijakan ini dikeluarkan. Karena kebijakan ini nantinya hanya membuat malas belajar dan juga tidak ada semangat belajar kembali serta metode pembelajaran secara online pun harus mengeluarkan uang untuk membeli data internet, dan disisi lain banyak orang tua peserta didik tidak bekerja, karena adanya pandemi ini. tapi disisi lain ada juga pro karena diberlakukannya kebijakan pembelajaran secara online juga nantinya dapat mengurangi penularan yang diakibatkan virus COVID-19

Dari segi ekonomi, kebijakan pembelajaran moda daring ini membebaskan wali murid yang segi perekomian menengah

keawah, karena pendapatan yang tidak tetap, apalagi karena dampak pandemi ini, banyak orang tua yang tidak bekerja alhasil tidak ada penerimaan. Pembelajaran moda daring ini dilaksanakan secara online serta membutuhkan data internet, jadi tak banyak wali murid sangat terbebani dengan pembiayaan pembelian data internet karena rata-rata dalam akses aplikasi untuk pendidikan setiap bulannya harus membeli kuota internet Rp.90.000.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pembelajaran Daring Dalam Situasi Covid-19 di SDN 1 Karang-Agung telah berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan sarana prasarana media elektronik karena tidak semua siswa berasal dari keluarga yang mampu. Secara keseluruhan, pengimplementasian kebijakan pembelajaran daring di SDN 1 Karang Agung berjalan sesuai prosedur. Sehingga proses

pembelajaran tetap dapat dilakukan dan peserta didik tetap dapat menerima materi belajar di rumah.

### **Saran**

Saran yang dapat kami sampaikan sebaiknya Pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan semata – mata tanpa memperhatikan kondisi di lingkungan. Banyak siswa yang sulit untuk mendapatkan akses dan tidak semua siswa memiliki media untuk pembelajaran daring. Sehingga diharapkan dalam hal ini Pemerintah dapat lebih solutif untuk mempermudah siswa dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Kemenag Tuban. 2020. UN dan UAMBN Madrasah Ditiadakan, Belajar di Rumah Sesuai Kebijakan Pemda. (online). <https://jatim.kemenag.go.id/b erita/521457/kemenag-tuban-un-dan-uambn-madrasah-ditiadakan-belajar-di-rumah-sesuai-kebijakan-pemda>. (diakses pada 14 April 2020)

Surabaya Pagi. 2020. Akibat Covid-19, Disdik Tuban Terapkan Sekolah Daring dan Larangan Studytour. (online). <http://www.surabayapagi.co m/read/akibat-covid19-disdik-tuban-terapkan-sekolah-daring-dan-larangan-studytour> (diakses pada 14 April 2020)

Kemendikbud. 2020. Kemendikbud Imbau Pendidik Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah Yang Terapkan Belajar di Rumah. (online). <https://www.kemdikbud.go.i d/main/blog/2020/03/kemend ikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah> (diakses pada 14 April 2020)

Surat Edaran Mendikbud SE 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

**IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN SISWA DALAM  
MENGHADAPI SITUASI PANDEMI VIRUS COVID-19 DI SMAN 1  
PRAMBON**

**Yeni Wulansari**

**Abstrak**

Virus pandemi Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus Corona menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Perhatian tertuju pada bagaimana sikap kita untukantisipasi terhadap penyebaran virus ini. Sebagaimana kebijakan pemerintah Indonesia yang di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada siaran pers menyatakan seluruh bangsa Indonesia harus saling bergotong royong saling bekerja sama untuk menghadapi problem dunia hari ini. Merebaknya virus ini sangat berdampak bagi dunia, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Salah satu nya yaitu kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan pembelajaran daring bagi siswa ini bertujuan untuk menerapkan pula kebijakan pemerintah untuk *Social Distancing* dimana dalam hal ini dibatasi pertemuan dengan tatap muka antara siswa dan guru. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan menggunakan pembelajaran daring ini dapat dilakukan dirumah, lebih rileks, dan dapat menambah pengetahuan tentang teknologi, sedangkan kelemahan dapat dirasakan apabila di beberapa tempat masih terkendala signal yang tidak mendukung untuk mengikuti pembelajaran daring yang membutuhkan akses internet, masih gagap teknologi terutama bagi tenaga pengajar yang sudah usia lanjut. Fokus penelitian ini yaitu model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana , Komunikasi, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data yang

digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pembelajaran Daring, Virus Covid-19.

### **Abstract**

The Covid-19 pandemic virus or better known as the Corona virus is a concern for the whole world. Attention is focused on how we anticipate the spread of this virus. As stated by the Indonesian government policy, the President of the Republic of Indonesia, Ir. Joko Widodo in a press release stated that all Indonesians must work together to work together to face today's world problems. The spread of this virus has had a huge impact on the world, both from a social, economic and educational perspective. One of them is the online learning or distance learning policy. This online learning policy for students also aims to apply government policies for social distancing, which in this case is limited to face-to-face meetings between students and teachers. The implementation of the online learning model during the Covid-19 virus pandemic has its advantages and disadvantages. The advantages of using online learning can be done at home, are more relaxed, and can increase knowledge about technology, while the weakness can be felt if in some places there are still unsupportive signals to take part in online learning that requires internet access, still not technology, especially for teaching staff who already old age. The focus of this research is the implementation model according to Van Meter and Van Horn which consists of Standard and Policy Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Communications, Attitudes of the Implementers, and the Social, Economic and Political Environment. The research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques by interview. Data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

**Keywords:** Implementation, Online Learning, Covid-19 Virus.



## PENDAHULUAN

Peristiwa dunia yang sedang menjadi perhatian masyarakat saat ini yakni merebaknya virus pandemi Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan virus Corona. Perhatian tertuju pada bagaimana sikap kita untukantisipasi terhadap penyebaran virus ini. Sebagaimana kebijakan pemerintah yang di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada siaran pers menyatakan seluruh bangsa Indonesia harus saling bergotong royong saling bekerja sama untuk menghadapi problem dunia hari ini. Merebaknya virus ini sangat berdampak bagi dunia, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Salah satu dampak yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bidang pendidikan, bagaimana virus ini berdampak dalam dunia pendidikan. Pemerintah telah memberikan sebuah kebijakan dimana para peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran virus ini, pembelajaran dilakukan

secara daring atau online di rumah masing-masing.

Kebijakan pembelajaran daring bagi siswa ini bertujuan untuk menerapkan pula kebijakan pemerintah untuk *Social Distancing* dimana dalam hal ini dibatasi pertemuan dengan tatap muka antara siswa dan guru. Meski demikian, kebijakan ini pastinya menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Kebijakan lain dalam hal ini, ditiadakannya Ujian Nasional (UN). Banyak kendala yang ditemukan dalam penerapan pembelajaran daring ini. siswa lebih mencintai kebersihan dan juga menjaga lingkungan , namun siswa belajar dirumah terkadang malah menimbulkan rasa malas pada dirinya , dan masih banyak lagi kendala-kendala yang mungkin dirasakan oleh peserta didik saat ini. Salah satunya yang merasakan dampak pembelajaran daring ini ada di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di SMAN 1 Prambon. Seluruh siswa merasakan akibat dari pandemi virus corona tersebut. Berbagai macam atau model pembelajaran dilakukan oleh pihak sekolah atau

guru masing-masing mata pelajaran. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi peserta didik. Dalam hal pembelajaran daring ini, juga melihat sisi lingkungan dimana daring membutuhkan sinyal untuk mengakses pembelajaran daring. Apabila lingkungan tidak mendukung kekuatan sinyal juga berdampak pada pembelajaran daring tersebut.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah semata untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 ini, dimana harapannya kebijakan dalam situasi darurat ini dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19 atau virus Corona ini. Harapan besar Pemerintah segala bentuk antisipasi yang dilaksanakan dapat mencegah virus ini. Situasi ini menjadikan kita untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan dan untuk mengetahui bagaimana pendidikan di Indonesia dalam menghadapi virus Covid-19 ini dilakukan penelitian yang membahas bagaimana implementasi model pembelajaran yang dilakukan

oleh sekolah di SMAN 1 Prambon, Nganjuk.

Penelitian ini di analisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teori yang digunakan dinilai relevan karena terkait penelitian implementasi model pembelajaran daring di SMAN 1 Prambon. Dari uraian tersebut dapat ditarik judul penelitian **“Implementasi Model Pembelajaran Siswa Dalam Menghadapi Situasi Pandemi Virus Covid-19 Di Sman 1 Prambon”**.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan implementasi pembelajaran daring selama masa pandemi Covid di SMAN 1 Prambon. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori

implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi, Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Nganjuk merupakan sebuah kabupaten yang berada di Proinsi Jawa Timur dan menjadi daerah zona merah Covid-19 dengan rincian pasien positif 9 orang dan 2 orang lainnya dinyatakan sembuh. Penyebaran Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi negara Indonesia, dalam aspek sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Salah satu dampak Covid-19 tersebut mengakibatkan seluruh aktivitas belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran

daring atau *online*. Seluruh lembaga pendidikan melaksanakan kebijakan kuliah daring ini sejak dikeluarkan Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 agar seluruh kegiatan belajar mengajar baik sekolah maupun kampus perguruan tinggi menggunakan metoda daring (dalam jaringan) atau *online* sebagai upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Covid-19. Salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut yaitu di SMAN 1 Prambon Kabupaten Nganjuk, berdasar Surat Edaran yang turun bahwa pembelajaran dilakukan di rumah dengan akses internet. Kebijakan ini dilaksanakan untuk seluruh kelas mulai dari kelas X, XI, dan XII. Surat Edaran tersebut menyatakan salah satunya yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran daring, rapat pleno kenaikan kelas, rapat pleno kelulusan kelas XII, serta pengumuman kelulusan yang diumumkan melalui website sekolah. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Kelebihan menggunakan pembelajaran daring ini dapat dilakukan dirumah, lebih rileks, dan dapat menambah pengetahuan tentang teknologi, sedangkan kelemahan dapat dirasakan apabila di beberapa tempat masih terkendala signal yang tidak mendukung untuk mengikuti pembelajaran daring yang membutuhkan akses internet, masih gagap teknologi terutama bagi tenaga pengajar yang sudah usia lanjut, lebih banyak menghadap pada gadget yang dapat melelah mata, dan lain-lain.

Kebijakan pembelajaran daring di SMAN 1 Prambon Kabupaten Nganjuk dilakukan berdasar kesesuaian pengajar dalam memberi materi atau ujian. Pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Google Classrom, Whatsapp Group, dan Google Form. Seluruh model pembelajaran tersebut dilaksanakan di beberapa kelas dengan rincian diskusi online, tugas harian, ulangan harian, dan lain-lain. Pembelajaran online ketika materi ataupun tugas disampaikan melalui Google Classroom dan Whatsapp Group,

dengan presensi kehadiran dilihat dari kehadiran dalam mengikuti pembelajaran. Apabila didapati siswa yang belum terekap presensi akan di cek ulang dan alasan tidak mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk Ulangan Harian atau Ujian dilakukan dengan menggunakan Google Form yang telah disediakan oleh pihak sekolah ataupun pengajar mata pelajaran masing-masing.

Fokus penelitian ini yaitu model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut uraian dari indikator-indikator tersebut;

1. Standard dan Tujuan Kebijakan  
Standart kebijakan pembelajaran daring sejatinya telah diatur dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan namun masih gagal penerapannya. Tujuan kebijakan ini memang sebagai

tantangan memasuki era digital atau revolusi industri 4.0 ini. Pandemi Covid-19 bukan sebagai pemantik pembelajaran daring di situasi yang sekarang ini. Kebijakan ini dilakukan sebagai penekan aktivitas diluar ruangan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut.

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya yang menjadi penentu keberhasilan implementasi tersebut diantaranya Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Waktu, dan Sumber Daya Dana. Pelaksanaan pembelajaran daring ini membutuhkan sumber daya yang mumpuni, namun bukan karena pembelajaran daring di situasi sekarang ini pandemi Covid-19 dapat terlaksana karena Sumber Daya yang sudah mumpuni, karena memang situasi mengharuskan pembelajaran daring tersebut. Dalam pelaksanaannya selama situasi, masih banyak sumber daya yang dibutuhkan, seperti manusia yang kompeten ,

waktu yang tepat, dan juga dana sebagai akses masuk internet.

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Sejauh ini organisasi pelaksana telah berjalan ketat dan disiplin dalam menjalankan kebijakan pembelajaran daring untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 tersebut. Seluruh organisasi juga telah menerapkan Work From Home (WFH).

## 4. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan antara agen pelaksana dengan aktor aktor yang terlibat untuk dapat disiplin peraturan kebijakan pembelajaran daring dalam dunia pendidikan telah terlaksana dengan baik. Tidak ada kesalahan pemahaman atau pelanggaran yang terjadi selama kebijakan pembelajaran daring tersebut.

## 5. Sikap Para Pelaksana

Intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksanaan (*performance*) kebijakan.

Sikap tegas dan disiplin menjadi kunci keberhasilan implementasi pembelajaran daring ini.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Lingkungan yang kondusif dengan adanya kebijakan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 ini menunjukkan pelaksanaan model pembelajaran daring ini berjalan sesuai tujuan. Namun, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang terkadang masih tidak kondusif dapat menjadi terkendalanya penerapan pembelajaran daring tersebut.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kebijakan pembelajaran daring bagi siswa ini bertujuan untuk menerapkan pula kebijakan pemerintah untuk *Social Distancing* dimana dalam hal ini dibatasi pertemuan dengan tatap muka antara siswa dan guru.

Kebijakan pembelajaran daring di SMAN 1 Prambon

Kabupaten Nganjuk dilakukan berdasar kesesuaian pengajar dalam memberi materi atau ujian. Pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Google Classrom, Whatsapp Group, dan Google Form. Seluruh model pembelajaran tersebut dilaksanakan di beberapa kelas dengan rincian diskusi online, tugas harian, ulangan harian, dan lain-lain. Pembelajaran online ketika materi ataupun tugas disampaikan melalui Google Classroom dan Whatsapp Group, dengan presensi kehadiran dilihat dari kehadiran dalam mengikuti pembelajaran. Apabila didapati siswa yang belum terekap presensi akan di cek ulang dan alasan tidak mengikuti pembelajaran. Sedangkan untuk Ulangan Harian atau Ujian dilakukan dengan menggunakan Google Form yang telah disediakan oleh pihak sekolah ataupun pengajar mata pelajaran masing-masing.

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran daring selama situasi pandemi Covid-19, kebijakan tersebut dapat dianalisis dengan berdasar pada

teori Van Meter dan Van Horn. Teori dalam implementasi kebijakan yaitu untuk melihat capaian implementasi yang terdapat 6 variabel, meliputi; (1). Standard dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Organisasi Pelaksana, (4) Komunikasi, (5) Sikap Para Pelaksana, (6). Lingkungan soial, ekonomi, dan politik. Seluruh variabel menunjukkan pencapaian implementasi pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 di SMAN 1 Prambon Kabupaten Nganjuk.

### Saran

Pelaksanaan model pembelajaran daring yang ada di SMAN 1 Prambon sudah berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang ada dalam masa pembelajaran lebih baik dapat diatasi oleh pihak terkait. Berdasarkan uraian pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut;

1. Kemampuan Guru yang mengajar daring harus jelas ketika menyampaikan pelajaran atau materi.

2. Memberi Pelatihan atau Sosialisasi kepada guru yang sudah lanjut usia ataupun yang gagap teknologi.
3. Memberi fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran daring.
4. Memotivasi peserta didik dalam hal pembelajaran daring.

### DAFTAR PUSTAKA

Munadi Mohammad dan Bernawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.

Solichin Mujianto.2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi*. Jurnal Studi Islam. Vol 6, No. 2. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Surat Edaran SMAN 1 Prambon tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebraran virus Covid-19.

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR DI RUMAH SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 BAGI SISWA TINGKAT SD DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**Vivi Roudlotus Syarifah, Diva Febianti, Achmad Nur Taufik**

## **Abstrak**

Sejak pertengahan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia saat ini gencar melakukan penanggulangan penyebaran virus Covid-19, dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang kompleks, pandemi covid 19 berpengaruh dalam segala aspek, salah satunya adalah bidang Pendidikan. Perubahan-perubahan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan Pendidikan pemerintah kabupaten Mojokerto, yaitu Belajar dirumah.

**Kata Kunci:** Covid-19, Kebijakan Pendidikan, Mojokerto.

## **Abstract**

Since mid-March 2020, the World Health Organization (WHO) has declared the corona virus outbreak (Covid-19) a global pandemic. The Indonesian government is currently aggressively controlling the spread of the Covid-19 virus by increasing inspection capacity. This condition creates complex problems, the Covid 19 pandemic affects all aspects, one of which is the field of education. Policy changes were made by the government, one of which was the Education policy of the Mojokerto district government, namely Studying at home.

**Keywords:** Covid-19, Education Policy, Mojokerto.



## PENDAHULUAN

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus corona (Covid-19) sebagai pandemi global yang mematikan dengan tingkat penyebaran yang sangat masif dan pesat, pemerintah Indonesia saat ini gencar melakukan penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Contohnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil beberapa langkah tanggap seperti membentuk Tim Tanggap Covid-19 dan memberlakukan pembatasan kegiatan di luar rumah serta Pemerintah Pusat yang membuat kebijakan baru melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) – disusul dengan Keppres No. 9/2020 yang membahas mengenai beberapa perubahan struktural.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Work From Home atau bekerja di rumah dan sekolah serta kuliah secara daring. Ini merupakan salah satu langkah strategis yang

diambil pemerintah untuk pencegahan wabah virus corona yang semakin meluas di Indonesia. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Pemerintah daerah meliburkan sekolah dan universitas untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam jaringan (daring atau *online*). Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang telah tersedia.

Namun dalam implementasi pembelajaran daring di Indonesia khususnya di Kabupaten Mojokerto tidak berjalan dengan baik, masih terdapat hambatan yang menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berjalan

secara efektif dan efisien. Penerapan pembelajaran daring terkendala banyak hal. Baik dari kompetensi gurunya, orang tua, maupun infrastruktur pendukung. Masih banyak orang tua yang tidak mempunyai gawai yang memadai, akibatnya anak kesulitan dalam mengerjakan tugas dari gurunya. Banyak orang tua yang mengeluh karena mereka terbebani tugas anak yang terlalu banyak, orang tua merasa terbebani karena untuk anak yang menempuh pendidikan sekolah dasar masih membutuhkan bantuan orang tua, selain itu tidak banyak orang tua di desa yang sudah melek teknologi, serta tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang bagus, dll.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda lebih dari 200 negara di dunia telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan. Hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam berdampak pada hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Jika kondisi seperti ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling dirasakan adalah

peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan, seperti sekolah disemua tingkatan, lembaga pendidikan non formal hingga perguruan tinggi.

Dalam menyikapi pandemi ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) yang salah satunya membahas terkait kebijakan belajar di rumah. Mendikbud menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

Pendidik/Guru harus memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada dirumah, inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan

memaksimalkan media yang ada seperti media daring (online). Guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode *E-Learning* yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti Whatsapp (WA), Telegram, aplikasi Zoom ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa belajar diwaktu bersamaan meskipun ditempat yang berbeda. Guru juga dapat memberikan tugas terukur namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut.

Implementasi kebijakan belajar di rumah selama masa pandemi Covid 19 bagi siswa tingkat SD di Kabupaten Mojokerto sendiri juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 4

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid 19. Semua kegiatan belajar mengajar siswa SD di Kabupaten Mojokerto dialihkan dengan kegiatan belajar dirumah. Konsep pembelajarannya sendiri yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan (daring). Para siswa SD mendapatkan materi serta tugas-tugas sekolah melalui grup whatsapp orang tuanya masing-masing yang sudah disediakan oleh para guru dari sekolah nya masing-masing. Proses pengumpulan tugas serta penilaiannya pun dilakukan secara online, sehingga tidak terjadi aktivitas secara langsung pada saat masa pandemi Covid 19 ini guna meminimalisir landaian kurva penyebaran Covid 19 terutama di Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mengawasi serta mengupayakan pemaksimalan kebijakan belajar dirumah selama masa pandemi ini. Seluruh sekolah di Kabupaten Mojokerto telah di alihkan dengan kegiatan belajar dirumah sejak turunnya surat edaran dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan belajar

dirumah selama masa pandemi Covid 19 ini memberikan dampak bagi para siswa, pendidik, instansi terkait dan juga para walimurid. Dampaknya pun bermacam-macam, baik yang tergolong dalam dampak negatif maupun dampak positif.

Dampak positifnya diantaranya adalah para siswa SD di Kabupaten Mojokerto tidak perlu datang ke sekolah guna melaksanakan proses belajar mengajar, materi yang diperoleh terkesan lebih simple karena langsung diberikan oleh para guru melalui sistem online, dan juga beberapa dampak positif lainnya.

Kebijakan belajar dirumah ini juga membawa beberapa dampak negatif, baik yang dirasakan oleh para siswa, pendidik, maupun orang tua. Salah satunya adalah proses belajar mengajar dinilai kurang efektif karena minimnya interaksi 2 arah antara siswa dengan gurunya, gurupun tidak bisa dengan leluasa menjelaskan materi kepada siswanya seperti pada saat proses belajar mengajar disekolah seperti biasa sehingga

materi yang didapat oleh siswa juga kurang dapat diterima dengan maksimal. Selain itu, proses belajar mengajar juga seringkali terhambat karena faktor eksternal seperti jaringan internet yang sering terkendala di beberapa desa yang ada di Kabupaten Mojokerto, selain itu tidak semua siswa dan orang tuanya memiliki ponsel yang memadai begitu juga dengan kondisi perekonomian yang seringkali membuat mereka kesulitan dalam membeli kuota internet guna mengakses pembelajaran dengan sistem online.

Dampak negatif lain yang juga sering dikeluhkan oleh beberapa orang tua siswa SD pada kondisi saat ini yang memaksa para anak mereka untuk belajar dari rumah ialah kesulitan orang tua dalam menggantikan peran guru untuk menjelaskan materi pada putra putrinya masing-masing, anak juga terkesan lebih menggampangkan dan cenderung malas karena belajar hanya dari rumah saja. Sehingga banyak tugas yang diberikan oleh guru justru

dikerjakan oleh orang tuanya masing-masing.

Kondisi demikian jika terus menerus dilakukan justru akan memperparah dampak buruk lainnya dan juga dapat mempengaruhi pola pikir serta daya serap dari para siswa, khususnya di tingkat SD. Karena diusia seperti ini, seharusnya mereka mendapatkan pembelajaran disekolah dengan metode penjelasan secara langsung oleh bapak ibu guru dan bersosialisasi dengan teman sekitar, sehingga akan membawa pengaruh terhadap daya kembang dan pola pikir siswa di tingkat SD.

Untuk menyasati beberapa dampak negatif tersebut, kemendikbud berupaya membuat inovasi baru untuk pembelajaran di masa pandemi covid 19 ini. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan salah satu tv nasional untuk menayangkan pembelajaran pada siswa tingkat paud sampai dengan SMA. Hal ini dilakukan untuk kemudahan akses dan juga agar terciptanya pembelajaran yang tidak monoton untuk para siswa dan tenaga pendidik. Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Belajar dari Rumah yang akan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi nasional.

Program tersebut ditunjukkan sebagai upaya perluasan akses belajar kepada para peserta didik yang kesulitan dalam mendapatkan pembelajaran secara daring di masa darurat COVID-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. Program ini merupakan bentuk respon cepat yang dilakukan Kemendikbud usai mengadakan rapat dan mendapatkan masukan dari Komisi X DPR RI pada akhir Maret yang juga sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang terus digalakkan oleh Kemendikbud.

Dalam hal ini Kemendikbud berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan konten pendidikan yang berkualitas dan bermakna, bukan hanya kepada para peserta didik, tapi juga kepada para orang

tua murid dan akan ada lembaga non-pemerintah yang akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait konten program tersebut. Konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Program tersebut sudah bisa diakses masyarakat luas pada Senin, 13 April 2020 mulai pukul 08 00 WIB. Program yang direncanakan mengudara selama tiga bulan ke depan tersebut juga akan berisi materi bimbingan belajar bagi para tenaga pengajar dan orang tua murid. Program ini diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran yang menyeluruh antara peserta didik, para guru, serta orang tua murid.

## **PEMBAHASAN**

Analisis kebijakan belajar dirumah ini menggunakan teori implementasi menurut George Edward 3, sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Program belajar di rumah ini dapat dilihat implementasinya dari sisi komunikasi melalui 3 hal, yaitu secara dimensi

transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Secara dimensi transmisi kebijakan ini berlandaskan surat edaran Menteri yang informasinya kemudian disampaikan ke pemerintah kabupaten Mojokerto.

Kemudian, informasi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dirumah ini disampaikan kepada guru sebagai tenaga pendidik untuk tetap mengajar secara dalam jaringan, kepada murid serta kepada wali murid untuk senantiasa mendampingi anaknya selama masa belajar dirumah ini. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menyampaikan kepada guru untuk menyiapkan beberapa grup Whatsapp terkait mata pelajaran untuk mempermudah proses belajar secara online nanti maupun menggunakan platform digital lainnya, sehingga kejelasan dari informasi dapat disampaikan melalui pengarah-pengarah yang dilakukan melalui media massa berbasis online.

Target dari kebijakan ini adalah guru dan murid sebagai target utama, sehingga pemerintah kabupaten Mojokerto juga melalui dinas Pendidikan bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam menyediakan pengarah-pengarah dan kelonggaran didalam penerapan belajar dirumah ini terkait tugas dan pemberian materi yang dibuat lebih sederhana, agar dapat dipahami oleh masing-masing murid. Selain itu, pemerintah kabupaten Mojokerto juga menghimbau para wali murid untuk terus memberikan pengajaran juga melalui pendampingan-pendampingan kepada anak dalam menyerap materi pembelajaran dan mengerjakan tugas.

## 2. Sumber daya

Di dalam faktor sumber daya ini dapat dilihat dari 4 hal, yaitu sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan. Berdasarkan sumberdaya manusia, kebijakan belajar dirumah ini dapat dikatakan sudah cukup.

Hal ini dapat dilihat dari SDM guru yang sudah mumpuni didalam memberikan pengajaran, karena sudah terbiasa menggunakan media massa berbasis online untuk dimanfaatkan menjadi sarana mengajar, namun hal ini terkendala di murid yang masih bertingkat SD. Masih banyak anak yang kurang mengerti materi yang disampaikan, terutama pada mata pelajaran sains dan matematika, karena pada dasarnya mereka selalu didampingi oleh guru secara langsung.

Secara Sumberdaya anggaran, pemerintah kabupaten Mojokerto memberikan anggaran sebesar 6,5 milyar untuk penanganan selama masa pandemi ini, dan beberapa dianggarkan untuk bidang Pendidikan. Secara peralatan masih dapat dinilai cukup, karena memang sudah banyak masyarakat yang sudah menggunakan *smart-phone*, namun masih ada masyarakat yang belum menggunakan *smartphone*,

sehingga wali murid mengetahui informasi-informasi melalui tetangga-tetangga mereka.

Selain itu pemerintah juga menyediakan program interaktif belajar di rumah melalui pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TVRI dalam memberikan materi bahan ajar juga. Secara kewenangan, pemerintah kabupaten Mojokerto berhak menentukan bagaimana agenda Pendidikan selama masa pandemi ini, namun secara kewenangan belajar mengajar, keputusan ditentukan oleh guru dan wali murid terkait sistem mengajarnya menggunakan cara seperti apa dan melalui media massa apa melalui diskusi antara guru dan wali murid yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing.

### 3. Disposisi

Di dalam faktor disposisi ini dapat dilihat dari sikap pelaksana kebijakan dan insentif yang digunakan pemerintah kabupaten



Mojokerto yang diberikan kepada tenaga pendidik. Secara sikap pelaksana kebijakan yaitu pemerintah kabupaten Mojokerto melalui dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto bersifat kooperatif dan mengikuti instruksi dari pemerintah pusat.

Hal ini mereka lebih mengutamakan bagaimana kesuksesan social distancing dapat dijalankan. Selain itu pemerintah kabupaten Mojokerto juga dapat memberikan kewenangan belajar mengajar sesuai dengan kondisi setiap sekolah di masing-masing daerah untuk mengatur bagaimana semestinya kegiatan belajar mengajar itu dilakukan. Secara insentif, pemerintah kabupaten Mojokerto dinilai kurang memperhatikan guru honorer, karena insentif yang diberikan masih terlampau kecil dan tidak mencukupi untuk para guru honorer ini melakukan pemenuhan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang terjadi di Kemlagi,

Mojokerto. Guru honorer harus menumpang Wi-Fi di balai desa setempat untuk tetap bisa melakukan kegiatan mengajar, karena dinilai lebih efisien dari segi biaya yang dikeluarkan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari Standar Operasioal Prosedur dan Fragmentasi yang dijalankan. Secara SOP, dalam hal ini menggunakan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (Covid- 19). Surat edaran ini berisi mengenai proses diselenggarakannya kegiatan belajar di rumah yaitu sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh

- capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
  - c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
  - d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Kemudian secara fragmentasi, yaitu terkait dengan distribusi tanggung jawab didalam kebijakan belajar dirumah ini adalah pemerintah kabupaten Mojokerto dan dinas Pendidikan dan kebudayaan

kabupaten Mojokerto bertanggung jawab sebagai pelaksana/implementator yang tetap berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Mojokerto dan dibawah naungan dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Mojokerto.

Mereka memastikan kelancaran kegiatan belajar dirumah secara optimal dan menjawab berbagai kendala-kendala yang terjadi selama implementasi kebijakan ini. Secara tanggung jawab kegiatan belajar dirumah selama ini, diberikan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi daerah dan sekolah masing-masing.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kondisi saat ini memberikan banyak masalah yang kompleks, pandemi covid 19 ini mempengaruhi juga dalam segala aspek, salah satunya adalah bidang Pendidikan. Perubahan-perubahan kebijakan dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah kebijakan

Pendidikan pemerintah kabupaten Mojokerto, yaitu Belajar dirumah atas instruksi surat edaran dari Menteri kebijakan dan Pendidikan.

Kebijakan ini dianalisis dengan menggunakan teori implementasi George Edward III. Secara komunikasi kebijakan ini menerapkannya cukup baik dan konsisten, sumberdaya yang digunakan masih dinilai mumpuni dalam melakukan kebijakan ini. Berbagai elemn yang saling mendukung satu sama lain menjadi kunci didalam implementasi kebijakan belajar di rumah. Selain itu secara birokrasi masih memacu pada SE Menteri Pendidikan dan kebudayaan, namun implementasi ini dinilai kurang dari sisi insentif, karen masih dinilai kurang meperhatikan guru honorer mengenai masalah fasilitas selama melakukan kegiatan mengajar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alodokter. 2020. *Virus Corona (COVID-19)*. [https://www.alodokter.com/virus-](https://www.alodokter.com/virus-corona)
- [corona](https://www.alodokter.com/virus-corona) Diakses pada 17 April 2020.
- Detik News. 2020. *Penyebab, Asal Mula dan Pencegahan Virus Corona di Indonesia*. <https://m.detik.com/news/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-corona-di-indonesia> Diakses pada 17 April 2020
- <http://digilib.unila.ac.id/11494/4/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 17 April 2020
- Detik News. 2020. Pandemi Corona, Kemdikbud Luncurkan Program 'Belajar dari Rumah', <https://m.detik.com/news/berita/d-4971727/pandemi-corona-kemdikbud-luncurkan-program-belajar-dari-rumah> Diakses pada 17 April 2020
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona virus Disease (Covid- 19).

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI RUMAH  
DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA TINGKAT SD DI  
KABUPATEN GRESIK ( STUDI KAUS DI SD NEGERI 1 WRINGIANOM)**

**Bella Pristika, Ilmi Jyhan**

**Abstrak**

Pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri telah terjadi sejak akhir maret 2020 yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) menjadi pandemic global saat ini, sehingga menuntut pemerintah untuk segera membuat kebijakan di berbagai sektor guna memutus rantai penyebaran virus Corona. Salah satunya yang terkena dampak serius yaitu pada sektor pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan melihat tingkat resiko penyebarannya di daerah tertentu. Di Kabupaten Gresik, salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran daring dari rumah yaitu SD Negeri 1 Wringinanom sejak tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Mendikbud dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Dari hasil analisis yang penulis lakukan dari pelaksanaan kebijakan tersebut masih cukup banyak kekurangan serta tantangan yang harus dihadapi oleh sasaran kebijakan, dalam hal ini siswa serta guru SD Negeri 1 Wringinanom

**Kata Kunci:** Pandemi, Kebijakan Pendidikan, Pembelajaran.

**Abstract**

The Covid-19 pandemic in Indonesia itself has occurred since the end of March 2020 which has been determined by the WHO (*World Health Organization*) to become the current global pandemic, which demands that the government immediately make policies in various sectors to break the chain of spreading the Corona virus. One of them has been seriously affected, namely the education sector in Indonesia. Implementation of online learning from home to prevent transmission

of COVID-19 can be carried out by looking at the level of risk of spreading it in certain areas. In Gresik Regency, one of the schools that has implemented online learning from home is SD Negeri 1 Wringinom since March 16, 2020. The policy was implemented in reference to the Minister of Education and Culture Circular and the Governor of East Java. From the results of the analysis that the author conducted from the implementation of the policy, there are still quite a lot of shortcomings and challenges that must be faced by policy targets, in this case students and teachers of SD Negeri 1 Wringinom.

**Keywords:** Pandemic, Education Policy, Learning.

## PENDAHULUAN

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia.

Kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru

misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan.

Corona virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah,

dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Adanya wabah COVID-19 di Indonesia ini berdampak di seluruh kota atau kabupaten salah satunya yaitu di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik harus melakukan lock down untuk mengantisipasi penyebaran yang harus di lakukan menurut surat edaran dari presiden yang telah beredar di masyarakat sehingga harus melakukan kegiatan di rumah. Baik dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah. Hal demikian dilakukan guna untuk memberhentikan wabah COVID-19 agar tidak cepat meyebar.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Penkab Gresik salah satunya di bidang Pendidikan ialah meminta kepada siswa agar belajar di rumah.

Artinya, kegiatan belajar dilakukan tanpa tatap muka antara siswa dan guru di kelas. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengatakan, sesuai surat edaran Gubernur Jatim tentang pencegahan penularan virus corona, pelajar PAUD hingga SMA untuk sementara waktu belajar di rumah selama 14 Hari.

Kebijakan yang semula berlangsung 14 hari dilihat dari kondisi lingkungan yang semakin memburuk karena wabah COVID-19 ini akhirnya, Pemprof Jatim melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 420/2438/101.2/2020 tertanggal 16 April 2020 memperpanjang masa belajar di rumah bagi siswa SMA/SMK/PK-PLK. Dengan demikian proses belajar mengajar di sekolah di SMA/SMK/PK-PLK baru akan aktif kembali pada Selasa 2 Juni 2020. Sesuai termuat di dalam surat edaran itu, kebijakan ini juga berlaku bagi masa bekerja dari rumah bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan di SMA/SMK/PK-PLK di Jatim.

Kebijakan dari Pemprof Jatim telah dilaksanakan oleh Bupati Gresik dan menerapkannya pada semua sekolah dari PAUD hingga SMA salah satunya yaitu di SD Negeri 1 Wringinanom. SD Negeri 1 Wringinanom telah menerapkan kebijakan belajar dirumah. Kebijakan tersebut memiliki pro dan kontra dalam masyarakat. Tetapi tidak dipungkiri salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang pendidikan ini ialah salah satu cara agar wabah COVID-19 segera selesai dan mencegah meningkatnya wabah corona serta melaksanakan anjuran pemerintah lainnya yaitu ‘*Social Distancing*’ secara ketat. Maka dengan adanya permasalahan diatas, penulis ingin meneliti kembali terkait pelaksanaan program kegiatan pembelajaran di rumah pada tingkat SD di Kabupaten Gresik (Studi Kasus di SD Negeri 1 Wringinanom) yang kita ketahui bahwa kabupaten ini juga menerapkan Lockdown bagi masyarakatnya untuk memutus penyebaran wabah COVID-19.

## **METODE**

Dalam mengolah data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan juga di dukung serta oleh data lapangan baik foto maupun data. metode itu sendiri didasarkan pada logika atau data yang dapat memaksimalkan data yang dapat di dapat oleh sekitar akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Ada beberapa tahapan dan langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan metode kualitatif, antara lain: Langkah pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman (eksternal, globalisasi) yang paling urgen untuk diatasi secara umum pada semua komponen pendidikan. Langkah kedua, identifikasi kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Langkah ketiga, lakukan lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam konteks sistem manajemen pendidikan.

Langkah keempat, rumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Langkah kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan disusun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Dengan metode kualitatif tersebut diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis. Strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal salah satu upaya yang di maksimalkan melalui dispendik gresik yaitu edaran surat yang di keluarkan oleh dispendik mengenai prmbelajaran daring merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tingkat penyebaran covid dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu media pembelajaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang pertama kali muncul pada kota Wuhan terus berlanjut hingga bulan April 2020 telah menyebar diberbagai penjuru Negara. Kasus positif COVID-19 di berbagai cukup besar dan kasus meninggal dunia karena virus ini pun juga cukup besar. Berdasarkan data Worldometers, sampai pukul 18.00 WIB, 14 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di dunia ini telah mencapai 1.936.700 orang. Dan Negara yang menjadi salah satu positif COVID-19 ini adalah Indonesia. Indonesia sendiri tercatat jumlah kasus mencapai 8.211 kasus positif, 1.002 sembuh dan 686 meninggal dunia (<https://nasional.kontan.co.id/news/update-corona-indonesia-24-april-8211-kasus-positif-1002-sembug-686-meninggal>).

Pemerintah di setiap Negara telah mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan berbagai banyak kebijakan yang diterapkan. Terkhususnya adalah Negara Indonesia. Diketahui



bahwa kasus pertama pada Indonesia menimpa dua warga Depok, Jawa Barat yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak hanya kota Jakarta yang cukup banyak kasus positif COVID-19, salah satu Kota atau Kabupaten di Indonesia yang juga terkena kasus positif virus ini adalah Kabupaten Gresik.

Jumlah kasus positif di Kabupaten Gresik ialah 20 orang. Maka dengan adanya kasus tersebut Pemerintahan Kabupaten Gresik melakukan penindakan dan upaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kabupaten Gresik pun juga telah menerapkan peraturan pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 bahwa salah satu poin yang dijelaskan adalah masyarakat dihimbau untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Artinya menghimbau warganya untuk tetap dirumah saja dan meliburkan kegiatan sekolah tingkat PAUD sampai

SMA dan menggantinya dalam pembelajaran berbasis online. Dengan mengambil sejumlah langkah tersebut diharapkan dapat membentengi warga di berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik dari virus yang cukup berbahaya ini.

Kebijakan tersebut juga diterapkan pada SD Negeri 1 Wringinanom Gresik yang terletak pada Kecamatan Wringinanom. Kegiatan pembelajaran selama pandemi ini dengan berbasis online yaitu melalui whatsapp grup yang di pandu oleh setiap guru dalam jenjang kelas masing-masing. Dapat kita ketahui Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, dalam jenjang pendidikan ini memiliki 6 tingkat dari mulai kelas satu hingga kelas enam yang memiliki pelajaran yang berbeda-beda disetiap tingkatannya. Siswa dalam tingkat yang paling akhir yaitu pada kelas enam. Dalam pembelajarannya dibentuk agar materi yang dipelajari dapat mengantarkannya kepada tingkat

yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP.

Sejak pandemi COVID-19 ini, kebijakan yang sudah direncanakan mengalami perubahan meskipun telah di masak matang oleh Pemerintah khususnya oleh Kemendikbud. Dengan berbagai pertimbangan hingga membuat keputusan itu diambil salah satunya terkait dengan kesehatan siswa dan guru. Dengan hal ini pun pembelajaran yang pula dilaksanakan dikelas juga dilaksanakan secara online. Dengan keterbatasan ruang, siswa dan guru berinteraksi melalui alat komunikasi.

Sejak 31 Maret 2020, SD Negeri 1 Wringinanom Gresik mulai menerapkan kebijakan yang menerapkan pembelajaran melalui online. Pada minggu pertama pembelajaran berbasis online ini diterapkan, khususnya pada kelas satu. Guru kelas satu di SD Negeri 1 Wringinanom memberikan tugas bagi siswa nya melalui whatsapp grup berupa lembaran dengan format word. Keadaan ini kami ketahui pada wawancara salah satu murid kelas satu di SD Negeri 1

Wringinanom Gresik yaitu Galang Anaba.

“Waktu awal-awal saya merasa senang karena sekolah libur, tetapi seminggu kemudian saya banyak diberi tugas mengerjakan buku paket tema 1-4 dan mengerjakan semua buku LKS sampai habis, tidak hanya itu saya juga diberi berbagai tugas lainnya dari guru mata pelajaran lain, lalu mengerjakan soal yang dikirim dengan format word setiap harinya”.

Pada wawancara kami dapat mengetahui masih terdapat ketidakwajaran oleh guru yang memberikan begitu banyak tugas bagi siswa-siswanya. Karena dalam kebijakan baru yang diterapkan masih perlu adanya adaptasi bagi pelaksana kebijakan dan perlu adanya arahan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan siswa dan juga guru. Pada minggu berikutnya, dengan himbauan pemerintah bahwa perlu adanya pembelajaran tentang COVID-19 pada siswa, maka guru di SD

Negeri 1 Wringinanom Gresik memberikan pembelajaran COVID-19 dengan memberikan tugas mengenai COVID-19 yaitu menggambar virus COVID-19 dan memberikan cara menangani penyebaran COVID-19, hal ini juga kami dapatkan dari pernyataan Galang tentang tugas diminggu ke duanya.

“Minggu kedua saya mendapatkan tugas setiap hari membuat video terkait virus corona tersebut contohnya bagaimana hidup sehat, bagaimana mencegah penularan virus corona dan membuat himbauan kepada masyarakat supaya tetap dirumah saja dan menggambar”

Peran pemerintah dalam mengawasi pembelajaran berbasis online memang sangat diperlukan apalagi ditengah wabah COVID-19 ini yang dimana kebijakan yang sudah direncanakan harus diganti dengan kebijakan baru yang harus dipahami oleh tenaga pendidik juga pelajar atau siswa. Peran orang tua pun juga penting

dalam pembelajaran online ini, karena mengawasi anak yang selalu menggunakan smartphome dan mengawasi pembelajaran online yang diterapkan pada pandemi saat ini.

SD Negeri 1 Wringinanom menerapkan kebijakan belajar dirumah yang dimana setiap siswa mendapatkan soal yang diberikan oleh guru melalui grup whatsapp dan mengerjakan di rumah. Dengan diberikan waktu sampai jam 7 malam, siswa kelas satu SD Negeri 1 Wringinanom Gresik akan mengerjakan berbagai soal setiap harinya. Dalam kebijakan yang diterapkan ini mengharuskan siswa mengikuti pembelajaran dirumah melalui online, banyak ditemukan kekurangan yaitu materi yang seharusnya disampaikan pada pertemuan tersebut tidak diberikan, tetapi guru hanya memberikan tugas. Materi yang sebelumnya juga tidak ada pembahasan lebih lanjut oleh guru kepada siswa nya terutama kelas satu. Tetapi tidak hanya kekurangan tetapi ada juga kelebihan dari kebijakan ini yaitu, orang tua lebih fokus pada

pembelajaran anak melalui online dan mengetahui apa yang sedang dipelajari oleh anak-anaknya.

Pendidikan adalah salah satu faktor utama bagi penerus bangsa ini, walaupun dalam pandemi COVID-19 tetap perlu upaya agar pendidikan tetap berjalan sesuai mestinya dan tidak menghambat pembelajaran antara pendidik dan juga siswa. Maka dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara guru, siswa, orang tua dan juga pemerintah, agar bersama sama mewujudkan tujuan pendidikan meskipun keadaan yang mengkhawatirkan seperti ini.

Dalam keadaan seperti ini mau tidak mau maka proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode online atau E-Learning tanpa tatap muka. Dalam proses pelaksanaan mungkin terdapat hambatan-hambatan yang terjadi karena perbedaan kemampuan seseorang untuk mempunyai akses komunikasi yang digunakan. Dan selama proses pembelajaran darling dilakukan terdapat sisi positif dan negatif yang dirasakan oleh siswa maupun tenaga pendidik. Berikut

ialah sisi positif dan negatif selama proses pembelajaran E-Learning dilakukan:

## 1. Dampak Positif

### a. Jadwal fleksibel

Sistem *E-Learning* memungkinkan siswa untuk mengatur jadwal sendiri. Jadwal belajar fleksibel ini didukung dengan akses materi yang bisa dilakukan dari mana pun dan kapan pun. Sehingga siswa lebih enjoy dalam belajar karena tidak mengikat waktu seperti pembelajaran pada umumnya.

### b. Ritme belajar sesuai kemampuan siswa

Kegiatan belajar yang dilakukan secara individu membuat siswa dapat menyesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Siswa bisa mengulang materi sampai beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Hal ini salah satu yang tidak bisa didapatkan dari sistem pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

c. Siswa dapat memahami materi dengan lebih baik

Tiap-tiap siswa biasanya memiliki waktu-waktu tersendiri saat konsentrasi dan fokus mereka berada pada kondisi paling optimal. Waktu belajar yang fleksibel dapat dimanfaatkan siswa untuk melaksanakan proses belajar pada waktu-waktu yang tepat agar pemahaman materi dapat terjadi lebih cepat dan mudah.

d. Lebih hemat tenaga, biaya serta waktu

Pembelajaran online bisa dilakukan dari mana saja seperti di teras, tempat tidur, ruang tamu atau di tempat lainnya. Model pembelajaran ini akan sangat menghemat biaya transportasi, tenaga serta waktu yang biasanya diperlukan untuk perjalanan ke sekolah.

e. Berkesempatan untuk belajar dari orang-orang terdekatnya

Sistem pembelajaran online memungkinkan siswa belajar dari orang tua atau kakaknya yang dianggap mampu menangkap ilmu yang diajarkan di pembelajaran online tersebut. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memperoleh materi pembelajaran.

## 2. Dampak Negatif

### a. Konsentrasi Siswa

Terganggu

Kondisi rumah setiap siswa berbeda maka hal itulah yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa dalam menangkap materi yang disampaikan. Belum lagi suasana yang tidak kondusif berasal dari suara luar rumah.

### b. Pelajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari.

Jika dibandingkan dengan pembelajaran sistem tatap muka. Siswa lebih mudah menangkap materinya. Karena pada sistem tatap muka siswa bisa secara langsung menanyakan kepada gurunya tentang

materi yang belum dipahaminya

c. Kurangnya intraksi sosial antar teman ataupun guru dan pelajar.

Kurangnya interaksinya yang dilakukan bisa juga menyebabkan terjadinya mis komunikasi sehingga informasi yang diterima bisa salah kaprah dan kurang pemahaman.

d. Siswa Menyepelkan

Karena siswa menganggap bahwa tidak ada yang mengawasinya seperti halnya pembelajaran tatap muka yang selalu dipantau oleh guru. Selain dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh siswa dan pengajar. Ada juga tantangan ataupun hambatan yang memperlambat proses pembelajaran online. Yaitu koneksi internet yang terkadang tidak menentu. Namun bagaimana lagi untuk saat ini yang dapat diandalkan dalam kelancaran proses pembelajaran koneksi internet dan juga

kemampuan daya alat komunikasi yang digunakannya.

Jadi setiap sistem pembelajaran ada dampak positif dan negatifnya sendiri. Seperti halnya pembelajaran sistem online ini. Pada saat ini pembelajaran sistem online atau daring ini dinilai sistem pembelajaran yang efektif dan efisien di kondisi saat ini.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Kasus COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang pertama kali muncul pada kota Wuhan terus berlanjut hingga bulan April 2020 telah menyebar diberbagai penjuru Negara. Kasus positif COVID-19 di berbagai cukup besar dan kasus meninggal dunia karena virus ini pun juga cukup besar. Berdasarkan data Worldometers, sampai pukul 18.00 WIB, 14 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di dunia ini telah mencapai 1.936.700 orang. Dan Negara yang menjadi salah satu positif COVID-19 ini adalah

Indonesia. Indonesia sendiri tercatat jumlah kasus mencapai 8.211 kasus positif, 1.002 sembuh dan 686 meninggal dunia

Pemerintah di setiap Negara telah mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan berbagai banyak kebijakan yang diterapkan. Terkhususnya adalah Negara Indonesia. Diketahui bahwa kasus pertama pada Indonesia menimpa dua warga Depok, Jawa Barat yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020. Tidak hanya kota Jakarta yang cukup banyak kasus positif COVID-19, salah satu Kota atau Kabupaten di Indonesia yang juga terkena kasus positif virus ini adalah Kabupaten Gresik

Jumlah kasus positif di Kabupaten Gresik ialah 20 orang. Maka dengan adanya kasus tersebut Pemerintahan Kabupaten Gresik melakukan penindakan dan upaya dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kabupaten Gresik pun juga telah menerapkan peraturan

pemerintah Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 bahwa salah satu poin yang dijelaskan adalah masyarakat dihimbau untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Artinya menghimbau warganya untuk tetap dirumah saja dan meliburkan kegiatan sekolah tingkat PAUD sampai SMA dan menggantinya dalam pembelajaran berbasis online. Dengan mengambil sejumlah langkah tersebut diharapkan dapat membentengi warga di berbagai lapisan masyarakat di Kabupaten Gresik dari virus yang cukup berbahaya ini.

Kebijakan tersebut juga diterapkan pada SD Negeri 1 Wringinanom Gresik yang terletak pada Kecamatan Wringinanom. Kegiatan pembelajaran selama pandemi ini dengan berbasis online yaitu melalui whatsapp grup yang di pandu oleh setiap guru dalam jenjang kelas masing-masing. Dapat kita ketahui Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan

menengah, dalam jenjang pendidikan ini memiliki 6 tingkat dari mulai kelas satu hingga kelas enam yang memiliki pelajaran yang berbeda-beda disetiap tingkatannya. Siswa dalam tingkat yang paling akhir yaitu pada kelas enam. Dalam pembelajarannya dibentuk agar materi yang dipelajari dapat mengantarkannya kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Pertama atau SMP.

Sejak pandemi COVID-19 ini, kebijakan yang sudah direncanakan mengalami perubahan meskipun telah di masak matang oleh Pemerintah khususnya oleh Kemendikbud. Dengan berbagai pertimbangan hingga membuat keputusan itu diambil salah satunya terkait dengan kesehatan siswa dan guru. Dengan hal ini pun pembelajaran yang pula dilaksanakan dikelas juga dilaksanakan secara online. Dengan keterbatasan ruang, siswa dan guru berinteraksi melalui alat komunikasi.

Sejak 31 Maret 2020, SD Negeri 1 Wringinaaom Gresik mulai menerapkan kebijakan yang menerapkan pembelajaran

melalui online. Pada minggu pertama pembelajaran berbasis online ini diterapkan, khususnya pada kelas satu. Guru kelas satu di SD Negeri 1 Wringinanom memberikan tugas bagi siswa nya melalui whatshapp grup berupa lembaran dengan format word.

Masih terdapat ketidakwajaran oleh guru yang memberikan begitu banyak tugas bagi siswa-siswanya. Karena dalam kebijakan baru yang diterapkan masih perlu adanya adapatasi bagi pelaksana kebijakan dan perlu adanya arahan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan siswa dan juga guru. Pada minggu berikutnya, dengan himbauan pemerintah bahwa perlu adanya pembelajaran tentang COVID-19 pada siswa, maka guru di SD Negeri 1 Wringinanom Gresik memberikan pembelajaran COVID-19 dengan memberikan tugas mengenai COVID-19 yaitu menggambar virus COVID-19 dan memberikan cara menangani penyebaran COVID-19.

Peran pemerintah dalam mengawasi pembelajaran berbasis online memang sangat



diperlukan apalagi ditengah wabah COVID-19 ini yang dimana kebijakan yang sudah direncanakan harus diganti dengan kebijakan baru yang harus dipahami oleh tenaga pendidik juga pelajar atau siswa. Peran orang tua pun juga penting dalam pembelajaran online ini, karena mengawasi anak yang selalu menggunakan smartpone dan mengawasi pembelajaran online yang diterapkan pada pandemi saat ini.

SD Negeri 1 Wringianom menerapkan kebijakan belajar dirumah yang dimana setiap siswa mendapatkan soal yang diberikan oleh guru melalui grup whatshapp dan mengerjakan di rumah. Dengan diberikan waktu sampai jam 7 malam, siswa kelas satu SD Negeri 1 Wringinanom Gresik akan mengerjakan berbagai soal setiap harinya. Dalam kebijakan yang diterapkan ini mengharuskan siswa mengikuti pembelajaran dirumah melalui online, banyak ditemukan kekurangan yaitu materi yang seharusnya disampaikan pada pertemuan tersebut tidak diberikan, tetapi guru hanya

memberikan tugas. Materi yang sebelumnya juga tidak ada pembahasan lebih lanjut oleh guru kepada siswa nya terutama kelas satu. Tetapi tidak hanya kekurangan tetapi ada juga kelebihan dari kebijakan ini yaitu, orang tua lebih fokus pada pembelajaran anak melalui online dan mengetahui apa yang sedang dipelajari oleh anak-anaknya.

Pendidikan adalah salah satu faktor utama bagi penerus bangsa ini, walaupun dalam pandemi COVID-19 tetap perlu upaya agar pendidikan tetap berjalan sesuai mestinya dan tidak menghambat pembelajaran antara pendidik dan juga siswa. Maka dalam hal ini perlu adanya kerja sama antara guru, siswa , orang tua dan juga pemerintah, agar bersama sama mewujudkan tujuan pendidikan meskipun keadaan yang mengkhawatirkan seperti ini.

Dalam keadaan seperti ini mau tidak mau maka proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode online atau E-Learning tanpa tatap muka. Dalam proses pelaksanaan mungkin terdapat hambatan-hambatan

yang terjadi karena perbedaan kemampuan seseorang untuk mempunyai akses komunikasi yang digunakan. Dan selama proses pembelajaran daring dilakukan terdapat sisi positif dan negatif yang dirasakan oleh siswa maupun tenaga pendidik. Berikut ialah sisi positif dan negatif selama proses pembelajaran *E-Learning* dilakukan :

1. Dampak Positif
  - a. Jadwal fleksibel
  - b. Ritme belajar sesuai kemampuan siswa
  - c. Siswa dapat memahami materi dengan lebih baik
  - d. Lebih hemat tenaga, biaya serta waktu
  - e. Berkesempatan untuk belajar dari orang-orang terdekatnya
2. Dampak Negatif
  - a. Konsentrasi Siswa Terganggu
  - b. Pelajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari.
  - c. Kurangnya intraksi sosial antar teman ataupun guru dan pelajar.
  - d. Siswa Menyepelkan

Jadi setiap sistem pembelajaran ada dampak positif dan negatifnya sendiri. Seperti halnya pembelajaran sistem online ini. Pada saat ini pembelajaran sistem online atau daring ini dinilai sistem pembelajaran yang efektif dan efisien di kondisi saat ini. Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rosma, 2020, “Latar Belakang Virus Corona, Perkembangan hingga Isu Terkini”, <https://news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-perkembangan-hingga-isu-terkini>, Diakses Pada 1 Mei 2020.
- Sholihin, 2020, “Imbas Virus Corona, Dewan Minta Pemkab Gresik Keluarkan

Kebijakan Bersekolah di Rumah”.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/256710/imbas-virus-corona-dewan-minta-pemkab-gresik-keluarkan-kebijakan-bersekolah-di-rumah>, Diakses Pada 2 Mei 2020.

-, 2020, “-“.

<https://www.suarasurabaya.net/ke-lanakota/2020/pemprov-jatim-perpanjang-masa-belajar-di-rumah-sampai-juni/>, Diakses 1 Mei 2020.

-, 2020, “-“.

<https://nasional.kontan.co.id/news/update-corona-indonesia-24-april-8211-kasus-positif-1002-semuh-686-meninggal>, Diakses 1 Mei 2020.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN STATUS KLB NON-ALAM  
BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI  
KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS SDN GREBEGAN  
BOJONEGORO)**

**Nurudin Abdurohim**

**Abstrak**

Virus corona (Covid-19) merupakan virus yang berbahaya, karena dapat mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dampak virus ini telah mengakibatkan kelumpuhan sektor-sektor ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Dalam dunia pendidikan, para peserta didik yang paling merasakan dampak dari pandemi ini, karena mereka tidak bisa belajar di dalam kelas. Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu menunjang kegiatan belajar dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki para peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang berdasarkan Undang- Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003. Pada awal maret, Pendidikan Indonesia mengalami gangguan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena Indonesia harus melawan wabah virus corona (covid-19) yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi global oleh karena itu pemerintah harus segera mempercepat penanganan virus ini dengan manajemen penanggulangan bencana. Mengingat korban wabah pandemi corona (covid-19) yang meningkat setiap harinya, Bupati Bojonegoro akhirnya mengeluarkan surat edaran nomor 188/0567/412.306/2020 tentang Penetapan Status KLB Non- Alam Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro yang berisi tentang pembatasan interaksi masyarakat baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan dalam jumlah yang besar dan mengintruksikan lembaga pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar dirumah. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu

Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pendidikan

### **Abstract**

The corona virus (Covid-19) is a dangerous virus, because it can threaten the health and survival of the community. The impact of this virus has paralyzed sectors of the economy, health and education. In the world of education, it is students who are most affected by this pandemic, because they cannot study in the classroom. Schools are at the forefront of the educational process. Schools as formal educational institutions must be able to support learning activities and develop all the potential that students have including cognitive, affective, and psychomotor aspects, in accordance with the goals of national education as outlined under the Law on National Education System Number 20 of 2003. At the beginning March, Indonesian education experienced disruption in carrying out teaching and learning activities, because Indonesia must fight the corona virus outbreak (covid-19) which has been determined by the world health organization (WHO) as a global pandemic, therefore the government must immediately accelerate the handling of this virus with countermeasures management disaster. Considering that the victims of the corona pandemic (covid-19) outbreak are increasing every day, the Regent of Bojonegoro finally issued a circular number 188/0567 / 412.306 / 2020 concerning the Determination of the Status of Non-Natural Outbreaks of Disaster due to Corona Virus (Covid-19) Disease Outbreaks in Bojonegoro Regency which contains a large number of restrictions on community interaction both indoors and outdoors and instructs educational

institutions to carry out learning activities at home. The focus in this study is the implementation model according to George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureucratic Structure. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, verification or drawing conclusions.

**Keywords : Implementation , Education**

## **PENDAHULUAN**

Sekolah merupakan institusi paling depan dalam menjalankan proses pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus mampu menunjang kegiatan belajar dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki para peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasioanl Nomor 20 tahun 2003.

Pada awal maret, Pendidikan Indonesia mengalami gangguan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, karena Indonesia harus melawan wabah virus corona

(covid-19) yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi global oleh karena itu pemerintah harus segera mempercepat penanganan virus ini dengan manajemen penanggulangan bencana. Mengingat korban wabah pandemi corona (Covid-19) yang meningkat setiap harinya, Bupati Bojonegoro akhirnya mengeluarkan surat edaran nomor 188/0567/ 412.306/2020 tentang Peneta-pan Status KLB Non-Alam Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro yang berisi tentang pembatasan interaksi masyarakat baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan dalam jumlah yang besar dan mengins-truksikan lembaga pendidikan untuk

melaksanakan kegiatan belajar dirumah.

Keputusan Bupati Bojonegoro diatas adalah untuk melindungi masyarakat Bojonegoro dari penularan virus corona (Covid-19), mengingat bojonegoro tidak jauh dari zona merah surabaya yang sebelumnya telah ditemukan banyak kasus yang positif virus corona di kota pahlawan tersebut. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti Surat Edaran dari Bupati Bojonegoro dengan mengeluarkan surat edaran nomor 338/695/412.201/2020 perihal edaran pencegahan covid-19 yang berisi tentang himbauan untuk belajar dirumah bagi para peserta didik dari TK sampai dengan SMP se-Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan Belajar di rumah merupakan langkah yang baik untuk melawan pandemi ini. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret 2020 pemerintah memutuskan agar siswa- siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Jokowi telah menetapkan pembatalan Ujian Nasional 2020 akibat

pandemi corona atau Covid-19. Kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa mengurangi mobilitas pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menekan penyebaran corona. Dalam praktiknya, proses belajar mengajar di rumah, siswa dan guru dibantu dengan aplikasi belajar online. Namun, sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Belajar di rumah menjadi langkah yang dinilai ampuh dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, tak sedikit orangtua dan siswa yang kerepotan dengan kegiatan ini sehingga diperlukan kiat khusus.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh SDN Grebegan, kegiatan belajar mengajar tentunya sangat terkendala ditengah pandemi ini, karena fasilitas yang belum menunjang untuk melaksanakan pembelajaran daring, maka untuk menjamin terlaksananya kegiatan belajar di dalam rumah, para guru SDN Grebegan memutuskan untuk memberikan tugas secara online, yang nantinya orang tua

wali murid akan mendistribusikan tugas dari siswa SDN Grebegan kepada guru mata pelajaran masing-masing. Pemberian tugas nantinya di kirimkan melalui media online yaitu aplikasi WhatsApp.

Kendala-kendala diatas merupakan hal yang banyak sekali ditemui dalam dunia pendidikan Indonesia, hal ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini yang paling terdampak adalah para siswa, karena mereka terganggu dalam kegiatan belajar. Ketidakmampuan dalam memfasilitasi belajar online membuat para guru berinisiatif untuk memberikan tugas secara online. Tidak adanya interaksi tatap muka antara guru dan murid menjadi kendala yang paling utama, tak hanya itu kuota internet juga menjadi penghambat dalam proses pembelajaran ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan**

## **Penetapan Status KLB Non-Alam Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) Di Kabupaten Bojonegoro.”**

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi kuliah daring di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communi-cation*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Dispo-sition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Peneliti akan melakukan deskripsi berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2016), yaitu: Pengumpulan Data,



Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Virus corona telah menjadi musuh bersama, karena virus ini telah merubah tatanan dunia, bagaimaimana tidak seluruh sektor lumpuh mulai dari kesehatan, ekonomi, dan khususnya pendidikan. Dalam hal ini dunia pendidikan paling merasakan dampak dari pandemi ini, karena siswa-siswa tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas belajar di dalam sekolah, akibatnya para siswa tidak bisa maksimal dalam menerima materi yang disampaikan oleh para guru, karena hanya melalui pesa whatsapp.

Fokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi (*Disposition*) dan Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*). Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

### 1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Bojonegoro dalam upaya pencegahan covid-19, yang selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan mengeluarkan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah, surat ini berlaku untuk TK sampai dengan SMP di Kabupaten Bojonegoro, walaupun surat edaran tersebut terkesan mendadak tetapi bisa dimaklumi. Seperti apa yang diungkapkan oleh bu Efendi (April 2020) salah satu Guru SDN Grebegan.

### 2. Sumber Daya (*Resources*)

Tersedianya sumber daya yang memadai, siap di segala komdisi merupakan tugas dari pemerintah, wabah seperti

sekarang ini pemerintah seperti kuwalahan dalam menghadapinya, hal ini tentunya berimbas kepada dunia pendidikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Efendi selaku Guru SDN Grebegan. “Semua yang telah terjadi seperti saat ini tidak pernah di prediksi sebelumnya, pandemik ini datang tiba-tiba tanpa ada aba-aba. Semua panik, sumber daya yang kita miliki belum siap menghadapi wabah ini” Virus Covid-19 merupakan virus baru yang menyerang Indonesia, dan pemerintah belum siap akan serangan ini, oleh karena itu segala kegiatan belajar mengajar terpaksa dilaksanakan melalui pembelajaran daring, aplikasi yang familiar digunakan adalah WhatsApp. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bu Yani Selaku Guru SDN Grebegan. “Sumber daya dan Infrastruktur kami memang belum memadai untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar online, maka dari itu

kami menggantinya dengan tugas melalui aplikasi WhatsApp” Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, sumberdaya serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh guru SDN Grebegan kurang siap untuk menghadapi kondisi seperti sekarang ini, tetapi para guru tetap mengupayakan kegiatan belajar dirumah dengan memberi tugas kepada siswa SDN Grebegan.

### 3. Disposisi (*Disposition*)

Dengan adanya virus covid-19 ini, sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan keseriusan dalam menghadapi pandemi ini dengan menerbitkan surat edaran pencegahan covid-19. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melawan pandemi ini dengan mengeluarkan surat edaran berupa himbauan untuk belajar di dalam rumah. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Efendi selaku Guru SDN Grebegan. “Saya kira kami sudah bekerja sesuai dengan SOP, kita ada wabah

seperti ini harus mengantisipasi dengan segera, dan mengikuti anjuran dari pemerintah”. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Yani selaku Guru SDN Grebegan. “Virus ini merupakan virus yang berbahaya, jadi kita harus waspada. Jangan sampai ada yang tertular, maka kita harus mengikuti instruksi pemerintah. Jadi kita harus melakukan kegiatan belajar dari dalam rumah” Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah sudah bekerja sesuai dengan SOP, dengan memberikan himbauan pembatasan sosial bagi masyarakat khususnya para guru dan murid SDN Grebegan yaitu melaksanakan kegiatan belajar dari dalam rumah.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Birokrasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Pemerintah berjalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan sebuah prosedur operasional yang standar. Para guru dan murid SDN Grebegan wajib mematuhi apa yang dikehendaki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini turut disampaikan oleh Bapak Efendi selaku Guru SDN Grebegan. “Kami melaksanakan kegiatan belajar dari dalam rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya pencegahan covid-19. Kami memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dari para murid” Sejalan dengan pernyataan diatas, Ibu Yani selaku Guru SDN Grebegan Menyatakan;

“Kegiatan belajar dari dalam rumah merupakan intruksi dari pemerintah dalam menghadapi virus corona, oleh sebab itu kami menginstruksikan untuk para murid supaya tetap berada di dalam rumah selama pandemi ini berlangsung”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, para guru SDN Grebegan telah mematuhi anjuran dari pemerintah untuk menghimbau para murid supaya tetap berada di dalam rumah selama pandemi ini berlangsung, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna menghadapi virus covid-19 dan senantiasa menjamin kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Pemerintah lamban dalam menghadapi pandemi ini, hal ini dilihat dari masalah yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Fasilitas yang tidak memadai mengharuskan para guru untuk memberikan tugas melalui aplikasi WhatsApp hal ini tentunya menghambat proses belajar dari para siswa karena semestinya mereka tidak di bebani oleh tugas dari para guru melainkan interaksi belajar

mengajar secara daring melalui aplikasi yang tersedia di internet, namun SDN Grebegan belum siap untuk hal ini.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

Impelementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Harus ada Standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana Kebijakan Tersedianya sumber daya, baik merupakan dana, teknologi, sarana maupun prasarana lainnya dan, Komunikasi antar organisasi yang baik. Dalam kasus yang terjadi di Bojonegoro, seharusnya pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana berupa penyediaan aplikasi yang menunjang interaksi guru dan murid dan penyediaan kuota internet dalam menghadapi pandemi karena kegiatan belajar mengajar sangat terganggu dengan serangan virus covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta. Cv, Alvabeta.

Solichin Abdul Wahab.2012. Analisis Kebijakan Dari Formulas ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharno. 2013. Dasar Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombok. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasioanl Nomor 20 tahun 2003.

<https://beritabojonegoro.com/read/19576-bupati-bojonegoro-perpanjang-status-klb-virus-corona-hingga-29-mei-2020.html>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4940266/cegah-corona-bupati-anna-liburkan->

sekolah-di-bojonegoro-selama-sepekan

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4946297/ini-instruksi-bupati-anna-cegah-penyebaran-corona-di-bojonegoro>

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBELAJARAN MODA DARING DALAM SITUASI COVID  
– 19 (STUDI PADA SMP NEGERI 03 LUMAJANG)**

**Dewi Rahmawati**

**Abstrak**

Salah satu alternatif pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam situasi COVID – 19 di Kabupaten Lumajang, SMP Negeri 03 Lumajang menjalankan kegiatan pembelajaran Moda Daring. Sesuai dengan Surat Edaran SMP Negeri 03 Lumajang Nomor 422/1509/427.41.01.03/2020 tentang kegiatan pembelajaran moda daring. Surat edaran ini merupakan tindakan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang masih memerlukan penyesuaian dengan sistem pembelajarannya. Dimana peserta didik harus dapat menyesuaikan diri yang pada awalnya proses pembelajaran tatap muka dan sekarang melalui handphone atau online. Sehingga terdapat beberapa hambatan dalam kegiatan pembelajaran moda daring, seperti kuota internet, signal, handphone, pemahaman materi yang diberikana, dan waktu kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, proses kegiatan pembelajaran moda daring belum sepenuhnya efektif dan efisien. Fokus penelitian yang digunakan adalah variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penyampaian informasi pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring sudah cukup baik sehingga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring lebih tepat sasaran atau target. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya yakni minimnya koordinasi antara pihak sekolah SMP Negeri 03 Lumajang dengan siswa-siswi dalam menjalankan surat edaran pembelajaran moda daring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pembelajaran, Moda Daring.

## **Abstract**

One alternative for implementing learning activities in the COVID-19 situation in Lumajang Regency, SMP Negeri 03 Lumajang is carrying out Online Mode learning activities. In accordance with the Circular Letter of SMP Negeri 03 Lumajang Number 422/1509 / 427.41.01.03 / 2020 regarding online mode learning activities. This circular is a measure to prevent the spread of the corona virus or covid-19 in the school environment. In online mode learning activities at SMP Negeri 03 Lumajang, it still requires adjustments to the learning system. Where students must be able to adjust to the first face-to-face learning process and now via cellphone or online. So that there are several obstacles in online mode learning activities, such as internet quotas, signals, cellphones, understanding of the material provided, and time for learning activities. In this case, the process of online mode learning activities is not yet fully effective and efficient. The focus of the research used is the variable communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of research in the delivery of information on the implementation of policies for online mode learning activities are good enough so that the Lumajang District Education Office in carrying out the implementation of policies on online mode learning activities is more targeted or targeted. However, there are obstacles in its implementation, namely the lack of coordination between the SMP Negeri 03 Lumajang school and students in carrying out an online learning circular letter from the Lumajang Regency Education Office.

**Keywords:** Implementation, Learning, Online Mode.

## **PENDAHULUAN**

Bencana merupakan sebuah fenomena atau peristiwa yang

diakibatkan oleh perubahan ekosistem yang terjadi secara tiba-tiba dalam tempo relatif singkat dalam hubungan antar

manusia dengan lingkungannya yang terjadi, seperti gempa bumi, banjir, dan wabah penyakit. Sehingga memerlukan tindakan penanggulangan bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, ataupun faktor manusia. Sehingga dapat membawa dampak pada kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa, dan dampak psikologis.

Pada saat ini, dunia diguncang oleh bencana non alam yakni wabah penyakit Virus Corona atau Covid-19. Virus Corona atau Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Dimana virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Menurut *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penyebaran virus corona atau Covid-19 dari orang

ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika orang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan tersebut dapat jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Sehingga ketika orang menyentuh mata, hidung, atau mulut akan dapat terkena virus corona atau Covid-19.

Virus corona atau Covid-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang sangat cepat, sehingga menyebar ke wilayah lain China dan beberapa negara lainnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus virus corona pertama kali ditemukan di Depok, Jawa Barat. Berdasarkan data terupdate penyebaran virus corona di Indonesia pada tanggal 14 April 2020 mencapai 4.557 kasus, dengan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 380orang dan jumlah pasien yang meninggal dunia 399orang (kompas.com).

Untuk mencegah penyebaran virus yang semakin meluas, pemerintah menetapkan kebijakan *social distancing* bagi masyarakat. *Social distancing*



merupakan upaya mengurangi interaksi/kontak fisik dan menjaga jarak dengan orang lain. Dimana pemberlakuan *social distancing* dilakukan dengan tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai. Seperti pusat perbelanjaan, pasar, kantor, sekolah, bioskop, dan menghindari pertemuan besar.

Penerapan kebijakan *social distancing* ini menjadi polemik bagi masyarakat. Dimana sekarang masyarakat melakukan kegiatan dirumah, salah satunya yakni kegiatan pembelajaran di rumah. Sesuai dengan Surat Edaran SMP Negeri 03 Lumajang Nomor 422/1509/427.41.01.03/2020 tentang kegiatan pembelajaran moda daring. Surat edaran ini merupakan tindakan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang masih memerlukan penyesuaian dengan sistem pembelajarannya. Dimana peserta didik harus dapat menyesuaikan diri yang pada awalnya proses pembelajaran tatap muka dan

sekarang melalui handphone atau online. Sehingga terdapat beberapa hambatan dalam kegiatan pembelajaran moda daring, seperti kuota internet, signal, handphone, pemahaman materi yang diberikana, dan waktu kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, proses kegiatan pembelajaran moda daring belum sepenuhnya efektif dan efisien. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini penulis mengambil judul “ **Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring Dalam Situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang** ”.

## **METODE**

Pada penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring Dalam Situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang” merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Soewadji (2012: 17). Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat menyeluruh dan tidak dapat dipisah – pisahkan antara

satu obyek dengan yang lainnya. Karena luasnya masalah maka perlu batasan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus (Sugiyono, 2015:207).

Fokus penelitian Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring Dalam Situasi COVID - 19 di SMP Negeri 03 Lumajang menggunakan analisis dalam Model Implementasi menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2015: 90-92) yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*),
2. Sumber Daya (*Resources*),
3. Disposisi (*Disposition*),
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga teknik yaitu dikutip dari model Miles and Huberman (Sugiyono 2009:246-252), ketiga teknik tersebut adalah reduksi data, penyajian

data, dan pemaparan atau penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan merupakan suatu pedoman yang sifatnya mengatur baik itu yang bersifat sederhana, rumit, maupun umum. Dalam era yang terbuka ini sering kita mendengar kata-kata kebijakan menjadikan hal tersebut bukanlah hal yang tidak khusus lagi. Kebijakan publik tentunya berkaitan dengan pemerintahan dalam melakukan sesuatu hal. kebijakan publik dibuat oleh lembaga atau institusi yang berwenang (*authorities*) setelah sebelumnya mereka menerima masukan atau input dari masyarakat / lingkungan dalam David Easton (Wibawa, 2011:12),

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 03 Lumajang yang dilakukan secara online melalui whatsapp. Mereka masih memerlukan penyesuaian dengan sistem pembelajarannya. Karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring baru pertama

kali dilakukan. Se-hingga diperlukan penyesuaian proses pembelajaran yang pada awalnya tatap muka dan sekarang melalui handphone atau online. Dalam hal ini, mereka cenderung kesulitan dengan adanya kegiatan pembelajaran moda daring. Dimana mereka harus memiliki handphone dan kuota internet untuk mengakses materi pembelajaran di Whatsapp Grup dan Google Drive. Seperti yang diungkapkan oleh Salasabila yang merupakan siswi Kelas VIII SMP Negeri 03 Lumajang, menyatakan bahwa :

“Menurut saya, pembelajaran moda daring kurang enak mbak, karena guru menjelaskan materi pelajaran hanya sebagian melalui chat di whatsapp dan lebih lanjutnya disuruh mempelajari sendiri. Sehingga proses pembelajaran membosankan dan tidak menyenangkan. Penjelasan materi yang kurang intens mengakibatkan beberapa materi kurang dapat dipahami, salah satunya

pelajaran matematika. Sehingga ketika saya ada tugas biasanya minta bantuan di google. Tugas yang diberikan lebih banyak yaitu 3 tugas per harinya. Pengumpulan tugas di foto dan dikirim melalui google drive. Disisi lain, juga terdapat pembelajaran melalui TVRI yang diakhir seasonnya terdapat tugas yang harus di kerjakan. Menurut saya, proses pembelajaran di TVRI sangat melatih kefokuskan dan ketanggapan dalam meresume materi yang diberikan, tetapi ada kekurangannya yakni intonsi mentoring pembelajaran di televisi cepat dan tidak bisa diputar ulang”. (wawancara melalui whatsapp pada tanggal 15 April 2020).

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring dalam situasi Covid-19 menurut siswa bernama Alifathur kelas IX SMP Negeri 03 Lumajang, menyatakan bahwa :

“Menurut saya, pembelajaran moda daring cukup sulit, dimana terdapat kendala utama yakni harus memiliki kuota internet yang cukup banyak untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Terutama ketika Tryout melalui Google Form yang diberi batas waktu pengerjaan. Selain itu, ketika kuis di Whatsapp Grup dimana guru memberikan soal dan anak-anak harus cepat-cepat menjawab dan jawaban teratas yang mendapat nilai tambahan. Sehingga dalam pembelajaran moda daring ini signal memiliki nilai yang berharga. Kuis diberikan pada saat guru telah memberikan penjelasan materi pelajaran sebab meskipun kadang beliau tidak menjelaskan seluruhnya. Lalu untuk tugas yang diberikan juga lumayan agak banyak mbak, apalagi tugas matematika. Biasaya guru sering mengulang pemberian tugas

matematika ketika tugas yang pertama banyak yang belum mengerti. Sehingga tugas biasa double – double mbak”. (wawancara melalui whatsapp pada tanggal 15 April 2020)

Dari hasil wawancara dari siswa-siswi SMP Negeri 03 Lumajang diatas, mereka cenderung merasakan hal yang sama. Dimana kendala atau hambatan yang dialami mereka yakni guru memberikan materi pelajaran kurang intens sehingga banyak siswa siswi yang kurang paham terkait materi pelajaran yang di berikan, terutama pada mata pelajaran matematika. Merujuk pada hasil penelitian yang telah didapat pada Kegiatan Pembelajaran Moda Daring SMP Negeri 03 Lumajang maka dapat dilakukan analisis implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi COVID - 19 berdasarkan empat variabel yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Unsur – unsur implementasi kebijakan yang terdapat dalam Tachjan (2006: 56) yaitu : 1) Unsur pelaksana 2)

Program yang dilaksanakan 3) Kelompok sasaran.

Untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring Dalam Situasi COVID - 19 di SMP Negeri 03 Lumajang peneliti menggunakan model teori George C. Edward III dengan empat variabel yaitu :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( *policy maker* ) kepada pelaksana kebijakan ( *policy implementor* ). Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Dalam hal ini kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda

Daring telah diputuskan sebagai sarana pembelajaran di rumah dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang sesuai dengan Surat Edaran Nomor 422/1509/427.41.01.03/2020 tentang kegiatan pembelajaran moda daring.

Informasi mengenai pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring disampaikan oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Lumajang, siswa-siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang. Penyampaian informasi yang dilakukan pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang kepada SMP Negeri 03 Lumajang yang bekerjasama siswa siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang agar mengetahui serta memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran kebijakan. Selain itu, pelaksana

kebijakan dapat mempersiapkan dengan baik apa saja yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran moda daring supaya apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan surat edaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berupaya untuk menyampaikan informasi tentang pembelajaran moda daring tersebut kepada pihak SMP Negeri 03 Lumajang, siswa-siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang melalui surat edaran tersebut. Dalam hal ini, penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring sudah cukup baik sehingga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan kegiatan

pembelajaran moda daring lebih tepat sasaran atau target.

Namun, terdapat kendala dalam implementasinya yakni minimnya koordinasi antara pihak sekolah SMP Negeri 03 Lumajang dengan siswa-siswi dalam menjalankan surat edaran pembelajaran moda daring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini, kurangnya koordinasi terkait proses pembelajaran karena yang pada awalnya siswa-siswi melakukan pembelajaran langsung atau tatap muka dan sekarang melalui handphone atau online. sehingga diperlukan adaptasi dalam persiapan menggunakan teknologi dalam proses kegiatan pembelajaran moda daring.

## 2. Sumber Daya

Faktor sumberdaya menjadi salah satu indikator yang turut mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sebaik apapun penyampaian komunikasi anatara implementator kepada kelompok sasaran, jika tidak

ditunjang dengan adanya sumberdaya yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Terdapat tiga sub indikator yang akan dibahas dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring dalam Situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang yaitu Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Anggaran, dan Sumberdaya Fasilitas.

Dalam implementasi kebijakan pelaksanaan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang sumberdaya manusia yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana kebijakan. Dimana pelaksana kebijakan kualitas sumberdaya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan surat edaran pembelajaran di rumah sebagai salah satu pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Selanjutnya, kualitas sumberdaya manusia pada

penerima kebijakan yaitu pihak SMP Negeri 03 Lumajang, siswa-siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring dari pihak sekolah belum sepenuhnya efektif dan efisien karena terdapat beberpa kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan. Salah satunya, pemberian materi pelajaran yang hanya sebagian sehingga siswa-siswi cenderung kurang paham materi yang disampaikan sedangkan wali murid tidak selalu mengerti materi pelajaran yang diberikan guru sehingga sebagian siswa siswi meminta bantuan di google.

Sub indikator selanjutnya adalah sumber-daya anggaran. Dalam hal ini, anggaran diperoleh dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk membiayai penyediaan alat kebersihan, hand sanitaizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah. dimana

masker ini diberikan kepada para guru atau karyawan yang bertugas di sekolah. Selain itu, digunakan untuk kebutuhan penambahan seperti pemberian kebutuhan pulsa data atau kuota internet bagi para guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang. Namun, penerimaan anggaran ini tidak merata. Hal ini dibuktikan dari kelompok sasaran yakni siswa-siswi tidak memperoleh tambahan anggaran untuk membeli kuota internet sehingga banyak siswa-siswi yang kesulitan dalam mengakses pembelajaran moda daring.

Selanjutnya adalah sumberdaya fasilitas dalam implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang yang dimaksud sumberdaya fasilitas yakni sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan kebijakan kegiatan

pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang. Sumberdaya fasilitas untuk sarana pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang adalah pemberian kebutuhan pulsa data atau kuota internet bagi para guru untuk melaksanakan pembelajaran moda daring dan menyediakan sarana seperti alat kebersihan, hand sanitaizer, disinfektan, dan masker bagi warga sekolah yang menjalankan piket di sekolah. Sedangkan sumberdaya fasilitas prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang adalah gedung sekolah tetapi pada situasi Covid-19 ini prasarana kurang dipergunakan karena untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Sehingga sumberdaya fasilitas prasarana kurang dirasakan oleh siswa-siswi karena mereka melakukan proses pembelajaran di rumah.



### 3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi terdiri dari dua sub indikator yaitu sikap dan insentif. Berdasarkan hasil wawancara dan surat edaran, sikap yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring yaitu mendukung penuh kebijakan pelaksanaan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Sikap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan kebijakan sudah baik dan positif terutama dalam situasi

pandemi Covid-19 ini. Selain itu, sikap dari pihak SMP Negeri 03 Lumajang juga sudah cukup baik. Dimana guru tetap melaksanakan tanggung-jawabnya untuk memberi materi dan tugas kepada siswa-siswinya meskipun terdapat beberapa kendala.

Sikap yang positif dalam implementasi kebijakan perlu juga didukung dengan intensif yang layak. Intensif dalam implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP 03 Lumajang dapat dikatakan cukup layak. Pengajar atau guru diberi kebutuhan tambahan yakni pemberian kebutuhan pulsa atau kuota internet untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang.

### 4. Stuktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang bersangkutan, dan hubungan

organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup *Strandard operating procedures* (SOP) yang akan memudahkan tindakan dari pelaksana dan juga fragmentasi atau pembagian tugas yang jelas kepada para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan surat edaran, dalam implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring di SMP Negeri 03 Lumajang, pedoman pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan SOP. Dimana SOP tertulis dan terlampir di dalam surat edaran. Dalam hal ini, pembagian tugas dan wewenang sudah cukup baik. Pihak SMP Negeri 03 Lumajang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebaik dan semaksimal mungkin.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan variabel penentu keberhasilan imple-

mentasi kebijakan, implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang telah dianalisis menggunakan model implementas kebijakan oleh George C. Edward III yang memiliki empat indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Brokrasi.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang melalui dan surat edaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran moda daring, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang berupaya untuk menyampaikan informasi tentang pembelajaran moda daring tersebut kepada pihak SMP Negeri 03 Lumajang, siswa-siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang melalui surat edaran tersebut. Dalam hal ini, penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring sudah cukup baik sehingga pihak Dinas Pendidikan

Kabupaten Lumajang dalam menjalankan pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring lebih tepat sasaran atau target. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya yakni minimnya koordinasi antara pihak sekolah SMP Negeri 03 Lumajang dengan siswa-siswi dalam menjalankan surat edaran pembelajaran moda daring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.

Implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang dilihat dari sub indikator sumber daya anggaran maupaun fassilitas dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana kebijakan. Dimana pelaksana kebijakan kualitas sumberdaya sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan surat edaran pembelajaran di rumah sebagai salah satu pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Selanjutnya, kualitas

sumberdaya manusia pada penerima kebijakan yaitu pihak SMP Negeri 03 Lumajang, siswa-siswi dan wali murid SMP Negeri 03 Lumajang. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan kegiatan pembelajaran moda daring dari pihak sekolah belum sepenuhnya efektif dan efisien karena terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan. Salah satunya, pemberian materi pelajaran yang hanya sebagian sehingga siswa-siswi cenderung kurang paham materi yang disampaikan sedangkan wali murid tidak selalu mengerti materi pelajaran yang diberikan guru sehingga sebagian siswa siswi meminta bantuan di Google.

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang adalah disposisi. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-

sebenarnya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Dimana indikator disposisi terdapat dua sub yakni sikap dan intensif. Kedua sub indikator tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Struktur birokrasi menjadi indikator terakhir yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Moda Daring dalam situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang. Pada indikator tersebut dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pedoman pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan SOP. Dimana SOP tertulis dan terlampir di dalam surat edaran.

### **Saran**

Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Moda Daring Dalam Situasi Covid-19 di SMP Negeri 03 Lumajang sudah cukup baik. Tetapi perlu dilakukan evaluasi dan perubahan terkait proses pembelajaran. Diperlukan model pembelajaran yang menyenangkan, seperti

pembelajaran melalui video. Dalam hal ini, model pembelajaran dimana guru membuat video materi pembelajaran beserta penjelasannya sehingga siswa-siswi dapat melihat dan memahami lebih dalam. Dibandingkan dengan guru hanya menjelaskan sebagian materi melalui Whatsapp Grup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Isman, Mhd. 2016. Pembelajaran Moda Dalam Jaringan (Moda Daring). Sumut: Universitas Muhammadiyah Sunatera Utara.
- Awaluddin, Yasser. 2018. Program Efektivitas Guru Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi Guru IPS SMP dengan Moda Daring Murni dan Daring Kombinasi. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol.3 No.1. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Djaja, Sutrisno. 2016. Harapan dan Tanggapan Guru

Pembelajaran Daring.  
Jember: Universitas  
Negeri Jember.

Pane, Aprida dan Darwis,  
Muhammad. 2017.  
Belajar dan Pembelajaran.  
Jurnal Kajian Ilmu  
Keislmana, Vol.3 No. 2.  
Padang: Universitas Islam  
Padangsidimpuan

CNBC Indonesia. 2020. Catat!  
Ini Cara Penyebaran Virus  
Corona Menurut WHO.  
(Online),  
(<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200330091817-37-148343/catat-ini-cara-penyebaran-virus-corona-menurut-who>),  
diakses 15 April 2020

Kompas.com. 2020. Jumlah  
Kasus Virus Corona  
Meningkat Pesat dalam  
Sepekan, Apa  
Penyebabnya?. (Online),  
(<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tr/en/read/2020/04/10/174500665/jumlah-kasus-virus-corona-meningkat-pesat-dalam-sepekan-apa-sebabnya->), diakses 15  
April 2020

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN DARING DALAM  
MENYIKAPI PANDEMI COVID-19 PADA TINGKAT SMA DI  
KABUPATEN LAMONGAN (STUDI KASUS DI SMAN 1 LAMONGAN)**

**Dicky Yuda Erdy Permana, Moh Nashrul Ummah**

**Abstrak**

PANDEMI COVID-19 yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) menjadi pandemic global saat ini, sehingga menuntut pemerintah untuk segera membuat kebijakan di berbagai sektor guna memutus rantai penyebaran virus Corona. Salah satunya yang terkena dampak serius yaitu pada sektor pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilaksanakan dengan melihat tingkat resiko penyebarannya di daerah tertentu. Di Kabupaten Lamongan, salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran daring dari rumah yaitu SMAN 1 Lamongan sejak tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Mendikbud dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Dari hasil analisis yang penulis lakukan dari pelaksanaan kebijakan tersebut masih cukup banyak kekurangan serta tantangan yang harus dihadapi oleh sasaran kebijakan, dalam hal ini siswa serta guru SMAN 1 Lamongan.

**Kata Kunci:** Pandemi, Pendidikan, Pembelajaran.

**Abstract**

The COVID-19 PANDEMIC has been set by WHO (World Health Organization) to become the current global pandemic, which demands that the government immediately make policies in various sectors to break the chain of spreading the Corona virus. One of them has been seriously affected, namely the education sector in Indonesia. Implementation of online learning from home to prevent transmission of COVID-19 can be carried out by looking at the level of risk of spreading it in certain areas. In Lamongan Regency, one of the schools

that has implemented online learning from home is SMAN 1 Lamongan since March 16, 2020. The policy was implemented in reference to the Minister of Education and Culture Circular and the Governor of East Java. From the results of the analysis that the author conducted from the implementation of the policy, there are still quite a lot of shortcomings and challenges that must be faced by policy targets, in this case students and teachers of SMAN 1 Lamongan.

**Keywords:** Pandemic, Education, Learning.

## PENDAHULUAN

Covid-19 atau virus Corona yang mengepung Indonesia tampaknya belum bisa diredam. Penyebarannya yang masif dan relatif cepat membuat orang-orang ciut. Semua orang terpaksa harus berdiam diri di rumah demi memutus rantai penularan COVID-19. Agenda-agenda massa dihilangkan, karena COVID-19 pula istilah *work from home* (WFH) jadi populer. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, Indonesia secara otomatis menjadi salah satu negara yang terdampak virus Corona. Jumlah korban yang terhitung positif terjangkit virus Corona mencapai 1.414 orang berdasarkan update pada tanggal 30 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) menjadi pandemic global saat ini menuntut pemerintah untuk segera membuat kebijakan di berbagai sektor guna memutus rantai penyebaran virus Corona. Salah satunya yang terkena dampak serius yaitu pada sektor pendidikan di Indonesia.

Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring di rumah. Sejak ditetapkannya surat edaran tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan dengan cepat mengambil tindakan, salah

satunya menutup sekolah sementara. Langkah ini diambil demi mencegah penyebaran virus Corona pada anak. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh siswa tingkat TK, SD, SMP dan SMA/Sederajat di seluruh wilayah di Kabupaten Lamongan. Sebagai solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam jaringan (daring), atau akrab disebut *Online*.

Dari seluruh tingkat sekolah di Kabupaten Lamongan, salah satu sekolah menengah yang menerapkan pembelajaran daring yaitu SMA Negeri 1 Lamongan. Sejak tanggal 16 Maret 2020, pihak sekolah resmi mengeluarkan surat edaran sekolah yang berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 402/1780/101.1/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19. Dengan begitu para guru di SMAN 1 Lamongan mulai menyesuaikan dengan memberi pelajaran dari rumah hingga sekarang.

Namun, dalam suatu kebijakan publik dibutuhkan persiapan yang matang sebelum

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tidak terlepas pula dari kebijakan Pembelajaran Daring dari Rumah yang diterapkan oleh SMAN 1 Lamongan yang pastinya memiliki kelebihan maupun kelemahan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan metode Analisis SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang (wikipedia.org, 2010), yang dikemukakan oleh Albert Humphrey.

Berdasar pada latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Kebijakan Pembelajaran Daring dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Lamongan”. Dan berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu: “Untuk mengetahui Analisis Kebijakan Pembelajaran Daring dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Lamongan”



## **KAJIAN TEORI**

### **1. Kebijakan Pendidikan**

#### **a. Definisi Pendidikan**

Definisi pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang melalui media pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Hawaii di India) tentang pentingnya pendidikan, yaitu: Pendidikan menuntut perkembangan anak saat mereka tumbuh, untuk tujuan mereka, pendidikan Memimpin semua cacat alami pada anak-anak ini, sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan dan kebahagiaan yang tinggi. Pendidikan adalah motivasi untuk mempersiapkan siswa melalui pelatihan, konseling, dan kegiatan untuk memenuhi peran mereka di masa depan.

#### **b. Definisi Kebijakan**

Terdapat beraneka-ragam pengertian kebijakan sebagaimana dirangkum oleh Irfan Islamy yaitu:

- 1) Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.
- 2) Carl J. Friedrick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 3) James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- 4) Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan

untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

c. Definisi Kebijakan Pendidikan  
Kebijakan pendidikan adalah kebijakan public di bidang pendidikan. Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan yang

bermutu perlu mendapatkan prulairitas utama dalam pengambilankebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini. Salah satu argument utamanay adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Riant Nugroho, 2008).

## 2. Analisis Kebijakan

Pengertian Analisis Kebijakan Menurut Dunn (2000:44) Analisis Kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktifitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktifitas-aktifitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks, tidak linear dan pada dasarnya bersifat politis.

Adapun kelima tahapan penting menurut Dunn sebagaimana tersebut diatas, meliputi :

a. Penetapan Agenda Kebijakan (*agenda setting*)

Dalam tahap ini, penulis berusaha menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakekatnya permasalahan ditemukan melalui proses *problem structuring*, proses *problem structuring* meliputi beberapa fase antara lain pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengenalan masalah. Adapun untuk merumuskan masalah dapat menggunakan metode analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki, *sinectik*, *brainstorming*, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan argumentasi.

b. Formulasi kebijakan (*Policy Formulation*)

Tujuan formulasi kebijakan adalah untuk mengetahui masalah apa yang harus dipecahkan (Dunn, 1995:78). Senada dengan

pendapatan Dunn, keban (1994:41) mengemukakan bahwa dalam kepastian informasi akan lebih baik bagi seorang analis untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk berpikir lebih realistis dan etis, analis tidak boleh melakukan apa yang disebut *solving the wrong problem*. Cara berpikir yang lebih realistis dan etis akan mampu melahirkan sebuah kebijakan yang terbaik dari kebijakan lain.

c. Adopsi Kebijakan

Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi

alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan teknik langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

- 2) Pengidentifikasi kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang akan direkomendasikan
  - 3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan tersebut lebih besar dari efek negatif yang timbul (Effendi, 2001)
- d. Implementasi Kebijakan
- Gordon (1986) dalam Keban (1994:45) mengungkapkan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk :
- 1) Mengorganisir yaitu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode untuk melaksanakan program
  - 2) Menginterpretasikan berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible
  - 3) Menerapkan Kebijakan yang telah diseleksi

Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran atau merealisasikan tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melakukan program.

e. Penilaian Kebijakan

Tahap akhir dari pembuatan kebijakan adalah penilaian kebijakan, yaitu menilai apakah semua proses implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, pada tahap ini evaluasi diterapkan.

Wibawa dkk (1994) mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk:

- 1) Mengetahui proses pembuatan kebijakan (dilakukan dan sesudah kebijakan)

- 2) Proses implementasi (evaluasi summatif dan formatif yang disebut evaluasi implementasi)
- 3) Konsekuensi kebijakan (evaluasi dampak kebijakan)
- 4) Efektifitas dampak kebijakan (evaluasi dampak kebijakan)

### 3. Dasar Hukum Kebijakan Pembelajaran Daring di Rumah

- a. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan
- b. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran covid-19
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 402/1780/101.1/2020, pokok surat tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap COVID-19
- d. Surat Edaran Kepala Sekolah SMAN 1 Lamongan Nomor 420/0307/101.6.23.1/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap

Corona Virus Disease (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Lamongan

### METODE

Dalam mengolah data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis SWOT. Analisis SWOT itu sendiri didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenghts*) dan peluang (*opportunities*), akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Ada beberapa tahapan dan langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan analisis SWOT, antara lain: Langkah pertama, identifikasi kelemahan (internal) dan ancaman (eksternal, globalisasi) yang paling urgen untuk diatasi secara umum pada semua komponen pendidikan. Langkah kedua, identifikasi kekuatan (internal) dan peluang (eksternal) yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Langkah ketiga, lakukan analisis SWOT lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman dalam konteks sistem manajemen pendidikan. Langkah keempat, rumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Langkah kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan disusun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Dengan analisis SWOT tersebut diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis. Strategi adalah suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kegiatan Pembelajaran Daring di Rumah Siswa SMAN 1 Lamongan**

Secara global, berdasarkan data UNESCO pada tanggal 19 Maret 2020, sekitar 112 negara telah menerapkan kebijakan

belajar dari rumah guna menekan penyebaran virus Corona yang semakin meningkat. Negara-negara tersebut antara lain Malaysia, Thailand, Jerman, Austria, Meksiko, Afrika Selatan, dan Yaman. Dari 112 negara tersebut, 101 negara menerapkan kebijakan belajar di rumah secara nasional. Sementara 11 negara lainnya, termasuk Indonesia menerapkan kebijakan belajar di rumah di wilayah-wilayah tertentu. (kompas.id, 31 Maret 2020)

Di beberapa daerah di Indonesia, kegiatan pembelajaran daring dari rumah telah berlangsung sejak tanggal 16 Maret 2020 dengan rencana awal hanya berlangsung selama 14 hari. Namun dengan pertimbangan situasi di Indonesia, dimana penyebaran COVID-19 ini semakin masif dan tak terkendali, maka pemerintah memperpanjang kebijakan tersebut hingga waktu yang masih belum bisa dipastikan.

Terdapat beberapa daerah yang memiliki pola Kegiatan Belajar Mengajar di Rumah, seperti di Kabupaten Lamongan

salah satunya SMAN 1 Lamongan. Pemkab Lamongan menghimbau bahwa guru dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*work from home*) dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dengan memilih platform media pembelajaran yang telah tersedia, antara lain menggunakan *Google Classroom*, *WhatsApp*, hingga Blog (Wawancara siswa SMAN 1 Lamongan). Kegiatan Pembelajaran Daring dari rumah tersebut sudah diterapkan SMAN 1 Lamongan sejak ditetapkannya Surat Edaran Mendikbud pada 16 Maret 2020.

Lebih jelasnya, aturan mengenai proses belajar mengajar dari rumah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pada poin dua Surat Edaran ini menjelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan proses belajar dari rumah, yaitu :

a. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman

belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.

- b. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai Pandemi Covid-19.
- c. Aktifitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
- d. Bukti atau produk aktifitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan member nilai/skor kuantitatif.

## 2. Analisis Kebijakan dengan Metode Analisis SWOT

Suatu kebijakan publik yang diimplementasikan tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang menjadikannya sebagai acuan dalam proses evaluasi kebijakan tersebut. Tak terkecuali kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini pada sektor pendidikan,

yaitu kebijakan Belajar dari Rumah secara daring sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran virus Corona yang semakin massif di Indonesia. Seperti yang diterapkan oleh SMAN 1 Lamongan yang mengacu pada Surat Edaran dari Mendikbud serta Surat Edaran dari Gubernur Jawa Timur tentang Pembelajaran secara Daring dari Rumah.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Teori yang dikemukakan oleh Albert Humphrey yaitu dengan memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*)

Tahapan penggunaan Metode SWOT dalam proses **Analisis Kebijakan Pembelajaran Daring dalam Menyikapi Pandemi Covid-19 di SMAN 1 Lamongan** dibagi menjadi 3 tahap, sebagai berikut :

**a. Menentukan variabel-variabel dari masing-masing**

**faktor *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, *Threats* (SWOT)**

a. Strength

- 1) Siswa merasa dengan pembelajaran secara daring dari rumah bisa lebih santai dan sekaligus dapat mengerjakan pekerjaan rumah yang lain.
- 2) Guru bisa lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan mengajar kepada siswa seperti batas waktu yang lebih banyak
- 3) Daya saing antar siswa lebih tinggi dan membuat siswa lebih optimis dengan nilai yang akan didapatkan karena tidak tahu secara langsung hasil pekerjaan siswa lain

b. Weakness

- 1) Siswa akan kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru karena tidak ada tatap muka secara langsung.
- 2) Mengurangi tingkat partisipasi siswa dalam



proses pemberian materi pelajaran

- 3) Guru akan kesulitan untuk menemukan metode pengajaran yang cocok diterapkan di pembelajaran daring kepada siswa

c. Opportunities

- 1) Melakukan pembelajaran yang selama ini diharapkan oleh guru
- 2) Membiasakan siswa untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu
- 3) Meningkatkan wawasan berpikir siswa untuk mendalami materi yang diberikan guru

d. Threats

- 1) Masalah kuota serta jaringan internet yang kurang memadai untuk menunjang proses pembelajaran daring
- 2) Fasilitas pribadi untuk menunjang proses pembelajaran daring yang kurang memadai bagi beberapa siswa, seperti *Smartphone* atau Laptop/PC

- 3) Tidak semua guru bahkan siswa menguasai penggunaan teknologi dalam upaya memanfaatkannya sebagai media belajar

**b. Membuat Analisis SWOT**

Berdasarkan SWOT yang telah dibuat, dapat ditarik beberapa keadaan yang bisa digunakan untuk membuat Strategi Strength Opportunity (Strategi SO), Strategi Weakness Opportunity (Strategi WO), Strategi Strength Threats (Strategi ST), dan Strategi Weakness Threats (Strategi WT). Adapun strategi tersebut dijelaskan secara deskriptif seperti berikut :

1) Analisa Strategi SO

Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembelajaran daring yang fleksibel dan kesepakatan bersama antara siswa dan guru, dengan begitu guru maupun siswa bisa dengan maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Selain itu juga dengan memberikan modul pembelajaran yang

dapat diakses siswa dan memberikan waktu untuk siswa mempelajari sembari dijelaskan oleh guru agar siswa dapat lebih aktif dan kritis terhadap materi pelajaran yang didapat.

2) Analisa Strategi WO

Strategi agar kelemahan dapat dijadikan sebagai peluang yaitu dengan membuat model pembelajaran daring yang tidak monoton dan dapat diakses dengan mudah yang akan berdampak pada bertambahnya semangat belajar siswa dalam mengikuti kelas online. Kemudian membuat sesi kelas diskusi online yang melibatkan siswa sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam hal mengemukakan pendapat di kelas.

3) Analisa Strategi ST

Strategi yang dapat diterapkan untuk menjadikan tantangan sebagai kekuatan yaitu dengan memberikan modul atau tutorial kepada guru dalam pemanfaatan media pembelajaran daring mengingat

tidak semua guru bahkan siswa dapat menguasai pemanfaatan teknologi media pembelajaran daring. Selain itu juga dengan memberikan fasilitas seperti subsidi kuota internet kepada siswa dan guru yang bisa diambil dari uang SPP siswa guna menunjang pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring ini tidak terkendala.

4) Analisa Strategi WT

Strategi yang dapat digunakan yaitu mencari alternatif pembelajaran daring yang lebih efektif sehingga siswa tetap bisa mendapatkan materi pelajaran. Seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud yaitu memberikan materi melalui siaran televisi TVRI setiap hari dengan begitu dapat mengatasi tantangan yang ada seperti kurangnya fasilitas dan lain-lain. Guru dapat memberikan tugas sesuai dengan materi yang diberikan dari siaran televisi tersebut misal

membuat rangkuman, essai pendek, maupun tugas lain yang berhubungan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah untuk mencegah penularan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan melihat tingkat resiko penyebarannya di daerah tertentu. Di Kabupaten Lamongan, salah satu sekolah yang telah menerapkan pembelajaran daring dari rumah yaitu SMAN 1 Lamongan sejak tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran Mendikbud dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Dari hasil analisis yang penulis lakukan dari pelaksanaan kebijakan tersebut masih cukup banyak kekurangan serta tantangan yang harus dihadapi oleh sasaran kebijakan, dalam hal ini siswa serta guru SMAN 1 Lamongan.

Kurangnya fasilitas yang memadai mulai dari alat, media pembelajaran, hingga kuota/jaringan internet hingga kurangnya penguasaan teknologi

dalam pemanfaatan media belajar mengajar membuat kebijakan ini dapat dibidang kurang berjalan mulus, salah satunya dikarenakan kurangnya persiapan yang matang. Oleh karena itu kebijakan harusnya memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat berjalan lancar dalam pelaksanaannya. Seperti jaminan kondisi eksternal maupun internal yang akan dihadapi lembaga tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Keterpaduan sumberdaya juga diperlukan. Sehingga juga dibutuhkan berbagai macam strategi untuk menyikapi tantangan maupun peluang dari kebijakan tersebut agar masalah-masalah yang timbul segera dapat terselesaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anonim. (12 April 2020). Karena Pandemi Korona, Para Siswa Dituntut Belajar Mandiri. Diakses Online pada 2 Mei 2020 <https://mediaindonesia.com/read/detail/303286-karena-pandemi-koronapara-siswa-dituntut-belajar-mandiri>

- Anonim. (13 Maret 2010). Teori Analisis Kebijakan. Diakses Online pada 3 Mei 2020  
<http://lembahperasaan.blogspot.com/2010/03/teori-analisis-kebijakan.html>
- Anonim. (13 April 2017). Kebijakan Pendidikan. Diakses Online pada 2 Mei 2020  
<https://www.kompasiana.com/rokyalaini/58d81fdeaf92737016d7ed70/kebijakan-pendidikan>
- Anonim. (16 April 2020). Analisis SWOT. Diakses Online pada 3 Mei 2020  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_SWOT](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT)
- Burhanuddin, Afif. (5 Februari 2014). Analisis SWOT dalam Pendidikan. Diakses Online pada 3 Mei 2020  
<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/02/05/analisis-swot-dalam-pendidikan-3/>
- Museum Kepresidenan. (23 Maret 2020). Kemendikbud Imbau Pendidik Hadirkan Belajar Menyenangkan Bagi Daerah yang Terapkan Belajar di Rumah. Diakses Online pada 2 Mei 2020  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/kemendikbud-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah/>
- Pengelola Web. (9 April 2020). Kemendikbud Hadirkan Program Tayangan "Belajar dari Rumah" di TVRI. Diakses Online pada 2 April 2020.  
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/kemendikbud-hadirkan-program-tayangan-belajar-dari-rumah-di-tvri>

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR DI RUMAH PEMKAB PASURUAN SE-TINGKAT SEKOLAH DASAR**

**Sabrina Amanda Oktaviranti , Moch. Rizky Ekandana**

## **Abstrak**

kebijakan publik merupakan upaya intervensi terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan, untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pendidikan. Kebijakan pendidikan tidaklah statis melainkan terus berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, dan dalam menghadapi pandemi covid-19 pemerintah dituntut melakukan penyesuaian supaya bidang pendidikan tidak semakin terpuruk, yakni dengan menyelenggarakan pendidikan melalui metode daring, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan guna mengukur capaian kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** pendidikan, kebijakan, implementasi.

## **Abstract**

public policy is a continuous intervention effort by the government in the interests of disadvantaged groups in society so that they can participate in development, to improve human resources it can be done with education. Education policy is not static but continues to change following the developments and needs of the times, and in the face of the Covid-19 pandemic the government is required to make adjustments so that the education sector does not worsen, namely by organizing education through online methods, this research uses policy implementation theory to measure the achievement of these policies .

**Keywords:** education, policy, implementation.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu dari sekian negara yang menempatkan pendidikan pada tempat yang strategis, dalam arti pendidikan merupakan satu kesatuan dengan pembangunan bangsa dan negara, yang hasilnya akan mempengaruhi keberlangsungan negara tersebut. Teori *human capital* menyatakan bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pendidikan. Manusia harus terus-menerus mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya demi menghadapi tantangan dan persaingan global. Pendidikan dianggap gerbang utama dalam pembangunan kualitas warga negara, oleh karena itu pendidikan di Indonesia selalu dikawal ketat dengan berbagai macam kebijakan untuk memastikan proses berjalan pada tempatnya dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Chandler dan Plano dikutip dari *The Public Administration Dictionary* (1982:1) bahwa kebijakan publik

adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan upaya intervensi terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Dimulai dari pasal 31 UUD 1945 bahwa “semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Lalu dirumuskan pula UU 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam pancasila. UU sisdiknas dibuat untuk mencapai hal-hal berikut : a)Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendi-

dikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. e)

Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasiguna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Kebijakan pendidikan tidaklah statis melainkan terus berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman, oleh karena itu pemerintah yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab dituntut bisa berinovasi dalam menyesuaikan segala tuntutan yang ada. Seperti yang terjadi dewasa ini, dunia diguncang dengan fenomena pandemi virus Covid-19 yang juga masuk di Indonesia dan cukup menelan banyak korban. Dilansir dari laman covid19.co.id, per tanggal 10 april 2020 terdapat 3512 orang yang positif Covid-19, angka tersebut masih terus bertambah mengingat ditemukan lebih dari 100 kasus positif setiap harinya. Hal tersebut juga mempengaruhi proses belajar mengajar dari berbagai lini pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.

Pemerintah khususnya kementerian pendidikan berusaha menanggapi isu tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19, yang dalam poin nomor 2 menjelaskan bahwa, Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan (b) Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19 (c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah (d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Kebijakan Menteri Pendidikan tersebut juga



ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah guna memperjelas dan menyesuaikan kondisi pendidikan di daerah masing-masing, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang melalui dinas pendidikan setempat yang mengeluarkan pemberitahuan nomor 443/1100/424.071/2020 bahwa kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pasuruan dilakukan dirumah peserta didik masing-masing. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi keputusan terbaik yang bisa dilakukan di masa pandemi, tentunya dibutuhkan peran dari berbagai elemen terkait, mulai dari guru, peserta didik, stakeholder, sampai orang tua.

Pada Implementasinya ditemukan cukup banyak keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan belajar dirumah tersebut, menurut pendapat salah satu wali murid siswa SDN 1 Prigen, “metode ini tidak efektif karena menjadikan anak kurang fokus terhadap pembelajaran, pemberian materi berupa lembaran soal latihan, dan ketika orang tua melaporkan hasil

kerja murid, guru hanya merespon seadanya”. Adapun menurut salah satu guru sekolah dasar tersebut mengatakan “berbeda guru berbeda pula kebijakannya, dalam arti guru menentukan proses kegiatan belajar mengajar secara pribadi, selain itu siswa sekolah dasar kebanyakan kurang mandiri sehingga dikhawatirkan hasil kerja murid tidak murni dikerjakan sendiri”. Faktor fasilitas di rumah juga menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut, dalam sebuah penelitian oleh Eka Susanti, Agus Wahyudin, yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Melalui Fasilitas Belajar di Rumah dan Motivasi Belajar Sebagai Intervening”, menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi orang tua memiliki faktor yang dominan dibandingkan dengan faktor lainnya, orang tua yang mempunyai kemampuan ekonomi yang baik akan melengkapi kebutuhan belajar anaknya seperti pemenuhan kebutuhan akan buku-buku pelajaran dan fasilitas-

fasilitas lainnya yang menunjang belajar anak.

Adanya berbagai permasalahan tersebut mengharuskan pemerintah pusat ataupun daerah mengevaluasi kebijakan belajar dirumah supaya fenomena pandemi dewasa ini tidak berujung tragedi khususnya dalam sektor pendidikan Indonesia Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 195) menjelaskan bahwa: Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Maka untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pendidikan dibutuhkan konsistensi kebijakan mulai dari perumusan hingga pelaksanaan, dan kebijakan belajar dari rumah masih melahirkan permasalahan baru dan dibutuhkan panduan teknis dalam pelaksanaannya, serta setiap lini pemerintahan maupun lembaga pendidikan dari pusat hingga daerah harus patuh dan dapat menyesuaikan keadaan guna mencapai tujuan kebijakan ditengah kondisi pandemi. Dari uraian di atas perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi kebijakan belajar di rumah oleh pemerintah kabupaten Pasuruan, hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Belajar di Rumah Pemkab Pasuruan se-tingkat Sekolah Dasar”.

## **METODE**

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat

variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. (1) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (2) Sumber daya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (3) Disposisi, adalah watak dan

karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. (4) Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

(1) Komunikasi, Implementasi kebijakan belajar di kabupaten Pasuruan tidak berjalan sebagaimana mestinya, di sekolah dasar negeri maupun swasta tenaga pendidik yang seharusnya tetap memberikan materi melalui media daring tidak memberikan materi tersebut dengan semestinya, dan hanya diberikan latihan soal sesuai mata pelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring di sekolah dasar swasta, guru biasanya memberikan briefing terlebih dahulu kepada wali murid melalui whatsapp grup, dengan harapan tugas yang akan diberikan dikerjain dengan baik dan sesuai dengan pengawasan wali murid. Lain halnya dengan sekolah dasar negeri yang tidak

memberikan briefing terlebih dahulu kepada wali murid dan langsung memberikan tugas kepada murid melalui media whatsapp grup. Hal tersebut didukung oleh pengakuan wali murid sekolah dasar swasta yakni SD Maarif Prigen, yang mengatakan: "sebelum anak-anak diberi tugas lewat grup WA, wali murid itu di briefing lebih dulu biar paham sama tugas anaknya, terus kami yang disuruh nyampein ke anak-anak...jadi ya kita ikut repot, kayak kerja dua kali jadinya, tapi tugasnya kalo di sd maarif itu setau saya ga selalu latihan soal, kadang juga disuruh buat vidio cuci tangan, hafalan al-quran, membaca buku bacaan, buat prakarya, ya meskipun juga kadang ndadak banget kalo ngasih tugas, apalagi kan kalo tugas prakarya gitu kita harus keluar dulu beli bahan, kan kerja dua kali lagi". Informasi tersebut menjelaskan bahwa prosedur pembelajaran daring yang terkesan berbelit-belit karena harus melibatkan peran orang tua, disisilain guru tidak menyampaikan materi yang seharusnya didapatkan secara langsung, akan tetapi melalui

tugas yang inovatif seperti tugas cuci tangan, dan membuat prakarya. Namun tetap harapan wali murid yakni anaknya dapat menerima materi yang selayaknya didapat waktu sekolah seperti biasa meskipun dengan cara daring. Berbeda dengan sekolah dasar swasta, beberapa sekolah dasar negeri seolah tidak berinovasi dalam proses pembelajaran daring, memberikan tugas ataupun latihan seperti *try out* tanpa memberikan proses interaksi kepada peserta didik, hal tersebut didukung oleh salah satu murid kelas 6 di SDN 1 Prigen, yang mengatakan “belajar online itu tidak enak, karena tidak bisa diskusi dengan teman, kita itu cumam di kasih tugas aja, dan tugasnya itu banyak banget, banyak yang aku gapaham sama pelajarannya, kadang-kadang juga disuruh ngerjain buku *try out* aja terus dikumpulin, kadang ga dikasih tau itu bener apa enggak. Tapi lebih bisa mandiri soalnya kan dirumah terus”. Informasi tersebut menjelaskan bahwa di sekolah dasar negeri hanya diberikan tugas tanpa menjelaskan mengenai materi pelajaran terkait, jadi peserta

didik diharuskan mencari informasi secara mandiri mengenai materi pelajaran dan untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Proses belajar mengajar pun akhirnya terkesan monoton karena hanya berjalan dari satu arah dari guru ke murid tanpa adanya proses bertukar pikiran. (2) Sumber Daya, Implementasi kebijakan belajar dari rumah di kabupaten Pasuruan sebenarnya bisa berjalan dengan baik jika tenaga pendidik mampu untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga tidak melahirkan permasalahan baru, modal utama yang dibutuhkan tentunya yakni guru harus paham teknologi media daring untuk proses belajar mengajar, selain itu inovasi juga dibutuhkan guna menunjang semangat pesereta didik dalam belajar dan tidak terkesan monoton. Namun fakta yang ditemukan di lapangan tidak demikian, di sekolah dasar negeri maupun swasta, tenaga pendidik cenderung kurang berinovasi sehingga hanya memberikan tugas dan latihan kepada peserta didik, sehingga banyak yang merasa keberatan akan hal

tersebut tak terkecuali wali murid, karena patut diperhatikan bahwa peserta didik di jenjang pendidikan dasar tidak begitu sadara dan mandiri seperti peserta didik pada pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi, jadi perlu pendekatan yang berbeda dari guru untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. (3) Disposisi, Untuk dapat memaksimalkan implementasi kebijakan belajar dari rumah, dibutuhkan partisipasi aktif berbagai elemen mulai tenaga pendidik, peserta didik hingga wali murid, namun di kabupaten Pasuruan, masih banyak tenaga pendidik atau guru yang kurang berinovasi sehingga proses belajar mengajar cenderung tidak menyenangkan bagi para murid, hal tersebut nantinya akan menimbulkan rasa bosan dan akhirnya proses belajar menjadi tidak optimal sebagaimana mestinya. (4) Struktur Birokras, dalam implementasi kebijakan belajar dari rumah di kabupaten Pasuruan tidak memperlihatkan peranya, karena tidak adanya SOP untuk mengatur dan menjelaskan surat edaran menteri

pendidikan dan kebudayaan terkait kebijakan belajar dari rumah sebagai bentuk antisipasi terhadap fenomena pandemi covid-19, bagaimana proses belajar mengajar yang seharusnya bagi pendidikan dasar di kabupaten Pasuruan, sehingga banyak keluhan dari masyarakat terkait hal tersebut, seperti tugas yang terlalu banyak, tidak ada proses interaksi antara guru dan murid. Pemerintah kabupaten Pasuruan hanya mengeluarkan surat edaran tanpa menjelaskan bagaimana proses yang seharusnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis teori implementasi kebijakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Implementasi kebijakan belajar dari rumah di kabupaten Pasuruan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum optimal, karena tidak adanya panduan tegas dari pemerintah kabupaten Pasuruan terkait proses yang seharusnya berlangsung, sehingga lembaga pendidikan dalam hal ini pendidikan dasar tidak semuanya

bisa menyesuaikan dalam keadaan tersebut, ditambah lagi kompetensi tenaga pendidik yang bisa dikatakan kurang karena tidak mampu berinovasi untuk menunjang proses pembelajaran sehingga banyak keluhan yang dirasakan oleh wali murid dan murid itu sendiri, seperti tugas yang terlalu banyak dan dalam prosesnya cukup berbelit-belit. Dampak yang terjadi karena kebijakan belajar dari rumah di kabupaten Pasuruan : murid menjadi stress karena materi sangat sedikit disampaikan namun tugas yang berikan cukup banyak menurut mereka. Wali murid yang seharusnya hanya mengawasi menjadi ikut direpotkan karena proses belajar yang harus mereka sampaikan ke anak. Proses belajar mengajar menjadi rancu di setiap lembaga pendidikan karena pemerintah kabupaten tidak menyediakan template apapun seperti tujuan yang harus dicapai, media yang

digunakan, tugas yang diberikan. Tidak adanya proses timbal balik kepada murid sehingga mengakibatkan murid tidak paham terhadap materi pelajaran

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2020. Situasi virus corona di <https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona>. (di akses 10 April 2020).

Chandler, Ralph and Jack C. Plano, 1982. *The Public Administration Dictionary*, JhonWiley and Sons, New York.

Repository UIN SUSKA. 2014. <https://www.repository.uin-suska.ac.id>. (di akses 11 April 2020).